



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN
SEKRETARIS JENDERAL, INSPEKTOR JENDERAL, DIRJEN TANAMAN
PANGAN, DIRJEN PERKEBUNAN, KEPALA BADAN LITBANG
PERTANIAN, KEPALA BADAN KARANTINA PETANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN
KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II (dua)
Rapat Ke	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Perkebunan, Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, dan Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 13 Februari 2020
Waktu	: Pukul 10.45-16.40 WIB
Tempat	: Ruang rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Jl. Jend Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat Acara	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) : Tindak Lanjut Rapat Kerja tanggal 18 November 2019, membahas: 1. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020; 2. Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020; dan 3. Lain-lain.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. Anggota DPR RI: dari 54 orang Anggota Komisi IV dengan rincian: 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 5 dari 12 orang Anggota 1. Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI) 2. Drs. I Made Urip, M.Si.

3. Ono Surono, S.T.
 4. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
 5. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.B.A.
- 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)**
3 Dari 8 orang Anggota
1. H. M. Salim Fakhry, SE., M.M.
 2. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
 3. Ir. Panggah Susanto, M.M.
 4. Alien Mus
- 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)**
6 dari 7 orang Anggota
1. G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua)
 2. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
 3. Ir. Sumail Abdullah
 4. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc.
 5. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 6. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.
- 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)**
3 dari 5 orang Anggota
1. H. Sulaeman L. Hamzah
 2. Fauzi H. Amro, M.Si.
 3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
- 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**
5 dari 6 orang Anggota
1. Daniel Johan (Wakil Ketua)
 2. H. Muhtarom, S.Sos.
 3. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A.
 4. Edward Tannur, S.H.
 5. Drs. H. Ibnu Multazam.
- 6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)**
4 dari 5 orang Anggota
1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Hj. Nur'Aeni, S.Sos, M.Si.
 4. Muslim, S.HI, M.M.
- 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**
4 dari 5 orang Anggota
1. drh. H. Slamet
 2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
 3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 4. H. Johan Rosihan, S.T.
- 8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)**
- dari 4 orang Anggota (ijin Fraksi)

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Ema Umiyyatul Chusnah.

10. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah

1. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.Si. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);
2. Justan Riduan Siahaan, AK. MACC. CA. (Irjen Jenderal Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
4. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian);
5. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian); dan
6. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

...Allah *subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat di DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Bamus tanggal 16 Desember 2019 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI pada tanggal 15 Januari 2020 pada hari ini Kamis, 13 Februari 2020 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen, Irjen, Dirjen Perkebunan, Dirjen Tanaman Pangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian dalam rangka membahas Rencana Kerja Anggaran tahun 2020 perubahan komposisi pagu anggaran tahun 2020 serta isu lainnya.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR RI saat ini Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI ditandatangani dan dihadiri oleh 14 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI dan terdiri dari 7 Fraksi. Untuk itu,

sesuai dengan ketentuan Pasal 246, Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat hari ini kami dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB)

Berhubung belum mencapai kuorum, rapat ini saya skors 5 menit.

(RAPAT DISKORS)

(SKORS DICABUT)

Rapat Dengar Pendapat hari ini dimulai pada pukul 10.40 menit dan akan diakhiri pada pukul 17.00 WIB apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat
2. Penjelasan Eselon I Kementan terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Eselon I Kementerian Pertanian;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Nampaknya yang datang ini sudah sarapan pagi jadi suaranya agak kencang.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Rapat Dengar Pendapat ini merupakan tindaklanjut dari Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian pada tanggal 18 November 2019 terkait rencana kerja program dan kegiatan tahun anggaran 2020. Komisi IV DPR RI ingin mendapatkan penjelasan mengenai usulan rencana kerja di lingkup Inspektorat Jenderal dengan anggaran Rp105 miliar, Badan Karantina Pertanian dengan anggaran Rp1,025 triliun, Direktorat Jenderal Perkebunan dengan anggaran Rp1,525 triliun, Badan Litbang Pertanian dengan anggaran Rp1,8 triliun, serta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan angka Rp5,762 triliun yang kemudian diusulkan berubah menjadi Rp5,612 triliun atau berkurang Rp150 miliar.

Nanti silakan dikaji, dipertanyakan, cuma kalau saya lihat disini Litbang ini 1,8 triliun kira-kira apa sih yang dihasilkan. Jangan-jangan Litbang ini singkatannya sulit berkembang. Selama ini Litbang dapat sekian-sekian apa coba yang diitukan, yang sangat miris ini Inspektorat Jenderal yang kerjanya memeriksa bukan kerjanya dikantor, kalau di kantor bukannya Irjen namanya, memeriksa anggaran yang cuma 105 miliar. Saya ini kadang bingung di

Kementerian Kelautan begitu, di Kementerian Kehutanan begitu, di Kementerian Pertanian juga begitu. Yakinlah tidak bakal ada temuan karena dananya tidak cukup.

Pada Rapat Kerja yang lalu Komisi IV DPR RI telah meminta kepada Pemerintah untuk melakukan evaluasi seluruh pelaksanaan kebijakan pertanian, melakukan validasi dan sinkronisasi data, meminta Pemerintah menyerahkan peta kawasan perkebunan kelapa sawit serta mempersiapkan road map kebijakan pengembangan secara akurat dan terukur.

Sehungan dengan hal itu, pada Rapat Dengar Pendapat hari ini Komisi IV DPR RI ingin mendapatkan penjelasan mengenai usulan rencana kerja program dan kegiatan secara mendetail. Kami juga meminta agar dalam penyusunan rencana kerja dilakukan secara teliti dengan menggunakan basis data yang valid serta sinkron. Karena kalau datanya saja tidak valid, Cuma katanya ya *wassalam* lah.

Rencana kerja yang disusun haruslah bermanfaat secara langsung kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan daerah dan tepat sasaran. Kami tidak ingin mendapatkan laporan antara lain mengenai bantuan Alsintan yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Sehingga keluhan petani penerima dalam hal ini, dalam hal operasional dan peralatan bantuan tersebut. Terdapat beberapa hal yang perlu juga mendapatkan perhatian antara lain, terkait harmonisasi data pertanian pasca rilis data luas baku sawah yang baru, benih dan alat mesin pertanian yang dibutuhkan serta optimalisasi dan realisasi target pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan dan/atau sarana dan prasarana perkebunan sesuai dengan Pasal 93 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Saran saya kepada saudara Dirjen Perkebunan gunakan dana BPDPKS. Dana yang APBN kalau bisa digunakan seefektif mungkin untuk hal yang lain. Karena dana BPDPKS ini Bapak salah satu timnya kan, berapa jumlahnya? 49 triliun sekian. Yang untuk rakyat sudah berapa?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Baru Rp1,2 triliun atau Rp1,3 triliun.

KETUA RAPAT:

Yang untuk lainnya berapa?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Ada sekitar Rp12 triliun untuk pengembangan bio diesel Pak.

KETUA RAPAT:

Berapa?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Sekitar 70% untuk bio diesel Bapak.

KETUA RAPAT:

Berapa nilainya.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Dari 50 berarti sekitar 29,3.

KETUA RAPAT:

Harusnya dana BPDPKS ini dipakai untuk replanting, karena ada Undang-Undangnya jelas mengatakan pungutan hasil ini untuk replanting, peningkatan SDM, perbaikan infrastruktur, cuma sekarang 1,7 sementara untuk bio diesel 29,7 triliun. Karena ada juga pengusaha dia stock kewajibannya Cuma sekian triliun dapat hasilnya lebih banyak daripada yang disetorkan.

Saya minta Dirjen Perkebunan sangat aktif dalam hal ini, serta yang paling penting adalah komoditas tertentu saudara Dirjen kita lihat Gernas Kakao, Bapak Made Urip paling tahu, dalam 10 tahun sekian triliun ke wilayah tertentu. Kalau kita hitung perbandingan dana yang dikeluarkan dengan hasil yang diproduksi tidak sebanding. Karena Dirjen Perkebunan pun harus meningkatkan komoditas lain.

Saat ini lada kita sudah mulai kalah, kopi kita sudah mulai lesu, masa kita kalah sama Vietnam. Bukan pengertiannya kalah tetapi mereka jalan kita agak lambat jalannya. Ini loh yang harus dipikirkan jadi jangan membuat rencana anggaran monoton "ah, copy paste saja sekian-sekian". Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana Kementerian Pertanian dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan yang baru saja diundangkan. Hal ini menjadi penting karena upaya peningkatan produksi dan ekspor yang dicanangkan Pemerintah bisa menjadi sia-sia jika tanpa disertai dengan upaya perlindungan komoditas pertanian lokal dari ancaman bio teorisme berupa hama dan penyakit, serta organisme pengganggu tumbuhan.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Demikianlah pengantar yang saya sampaikan. Selanjutnya kami persilakan eselon I Kementerian Pertanian untuk menyampaikan penjelasan hal-hal tersebut diatas. Saya minta setelah saudara Sekjen kemudian yang besar Tanaman Pangan, Dirjen Bun selanjutnya diatur.

Terima kasih.

Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV DPR RI, Serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dan atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat sehat wal'afiat sehingga kita yang hadir di sini dapat melanjutkan Rapat Dengar Pendapat.

Pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat ini kami melaporkan kepada Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat. Bahwa Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang akan memaparkan rencana kerja anggaran 2020 adalah nanti diawali Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Perkebunan, Kepala Badan Litbang Pertanian, Kepala Badan Karantina Pertanian dan nanti yang terakhir adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

Dengan mendasari kesimpulan keputusan Rapat Kerja tanggal 18 November 2019 kami informasikan bahwa alokasi anggaran yang telah diterima usulannya dan akan dibahas pada Rapat Dengar Pendapat hari ini adalah sebagai berikut.

Dirjen Tanaman Pangan diusulkan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5,76 triliun diperuntukan mendukung program peningkatan produksi tanaman pangan berbasis korporasi. Berdasarkan hasil konsultasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2020 maka anggaran Ditjen Tanaman Pangan diusulkan untuk dikurangi sebesar Rp150 miliar sehingga menjadi Rp5,61 triliun.

Ditjen Perkebunan alokasi anggarannya sebesar Rp1,53 triliun mendukung program gerakan peningkatan produksi nilai tambah dan daya saing perkebunan. Badan Litbang Pertanian alokasi anggaran Rp1,8 triliun mendukung program akselerasi pemanfaatan inovasi dan produksi benih bibit. Badan Karantina Pertanian alokasi anggaran sebesar Rp1,02 triliun dalam mendukung program penguatan layanan perkarantinaaan dan akselerasi ekspor serta Inspektorat Jenderal dengan anggaran sebesar Rp105,33 miliar.

Untuk lebih mengefisienkan waktu pada Rapat Dengar Pendapat hari ini, ijinakan eselon I yang hadir untuk memaparkan rencana kerja anggaran tahun 2020 secara bergantian. Selanjutnya mohon kiranya Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat untuk dapat memberikan masukan dan koreksi atas usulan anggaran yang dimaksud.

Barangkali demikian yang saya sampaikan untuk selanjutnya mohon ijin Dirjen Tanaman Pangan untuk bisa memaparkan rencana kerja anggaran tahun 2020.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Ijin.

Terima kasih Bapak Sekjen.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Bapak Ketua,
Yang terhormat Bapak Wakil Ketua,
Yang terhormat Anggota Komisi IV DPR RI,
Dan hadirin sekalian.

Sesuai pagu yang diusulkan Ditjen Tanaman Pangan dialokasikan Rp5,61 triliun. Dengan rincian komposisi anggaran Ditjen Tanaman Pangan per jenis belanja 2020 dari Rp5,61 triliun sebagian besar atau 86% Rp4,85 triliun berupa untuk masyarakat bantuan Pemerintah. Belanja pegawai 0,9% dan belanja operasional 0,4% dan non operasional 11% sedangkan belanja modal 0,8%. Sehingga 86% semuanya utuh masyarakat.

Lanjut, dari pagu anggaran APBN Tanaman Pangan 5,6 masih perlu dukungan dari Ditjen terkait seperti PSP dan yang lain. Kemudian dari Kementerian APBD dan Provinsi, juga kami akan mengakses KUR untuk tanaman pangan Rp14 triliun. Saya laporkan realisasi KUR Tanaman Pangan 2019 sekitar Rp3 triliun lebih. Kemudian juga investasi dan swadaya masyarakat. Ini semua untuk menggerakkan produksi sehingga diharapkan 2020 produksinya naik rata-rata 7% kami akan fokus untuk tanaman padi, jagung dan sisanya komoditas lainnya. Juga kegiatan hilirisasi pada komoditas dan wilayah-wilayah potensial yang sudah mapan sistem produksinya dan akan menggerakkan mendorong kearah ekspor.

Lanjut, kondisi 2011 data produksi BPS terakhir yang dirilis saya sampaikan 54,6 juta ton GKG untuk jagung 22,5 juta ton, kemudian kedelai 400 dan seterusnya di bawah. Kami sasaran kegiatan akan menjangkau 116 kabupaten....

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen saya mau tanya, kapan kita bisa swasembada kedelai?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Posisi sekarang 70% dari impor.

KETUA RAPAT:

Berapa jumlahnya 70%?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

2,9.

KETUA RAPAT:

Itu impor?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Dikuasai oleh berapa pengusaha?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Importir berapa saja.

KETUA RAPAT:

Berapa saja? berarti kurang lebih hampir monopoli toh?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Iya, dari total

KETUA RAPAT:

Dalam mereka impor apakah harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian cq. Dirjen Tanaman Pangan.

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Untuk impor kedelai tidak melalui Kementerian Pertanian, tidak melalui rekomendasi dari Ditjen Tanaman Pangan, itu langsung.

KETUA RAPAT:

Jadi bebas?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Dari Kementerian lain yang menangani.

KETUA RAPAT:

Tidak, saya tanya saya tahu Kementerian Perdagangan, jadi bebas?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Jadi tidak perlu rekomendasi?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Tidak ada rekomendasi.

KETUA RAPAT:

Kenapa tidak semuanya saja nanti usulkan kepada Menteri Pertanian dicabut, tidak usah pakai rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Jadi pengusahanya untung, swasembadanya tidak mungkin, kewajibannya tidak ada terhadap Pemerintah. Coba Bapak Sekjen nanti sampaikan kepada Menteri, seharusnya paling tidak harus ada rekomendasi biar ada pertimbangan. Jangan kewajiban mereka impor-impor untungnya besar, sementara konsumsi kedelai kita cukup besar loh. Ini saja Bapak Dedi kasih tahu saya, kok importir kedelai ini tidak pernah ada rekom, tidak ada pernah ada apa dari Kementerian Pertanian. Sementara komoditas lain harus ada rekomendasi.

Ini loh yang kadang-kadang saya agak membingungkan juga. Saya kalau tidak Bapak Dedi suruh saya ngomong, saya tidak bakal ngomong hari ini masalah kedelai.

Silakan lanjutkan.

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Lanjut, target produksi 2020 59,1 juta GKG kemudian komoditas lainnya naik 7%, KUR targetnya 14 triliun, penyerapan tenaga kerja 18 juta petani. Pemuda milenial 158 ribu, ekspor besar dan NTP-nya naik menjadi 106,5.

Lanjut, kami sudah merinci target ini, baik luas tanah, luas panen, produksi produktifitas dan kenaikannya dalam slide 7, padi, jagung, ini yang

merupakan prioritas kami. Selanjutnya ada target untuk kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar.

Lanjut, dan sudah kami rinci per provinsi detail per kabupaten tetapi yang kami sajikan per provinsi supaya ringkas target produksi padi 2020 di bandingkan realisasi data BPS 2019. Jadi kelihatan peningkatannya baik luas panen, produksi, dan produktifitas per provinsi di halaman 8 dan 9.

Lanjut, kami sampaikan pada slide 10 target program 2020 untuk pengembangan padi, benih dari alokasi yang ada 2,5 juta hektar ini sekitar 25% dari target luas tanamnya. Kemudian jagung 2,4 juta hektar sekitar 38%....

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen, tadi 2,5 juta hektar luas tanaman padi?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Dari program Pak.

KETUA RAPAT:

Dari program?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Iya, kalau targetnya 11 juta hektar.

KETUA RAPAT:

11 juta.

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Koma 6.

KETUA RAPAT:

Kira-kira nanti hasil produksinya berapa banyak gabah kering?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Ini kami menghitung bisa....

KETUA RAPAT:

Atau equivalen dengan beras, berapa?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Bisa mengungkit sekitar 3 juta ton beras.

KETUA RAPAT:

3 juta.

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Dari program ini akan kita fokus.

KETUA RAPAT:

3 juta ton beras, kurang lebih ini ya.

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Mengungkit dari program ini, mengungkitnya bisa 3 juta ton penambahannya. Beras, iya bisa nambah.

KETUA RAPAT:

Jadi hasil produksi berasnya berapa tahun 2020, diperkirakan saja.

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Dalam bentuk gabah 59, kalau beras sekitar 33-34 juta ton.

KETUA RAPAT:

Jangan seperti yang lalu, bilanganya 50 juta tapi data BPS cuma 30 juta. Saya tidak mau ada data kebohongan, disini para Dirjen bisa saja bohongin saya cuma 1 tahun ini. Apabila masih ada data yang tidak benar, tidak valid, bodong, ya kita lihat saja yang akan datang nanti bagaimana selanjutnya. Kebutuhan berapa?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Kebutuhan 29,7 juta ton.

KETUA RAPAT:

Berarti tidak impor ya?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Tahun 2019 pun sudah surplus 1,53 juta ton.

KETUA RAPAT:

Saya cuma mau tanya berarti tidak impor?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Tidak impor.

KETUA RAPAT:

Nah, nanti kamu jangan melamun saja, nanti masukkan di keputusan rapat, tidak ada impor.

Lanjut.

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Terima kasih.

Komoditas lainnya juga tetap didorong dari pagu yang ada, misalnya kacang hijau 25 ribu hektar, kacang tanah 30 ribu, ubi kayu bahkan untuk porang ini lagi favorit 20 ribu hektar. Kemudian Alsin pengolahan hasil 168, pasca panen 6.400 unit dan kegiatan-kegiatan lainnya sehingga menyerap tenaga kerja yang seperti saya sampaikan tadi. Termasuk memberdayakan kelompok 276 ribu kelompok tani dan target produksi ekspor.

Lanjut, slide berikutnya halaman 11 ini kami sandingkan target produksi dan sebelah kanannya program-program dari Pemerintah yang akan bisa mengungkit produksi tersebut bahkan juga kami sandingkan untuk KUR. Karena arahnya adalah bagi petani-petani yang dibantu tahun sebelumnya, tahun sekarang akan diarahkan untuk mendapatkan fasilitas dari KUR sehingga menjadi lebih mandiri.

Ini sudah dirinci per provinsi. Lanjut, ini target ekspor selama 5 tahun kedepan hingga 2024. Lanjut, masalah tanaman pangan

KETUA RAPAT:

Tunggu-tunggu, tadi apa target ekspor apa, coba saya mau tahu.

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Beras Pak, yang besar.

KETUA RAPAT:

Karena tulisannya kecil sekali di sana tidak kelihatan.

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Tahun 2020 target ekspor beras kemudian jagung, kacang tanah, ini yang paling banyak posisi sekarang sebenarnya adalah porang dan kacang hijau bisa 40 ribu ton kacang hijau.

KETUA RAPAT:

Bos, anda tidak usah ngomong jagung mau diekspor. Kita saja masih kekurangan di Indonesia untuk pakan. Jadi stop bilang ekspor jagung, kebutuhan peternak berapa? Sebagian besar sekarang dipenuhi oleh gandum impor untuk pakan ternak. Coba kalau gandum impornya kita stop untuk pakan ternak cukup tidak jagungnya? Saya jamin tidak cukup. Jadi sudahlah jangan membuat menterinya tersanjung ekspor ini-ini, tidak usah. Kita hitung dulu cukup tidak kebutuhan dalam negeri. Paham kan? Sekarang saya tanya Bapak Sekjen berapa besar gandum impor untuk ternak? Sampai 2 juta, 2 juta lebih kan. Itulah menggantikan jagung yang kurang di Indonesia. Jadi semua supaya tahu ini teman-teman jagungnya dianggap cukup, padahal jagungnya tidak ada. Ini loh tidak usah bicara target-target tidak usahlah, kita pikirkan kok cukup dalam negeri ini jagung. Coba kalau nanti tiba-tiba ditutup gandumnya, gandum impor untuk kebutuhan ternak tidak boleh masuk, apa yang terjadi? Cukup jagung, tidak bakal cukup bos.

Saya ingatkan Bapak Wandi supaya jangan begitu. Kita yang realistis saja, nanti yang kasihan siapa? Yang kasihan itu Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian. Itu saja.

Lanjut.

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Lanjut, slide 14. Pengembangan tanaman pangan fokus pada daerah-daerah sentral produksi untuk mengungkit produksi dalam skala hamparan rata-rata 500 hektar itulah yang kami dorong sehingga bisa meningkatkan produksi sesuai konsep yang ada di layar. Itulah skenarionya jadi pendekatannya kawasan berbasis korporasi.

Lanjut, kami sudah memetakan daerah-daeran yang produktifitas di atas 6 ton, ada yang di bawah 5 ton, sehingga kita mengelompokkan itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk kawasan utama yang sedang itu Bali dan seterusnya untuk padi dan sisanya kawasan pengembangan.

Lanjut, demikian juga untuk jagung dan selanjutnya slide berikutnya sinergi ini dalam rangka menghadapi panen raya, padi nanti akan panen bulan Maret-April. Sejak awal kami menggandeng bank penyalur KUR untuk memfasilitasi penggilingan sehingga bisa menyerap gabah secara optimal dan ini yang sudah kami lakukan mulai besok sudah bergerak untuk wilayah Jawa Tengah kemarin sudah di jogya.

Demikian Bapak dan Ibu sekalian, hal-hal pokok yang dapat kami sampaikan tentang rencana kerja tahun 2020.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Satu pertanyaan saya, kita masih impor singkong tidak, ubi kayu masih tidak?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Impornya tapioca Pak, itu masuk dari Thailand, kemudian itu juga sama tidak melalui rekomendasi Kementerian Pertanian.

KETUA RAPAT:

Yang saya tanyakan kita ada impor ubi kayu tidak?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Ada, tapioca sebagian besar.

KETUA RAPAT:

Yang saya tanyakan ada impor ubi kayu tidak?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Saya cek dulu.

KETUA RAPAT:

Tidak usah dijawab Bapak Wandu, cukup.

Teman-teman Anggota hari ini Indonesia yang negara agraris masih impor singkong atau dengan kata lain ubi kayu. Betul tidak Bapak Sekjen?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Bulan Januari, November 2018 impor untuk ubi kayu yang segar tidak ada, ubi kayu olahan sebesar 356 ribu ton. Untuk tahun 2019 Januari-November data kami untuk ubi kayu segar tidak ada impor, data BPS yang kami pakai. Kemudian impor yang olahan 335 ribu ton.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen 2016, 2017 ada impor singkong, ubi kayu ya. Hingga harga ubi kayu di Lampung itu dibawah Rp700,- harga beli pabrik kepada petani singkong. Begitu impor distop, begitu tapioca distop impornya harganya naik lagi menjadi Rp1.200,-. Target inilah yang perlu ditingkatkan dulu, jangan sampai kita impor lagi, malu kalau sampai singkong saja impor kan kita malu Pak. Jujur terutama itukan wilayah daerah pemilihan saya di Lampung, itu tanaman singkong sekian juta hektar. Pemerintah tidak ada cawe-cawenya sama sekali tidak ada. Miris saya kadang-kadang kalau ini, saya ke Dapil saya, rakyat bilang "Pak, bagaimana ongkos tanam, ongkos cabut, ongkos pemeliharaan, pemupukan tidak cukup Pak".

Yang namanya rapat dari Bupati, Gubernur, pengusaha ya sama, hasilnya tetap tidak ada. Ini loh yang tolong sekali lagi saya minta tolong menjadi perhatiannya. Disini kacang tanah saja impornya masih banyak, banyak banget hampir semua yang Bapak sering makan. Ini kacang yang dimakan sebagian impor bahan bakunya, kacang tanah itu, ini masih impor bahan bakunya. Ini loh kadang-kadang saya miris melihatnya. Kacang dua kelinci impornya berapa ribu ton, puluhan ribu ton tiap tahun. Tolonglah ditingkatkan produksinya dulu tidak usah bicara ekspor, tingkatkan dulu saja.

Selanjutnya.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Dirjen Perkebunan, kami persilakan.

DIRJEN PERKEBUNAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Ketua Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Bapak dan Ibu sekalian
para Anggota Komisi IV DPR RI,
Hadirin sekalian yang berbahagia.

Direktorat Jenderal Perkebunan dalam tahun 2020 mendapatkan alokasi 1,525 triliun. Langsung slide 4, kami ijin untuk menyampaikan kegiatan utama Direktorat Jenderal Perkebunan 2020.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati.

Kami fokus kepada perbaikan produktifitas daripada pertanaman perkebunan kita dilapangan, tentu melakuai perbenihan. Oleh karena itu, kami fokus anggaran itu kami gunakan sebesar-besarnya untuk pengembangan

logistic benih perkebunan. Di sana kami membangun kebun sumber benih dan nusery. Kami merubah kebiasaan lama yang sumber benihnya di tempat yang jauh. Sekarang kami membangun di dekat kawasan atau kluster pengembangan komoditas perkebunan. Sebagai contoh misalnya, kalau kita sering untuk kopi kakao mengambil di Jember kemudian ditanam di seluruh Indonesia itu tentu biayanya mahal dan juga resiko daripada benih itu mati dan sebagainya lebih besar.

Yang kedua, untuk benih ini tidak saja memperbaiki distribusi tetapi juga produktifitasnya. Sebagai contoh saat ini kopi kita baru 0,7 ton per hektar. Kami akan membangun logistic benih dengan varietas unggul baru sumbernya dari Badan Litbang Pertanian, dari Perguruan Tinggi, dari mana saja yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih besar 2,5 sampai 3 ton per hektar. Ini salah satu tujuan itu.

Oleh karena itu, penyediaan benih kita desain mendekati kepada lokasi pengembangan sekaligus kita membangun kemandirian benih di setiap kluster pengembangan. Kemudian yang kedua, peningkatan produksi, produktifitas dan optimasi lahan Bapak Ketua, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati. Pada posisi ini kegiatan utamanya adalah peremajaan, kemudian perluasan, rehabilitasi, intensifikasi dan diversifikasi. Yang ketiga adalah peningkatan nilai tambah daya saing dan juga pasar. Kami tentu mengalokasikan beberapa anggaran untuk peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi tentu yang akan kita create kegiatannya adalah alat mesin untuk pasca panen maupun pengolahan. Kemudian juga yang berkaitan dengan pengembangan organik dan penggalian potensi daripada indikasi geografis di setiap wilayah promosi dan juga kelembagaan ekonomi untuk memperkuat daripada kelompok-kelompok kebun kita.

Yang keempat, modernisasi perkebunan Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ketua dan Wakil Ketua serta para Anggota. Kami laporkan kami ingin melengkapi big data kami di perkebunan yang nanti akan di-link dengan yang dipusat. Melalui aplikasi teknologi digital kemudian juga aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian AWR (agriculture war room) khususnya di sub sektor perkebunan. Yang kelima, optimasi jejaring stake holder. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan penguatan daripada akses pasar tentu ini akan sangat strategis untuk kita fasilitasi kepada para pekebun kita.

Kemudian juga yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan ekonomi pekebun, kita mengalokasikan untuk bimbingan teknis, sekolah lapang, ada beberapa yang kaitannya dengan magang dan lain-lain. Kami mohon kembali ke slide 3, untuk itu kami mentargetkan beberapa komoditas produksinya sebagai berikut di tahun 2020 kopi 769 ribu ton, kakao 771 ribu ton, kelapa 2,8 juta ton, jambu mete 152 juta ton, laba 91,8 ribu ton, mohon maaf jambu mete 152 ribu ton, pala 46,5 ribu ton, kemudian teh 145 ribu ton, cengkeh 138 ribu ton, karet 3,7 juta ton, kelapa sawit 49,2 juta ton, kayu manis 79 ribu ton dan nilam 2.400 ton.

Beberapa ini Bapak dan Ibu sekalian, kami laporkan juga terus di slide berikutnya. Ini beberapa permasalahan juga menjadi bagian penting untuk kami selesaikan yang berkaitan dengan lahan perijinan, benih, pupuk dan

seterusnya. Terutama yang kaitannya dengan perijinan ini juga kami laporkan berbagai hal yang menjadi *obstacle* atau kendala di perkebunan. Untuk itu, menjadi penting untuk kita carikan solusi dan juga beberapa metode untuk itu.

Nah, selain daripada anggaran 1,5 triliun tadi sebagaimana Ditjen Tanaman Pangan juga demikian. Kami pun mengakses KUR dengan target Rp20,37 triliun untuk mengstimulasi, mengangkat, meningkatkan daripada produktifitas maupun hilirisasi komoditas perkebunan dan peningkatan daripada....

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen dan yang lainnya, Bapak Sekjen sampaikan, saya mau tahu dan nanti sebelum Rapat Kerja Menteri Pertanian tolong siapkan bahan KUR wilayah mana saja, keberhasilannya berapa, kegagalannya berapa, sebabnya apa. Karena setahu saya KUR ini sebagian besar gagal, karena apa? kurang pendampingan, kurangnya penyuluhan. Kan selama ini Anggota Komisi IV DPR RI tidak ada yang tahu. Contoh di wilayah saya ada KUR, tahu-tahu duitnya habis. Karena apa? pendampingnya kurang. Pak Irjen yang periksa tidak mungkin sampai ke kampung-kampung karena ongkosnya Cuma 105 miliar. Betul gitu Bapak Irjen? Ya, jadi semua yang menyangkut KUR dari Eselon I sebelum rapat dengan Menteri tolong dibagikan, supaya nanti teman-teman wilayah ini mengecek memberikan masukan “KUR ini tidak jalan karena ini, karena komoditasnya tidak tepat atau apa”.

Lanjut.

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Ijin Pimpinan, Sumail.

KETUA RAPAT:

Tunggu dulu Pak, biar selesai dulu, sebentar Pak.

DIRJEN PERKEBUNAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Ijin, kami lanjutkan dengan pagu anggarannya, rinciannya.

Bapak dan Ibu para Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Kami laporkan dari 1,525 triliun kami belanjakan sesuai dengan rincian sebagai berikut. Yang utamanya 91% kami belanjakan untuk bantuan Pemerintah untuk pembangunan perkebunan itu nilainya hampir 1,4 triliun. Kemudian sisanya untuk belanja pegawai dan belanja modal, masing-masing 100 miliar dan 33 miliar.

Terus kalau kita lihat distribusi daripada pusat dan daerah kami laporkan juga kurang lebih 60% yang terdiri dari dekosentrasi dan tugas pembantuan. Di kantor pusat 19%, kantor daerah ini maksudnya kantor vertical itu juga bagian daripada pusat 22%. Cukup tinggi karena kami

perankan UPT Balai Besar kami untuk meningkatkan produksi benih karena UPT ini adalah UPT yang punya kewenangan untuk produksi benih.

Terus, kalau kita lihat berdasarkan rincian kegiatannya. Untuk pembangunan logistic benih memperoleh proporsi 50,89 dengan nilai 776 miliar. Kemudian peningkatan produksi 197,7 miliar itu 12 atau hampir 13%. Peningkatan nilai tambah 10%, nilainya 152miliar. Kemudian optimasi jejaring stake holder 9,97% hampir 10% nilainya 152 miliar dan modernisasi perkebunan 122 miliar kurang lebih 88%.

Dalam rinciannya Bapak dan Ibu sekalian, para Pimpinan dan Anggota, kami laporkan untuk logistic benih tadi agregatnya sudah kami laporkan sebesar 704 miliar itu untuk membangun logistic benih tidak sajak di dalam konteks penyediaan benihnya tetapi kita akan membangun kebun sumber benih dan nursery di setiap cluster atau kawasan. Tentu menyesuaikan daripada jumlah anggaran, tahun ini kita akan bangun di 20 titik di seluruh Indonesia.

Kemudian dari perspektif penyediaan benih tanaman perkebunan, kopi sebagai contoh kami targetkan 12,7 juta batang, kakao 10,4 juta batang, kelapa 1,4 juta batang, mete 437 ribu, lada 6,8 juta batang, pala 1,4 juta batang, karet yang kemarin mendapatkan masukan arahan dari Pimpinan, bahwa kami harus mengurangi karena memang kita fokus kepada yang masih bisa ditingkatkan lebih besar. Yang tadinya 3,8 juta batang kami kurangi menjadi 2,9 juta batang.

Terus untuk pengembangan kawasan Bapak, Ibu, para Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI. Untuk pengembangan kawasan kopi alokasikan 12.750 hektar. Kemudian kakao 10.350 hektar, kemudian karet juga kami kurangi tentunya tinggal 7.250 hektar. Kami akan fokus di karet ini nanti pada hilirisasi supaya peningkatan harganya di tingkat petani, kebun kita adalah lebih tinggi lagi. Kawasan kelapa 11,8 ribu hektar, kawasan lada 11.450 dan pala 18.280, cengkeh 3.200, mete 3.600, vanili 50 hektar, ini masih kami batasi nanti kita bisa tambahkan untuk itu dan beberapa komoditas lainnya.

Terus untuk lokasi-lokasinya sebelum itu kami sampaikan langsung saja pada slide 13 kegiatan dan lokasinya. Terus, ini Bapak dan Ibu sekalian, jumlah provinsi dan kabupaten yang akan kita cover di dalam kegiatan perkebunan 2020. Sebagai contoh, untuk kawasan kopi untuk peremajaan kopi robusta kami akan cover 3 provinsi, 9 kabupaten, itu kalau kita hitung jumlah batang untuk replenting dan juga perluasan 3,7 juta. Nah, secara lengkap sudah kami sertakan di dalam bahan yang disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Jadi kami rinci untuk kopi, ada kopi arabika, robusta....

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Pak Dirjen, sebelum lanjut ya.

Kita memahami betul bahwa teh dan karet itu mengalami problem besar. Misalnya yang untuk di Jawa Barat itu hampir semua perkebunan teh itu terbengkalai, karet juga terbengkalai.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Interupsi Ketua.

Pimpinan interupsi, saya pikir lagi ada presentasi dari Bapak Dirjen lebih baik dilanjutkan dulu biar Anggota dan lain-lain memahami benar apa yang disampaikan oleh Dirjen. Karena menurut saya dalam aturan MD3 juga sudah diatur bahwa Pimpinan berfungsi sebagai orang yang mengatur jalannya persidangan.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Saya paham, hanya menyambungkan saja apakah itu nanti masuk dalam intervensi tidak, itu saja tidak untuk yang lain.

Terima kasih.

DIRJEN PERKEBUNAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Termasuk dalam fokus komoditas yang kita kembangkan teh, terutama 70% teh Indonesia ini ada di Jawa Barat. Kalau kita tangani Jawa Barat selesai itu, nah tetapi bukan berarti yang lain tidak karena ada kawasan baru yang 30% tadi.

Baik, kemudian untuk kakao slide nomor 15. Tadi juga sempat diberikan *warning* kepada Pimpinan, kita harus mencermati *lesson learned* daripada program Gernas kakao kita, maka kita juga sangat hati-hati di dalam ini. Jadi fokus kita adalah peningkatan produktifitas daripada kakao kita, kemudian hilirisasi. Nah, hilirisasinya ini kami memiliki satu target tidak saja pada *fermented non fermented* tapi juga lebih jauh lagi diolah karena memang pasarnya menghendaki itu. Ini ada untuk peremajaan ada 6 provinsi, Aceh, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sumut dan Sulbar. Kemudian untuk perluasannya ada 6 provinsi, DIY, Sumbar, Kaltim, Papua, Papua Barat dan Aceh dan kemudian pasca panen pengolahannya. Jadi kami bagi supaya nanti para Pimpinan dan Anggota bisa mencermati daripada kegiatan-kegiatan mana kira-kira yang bisa dengan aspirasi Bapak dan Ibu sekalian.

Terus, untuk kelapa seterusnya. Untuk kelapa ini kami fokus kepada peremajaan kelapa di 11 provinsi, 48 kabupaten, Riau, Kalteng, Sulut, Sulteng, Maluku, Bali, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Sulbar dan Aceh. Kemudian perluasannya hanya di satu provinsi karena ini kita sangat prihatin

Bapak dan Ibu Ketua dan Wakil Ketua, serta Anggota. Ini bahkan ada yang 70 tahun kita belum pernah mereplanting kelapa dalam kita, maka kita fokus kepada peremajaan.

Kemudian yang pengolahan ini juga sangat penting, banyak sekali *feedback* daerah untuk mengusulkan daripada itu. Keutamaanya tidak saja berhenti pada minyak goreng tetapi juga produk-produk lain seperti VCO, nata de coco dan seterusnya.

Baik, kemudian jambu mete kami laporkan untuk peremajaan kita akan bekerja di 5 provinsi, 8 kabupaten. Sultra, NTB, NTT, Maluku Utara dan Sulsel. Kemudian rehabilitasi di 1 provinsi, Maluku Utara. Kemudian perluasan di 2 provinsi, Sultra dan Jatim. Dan pasca panen pengolahan kita fokus di 4 provinsi NTB, NTT, Sultra dan Sulsel.

Kemudian karet Bapak dan Ibu sekalian, kami laporkan sejak awal kami mencermati apa yang menjadi catatan daripada Pimpinan dan Anggota untuk juga mengurangi terlebih dahulu fokus kita di karet. Kita lebih kepada konsep bagaimana bisa meningkatkan harga daripada karet ini. Nah, untuk peremajaan karet Bapak dan Ibu sekalian, kami laporkan kita akan fokus di 7 provinsi, 25 kabupaten, Sumbar, Jambi, Sumsel, kemudian Kalbar, Kalteng, Kaltim dan Bengkulu. Intensifikasi karet di Sumsel, kemudian perluasan karet di 2 provinsi, Riau dan Kalbar. Dan pengolahannya cukup banyak kami plotkan untuk 10 provinsi, Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalteng, Kalsel, Kaltara dan Kaltim.

Selanjutnya untuk lada, Bapak dan Ibu sekalian. Kami laporkan untuk rehabilitasi lada kami akan fokus di 7 provinsi, Lampung, Kaltim, Kalsel, Sultra, Babel, Kaltara dan Kalbar. Kemudian perluasan lada di 5 provinsi, intensifikasi di 2 provinsi, dan pasca panen di 5 provinsi, 7 kabupaten.

Terus kemudian untuk kawasan pala, kami untuk perluasannya kami fokus di 10 provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Kemudian rehabilitasi di 4 provinsi, 15 kabupaten, dan intensifikasinya ada di 3 provinsi, Aceh, Maluku dan Papua Barat. Dan kemudian pasca panen dan pengolahan kita fokus di 4 provinsi, 7 kabupaten, Sulut, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. Kemudian yang vanili di 6 provinsi, Jabar, Jateng, Sulut, Sultra, NTT dan Maluku Utara.

Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian. untuk yang tebu kami fokus di 5 provinsi utamanya untuk penanaman baru tebu kita, Jambi, Lampung, Sultra, NTB, dan NTT. Kemudian program bongkar Kita di 2 provinsi, Jateng dan Jatim dan rawat radon kita di 10 provinsi, mulai dari Jawa Barat hingga Gorontalo.

Demikian Bapak dan Ibu, para Pimpinan dan Anggota. Rencana kerja daripada Direktorat Jenderal Perkebunan. Mohon maaf dan mohon arahan serta masukannya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Selanjutnya, Kepala Badan Litbang Pertanian, saya persilakan.

KEPALA BADAN LITBANG PERTANIAN (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M.Si.):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI, dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Para hadirin yang sempat hadir.

Baik, saya akan menyampaikan secara ringkas rencana kegiatan Badan Litbang Kementerian Pertanian. Lanjut, kalau kita lihat komposisi anggaran dari Badan Litbang Pertanian alokasi anggaran kita lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk desiminasi ini kurang lebih 523 miliar, kurang lebih 29%. Untuk penelitian kurang lebih 193,62 miliar. Operasional 214 miliar, belanja gaji kurang lebih 498 miliar hampir 500 miliar. Dan untuk manajemen dan belanja modal kurang lebih 370 miliar. Kalau kita lihat per jenis belanja, belanja modal kurang lebih 108 miliar, gaji hampir 500 miliar, operasional 214 miliar dan non operasional kurang lebih 949 miliar.

Lanjut, ini kurang lebih gambaran umum program dan kegiatan 2020 terkait dengan perbanyak produksi benih sumber, tanaman dan ternak. Untuk tanaman pangan kita mengalokasikan kurang lebih 22,68 miliar, 1.276 ton. Untuk hortikultura 138.239 kg dan ada 287.600 batang kurang lebih 12 miliar. Untuk perkebunan ada kurang lebih 20,27 miliar ini terbagi untuk 3,94 set untuk tebu dan 2.000.393 pohon untuk komoditi yang lain. peternakan kurang lebih 128.230 ekor kita alokasikan kurang lebih 8,2 miliar. Dan untuk pengembangan benih bibit varietas unggul seperti padi untuk stunting, nutrising, jagung, kedelai biosai, sapi kurang lebih 19 miliar. Jadi kurang lebih 83,72 miliar kita alokasikan untuk perbanyak benih sumber.

Lanjut, untuk perbanyak produksi benih sumber untuk tanaman ternak untuk pangan, ini ada untuk benih padi inpari 4, ini inpari 5, 7, 30,32, 33, ada beras tarabas ini untuk beras japonica. Ada jagung hibrida komposit, tahan bulai, nasado 9, ada kedelai depon untuk isoplafon dan derek 1. Untuk bawang merah ada trisula, sembrani, pancasona, bima. Cabai untuk opsotion ada varietas kencana, kentang, TOB, median, segeranola dan krespo. Bawang putih PB lumbu hijau dan lumbu kuning. Jeruk varietas keprok, Monita, agri horti, pamindo agri horti, mangga PW jadun 21, durian POB sambaing, manggis ratu kamang, ratu tembilahan dan pisang kepo tanjung dan raja inalung. Jadi ada kurang lebih untuk hortikultura kurang lebih 12,9 miliar dan pangan 22,6 miliar.

Lanjut, untuk perkebunan kita mengalokasikan kurang lebih 20 miliar, ini untuk perbanyak tebu varietas PS881, PA028, Agribun, AMS agribun, Asagribun, CM agribun, kakao, BL50, kopi Lim 1, liberica, aneka rempah, lada varietas malaonan, pala varietas fak-fak, sapi PO terseleksi ada kurang lebih 100 ekor, domba lokal Garut, komposit Garut ada 560 ekor, unggas, ayam kobe, ayam sensi ada kurang lebih ada itik, master dan sebagainya 127 ribu ekor.

Lanjut, untuk padi nutrusing ini juga ada kurang lebih 19,8 miliar dan jagung fosfor, kedelai biosai dan beberapa sapi embel gembu. Lanjut, untuk penciptaan varietas unggul, teknologi dan pendukung varietas nasional. Jadi untuk kegiatan riset nasional kita sudah mengacu program Kemenristek Dikti. Jadi kebetulan kita dipercaya sebagai kordinator kegiatan varietas riset nasional untuk padi, untuk pangan, perkebunan, peternakan. Untuk varietas unggul ada kurang lebih 43 varietas galur yang akan kita hasilkan, kita alokasikan itu 53,75 miliar. Untuk bio teknologi 17 galur, 4 varietas, 5 teknologi kurang lebih 6 miliar. Perakitan teknologi kurang lebih 183 teknologi kurang lebih 29,72 miliar. Untuk pemetaan teknologi sumber daya pertanian kurang lebih 50 peta, 22 teknologi 40 miliar. Teknologi pasca panen kurang lebih 25 teknologi, 13 miliar.

Lanjut, varietas pendukung ini ada kurang lebih 4 varietas unggul baru padi yang rencananya kita hasilkan 2 POB jagung, varietas sorgum, 2 PB kedelai, kacang hijau, kacang tanah, PB bawang merah yang varietasnya kurang lebih 13 ton per hektar, cabai tahan antraknosa produktifitas 10 ton per hektar, 6 PW tanaman hias, PB jeruk dan buah, kentang, kacang panjang, PB tebu, lada, cengkeh, kopi, kelapa dan tembakau ada kurang lebih 2. Untuk peternakan sapi lokal vokasi dengan bobot 120 kg dan bobot badan 24 bulan lebih dari 400 kg. Galur ayam kobe 2, produksi telur 200 butir per tahun, kita sudah punya KUB 1 itu kurang lebih 180 yang coba kita naikkan sampai 200 butir per tahun. Galur KUB kaki kuning ini produksi telurnya kurang lebih 200 butir per tahun, ayam pedaging lokal sensi 2 produksi telur 160 butir per tahun. Untuk bio teknologi kita menghasilkan 17 galur, 5 teknologi dan 4 varietas kita alokasikan 6,2 miliar untuk varietas padi gogo tahan blas dan toleran alumunium varietas WBC, varietas jeruk siam, keprok berbuah sepanjang tahun. dan varietas rumput gajah tahan kering, galur padi, kedelai, cabai, rumput gajah.

Lanjut, kita akan menghasilkan beberapa teknologi inovatif yang modern, 12 teknologi, perkebunan 22 teknologi, peningkatan efisiensi biaya produksi tanaman hortikultura 13 teknologi, vaksin pencegah penyakit kurang lebih 19 teknologi, teknologi peternakan 12 teknologi, teknologi spesifik lokasi di 33 provinsi 105 teknologi, peta status hara, tanah dan persedian lahan, teknologi sumber daya lahan pertanian 18 teknologi, teknologi pemulihan sumber daya pertanian 2 teknologi, teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, teknologi mekanisasi mendukung pertanian kurang lebih 8 teknologi, dan teknologi pasca panen 17 teknologi.

Lanjut, kita juga tetap melanjutkan terkait dengan agro technopart dan taman pertanian di beberapa provinsi yang sudah berjalan mulai dari 2018

dan 2019. Lanjut, ini hilirisasi inovasi lahan pertanian, pemberdayaan laboratoriu kurang lebih 13,5 miliar, gelar teknologi dan inovasi pekan raya 9 miliar, penguatan sumber daya peneliti 35 miliar, desiminasi inovasi 85 miliar, pengembangan hasil inovasi ternak unggas, ayam kobe 1, 2, dan 3 45 miliar. Pengembangan model pertanian terpadu berkelanjutan berbasis korporasi serta inovasi pertanian lokasi 45 miliar dan dukungan inovasi teknologi pertanian modern 138 miliar.

Lanjut, ini beberapa pendampingan program Kementerian Pertanian mulai dari pendampingan teknis pemetaan lahan, penyediaan benih bibit sumber unggul, pendampingan UMKM, bimbingan teknis petani, demonstrasi teknologi dan penyebaran informasi pertanian.

Lanjut, itu mungkin Pimpinan yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Lanjut, Kepala Badan Karantina Pertanian.

KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D.):

Baik, terima kasih Bapak Sekjen.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan dan semua Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Ijinkan kami menyampaikan sedikit terkait dengan program kerja kita di Badan Karantina Pertanian. Ijin langsung masuk slide 2 Pak, program kita di Badan Karantina Pertanian ada peningkatan layanan perkarantinaan dan akselerasi ekspor. Anggaran di Badan Karantina Pertanian tahun 2020 ini Bapak dan Ibu semua yang kami hormati, itu sekitar 1,025 triliun dan itu termasuk tadi di atasnya di dalam tabel itu kita lihat bahwa komponen belanja pegawai atau belanja barang sekitar 51,55% yang lainnya mendukung program tadi untuk layanan perkarantinaan maupun akselerasi ekspor.

Terus, berikutnya ini mohon maaf kecil karena table Bapak dan Ibu semua. Jadi itu mulai dari kegiatan kebijakan pengawasan dan penindakan perkarantinaan ada dua kebijakan. Seterusnya terkait dengan kebijakan kerja sama intenasional, kebijakan sistem informasi perkarantinaan, kebijakan teknis karantina hewan dan keamanan hayati hewani, kebijakan teknis karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati. Seterusnya sampai disitu

ada metode uji terap, metode uji laboratorium, karantina, desiminasi karantina pertanian, dan termasuk sertifikasi karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati. Jadi seluruh UPT kita, 50 UPT kita di daerah itu melakukan tugas yang point ini adalah sertifikasi semua madya pembawa yang keluar masuk dari daerah kita.

Seterusnya standart kualitas pelayanan perkarantinaan sampai penambahan prasarana wilayah kerja daerah, sentra produksi, sarana PLBN, pos lintas batas negara dan terakhir adalah prasarana infrastruktur PLBN. Seterusnya, fokus kegiatan di Badan Karantina Pertanian kita Pak, 2020 Bapak dan Ibu semua, itu ada 5, yang pertama itu adalah sesungguhnya penguatan tindakan karantina. Yang kedua, itu pengembangan SDM Badan Karantina Pertanian, ketiga perbatasan itu terkait dengan perbatasan wilayah negara dan juga di wilayah-wilayah yang lain.

Kemudian pengawasan dan penindakan itu di point 4, dan yang terakhir itu adalah bagaimana connecting daripada data kita yang ada di karantina yang dikelola di data akifes namanya itu, itu dengan satu data di Kementerian Pertanian yang di AWR Kementerian Pertanian.

Seterusnya ini penguatan tindakan karantina seperti ini kegiatannya Bapak dan Ibu semua yang kami hormati. Itu mulai dari inline traction ada juga pengutan laboratorium. Kemudian pemulihan sarana dan prasarana khususnya di daerah-daerah terluar kita atau di IKH juga, kantor pelayanan termasuk pemantauan daerah sebar HPH KUPTK dan termasuk sekarang pengembangan sertifikasi penggunaan tidak hanya lagi print out certificate tetapi juga elektronik certificate daripada dokumen SPS kita Bapak dan Ibu semua. Termasuk yang terakhir adalah implementasi aplikasi IMS Indonesia mave agriculture komoditas ekspor. Jadi kita membuat peta di seluruh provinsi terkait dengan komoditas-komoditas ekspor kita yang berasal dari daerah tersebut.

Seterusnya ini kegiatan kedua pengembangan SDM Badan Karantina Pertanian, kami tentu melihat potensi kita atau kondisi eksisting kita di Karantina Pertanian kami masih melihat perlu peningkatan pendidikan S2 dan termasuk magang terkait dengan pengolahan atau pengendalian HPHK atay UPTK kita yang masuk atau yang keluar dari negara kita. termasuk uji kompetensi fasilitasi penilaian angka kredit untuk mereka tentunya karena kita banyak fungsional kita di Badan Karantina Pertanian, Diklat PPNS, Polsus, inteligen Barantan terutama terkait dengan Kawasdakan, penyelenggaraan penguatan SDM, terus kemudian Diklat teknis dan in house training, tentunya begitu.

Seterusnya penguatan karantina di perbatasan. Nah, untuk PLBN Bapak dan Ibu semua yang kami hormati, Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat. Ini ada penguatan perbatasan PLBN. Inia da 11 pos lintas batas negara ini ada 11 Bapak dan Ibu semua. Yang kita kawal Bapak dan Ibu semua, saya pikir banyak yang sudah melihat bahwa kekuatan kita di pos-pos lintas batas ini masih sangat minim Bapak dan Ibu semua. Jadi kami ingin ini kita perhatikan untuk dukungan Sarpras terutama dan termasuk penempatan

personil yang untuk di pos-pos lintas batas negara ini. Pengembangan bandara termasuk disitu antara lain Kartajati dan juga yang di Sentani Jaya Pura dan DIY.

Seterusnya Bapak dan Ibu semua, penguatan pengawasan dan penindakan. Ini tentunya banyak kerja sama kita dengan instansi di luar kita, termasuk dengan Kepolisian, TNI dan lain-lain, Bea Cukai, Imigrasi dan lain sebagainya. Ini terkait dengan peningkatan SDM untuk inteligensi, PPNS dan Polsus. Penegakan hukum tentunya kita beberapa kasus-kasus itu sampai juga kepersidangan Bapak dan Ibu semua, kita kawal untuk dokumen P21.

Seterusnya kegiatannya kita lakukan tentunya itu yang mendukung akselerasi ekspor kita buat namanya sekarang Bapak dan Ibu semua Gratis (Gerakan Ekspor Tiga Kali Lipat) harapan kita selama 4 atau 5 tahun kedepan ekspor kita itu mudah-mudahan bisa 3 kali dari yang sekarang. Sekarang ini masih di sekitar 400 triliun mudah-mudahan bisa 3 kali lipat di akhir nanti 2024 atau 5 tahun terakhir.

KETUA RAPAT:

Saudara Kepala Badan Karantina, ini ada hal yang paling menarik sekali. Sebetulnya tugas anda itu bukan meningkatkan ekspor.

KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D.):

Siap Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Tapi tugasnya mencegah.

KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D.):

Siap Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Bukan tugasnya meningkatkan 3 kali ekspor, sudahlah tidak usah. Jangan pakai-pakai upacara-upacara ini, contohnya seperti di Lampung yang tidak ada karantina juga tetap ekspor kok.

KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D.):

Baik, Bapak Ketua. Kami....

KETUA RAPAT:

Termasuk yang Gorontalo juga, jadi kalau peningkatkan 3 kali ekspor itu bukan tugasnya Badan Karantina. Tugas Karantina itu tugasnya adalah memantau, mencegah, termasuk barang yang masuk ke Indonesia. Kemarin

disini ada Dirjen PKH seolah-olah kasus babi itu karantina kurang terlit, iniloh yang terjadi. Jadi kalau peningkatan ekspor bukan begitu, tidak ada urusan sama karantina. Ini saya ingatkan lagi loh, jangan membuat menterinya terbuai dengan 3 kali peningkatkan ekspor apa. kecuali barang yang baru diproduksi diekspor itu baru namanya peningkatan. Kalau yang sudah ada ya bukan peningkatan.

Saya hanya mengingatkan saja, karena peningkatan produksi itu bukan tugasnya Karantina. Yang penting itu menjaga di pintu-pintu masuk, baik pelabuhan domestic yang berbatasan dengan negara luar ataupun apa. Dan yang paling penting adalah pencegahan termasuk bahan tumbuhan yang kita lindungi. Karena jenis dan ragam kita ini puluhan ribu mungkin ratusan ribu, tiba-tiba bisa lolos. Kemarin contohnya, bulan September saya ke Fiji ada Anggota dari Fraksi lain membawa sebuah apel, langsung disita hanya sebuah apel terbawa karena di pesawat tidak kemakan dibawalah, begitu masuk langsung. Jawaban mereka apa, "saya tidak mau, karena ini bisa saja sumber pembawa penyakit". Ini yang penting, jadi kalau peningkatan bukan tugasnya Badan Karantina. Tapi kalau percepatan, saya tegaskan lagi percepatan untuk pengawasan dan lain-lain saya setuju.

Lanjutkan.

KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D.):

Terima kasih Pak Ketua sarannya.

Baik Pak, jadi ijin kami klarifikasi sedikit Pak, dalam point tadi itu peningkatan sesungguhnya adalah kita mengkoordinasikan saja Pak. Jadi artinya, program ini memang bagaimana program yang di Direktorat Jenderal teknis yang baru sekarang dengan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di Direktorat Jenderal teknis kita dan itulah kita hitung untuk bagaimana nanti pencapaiannya 3 kali lipat. Sesungguhnya itu Pak, yang dikerjakan Karantina. Ya memang kami paham tugas utama disana itu adalah mencegah masuk dan keluarnya dan tersebarnya HPHK maupun UPTK ke wilayah kita Pak.

Kami lanjutkan Bapak dan Ibu semua, untuk ini tadi saya pikir itu sudah cukup dari Badan Karantina Pertanian. Sehingga di dalam program kita sesungguhnya tadi Pak, untuk yang mengenai ekspor kami paham untuk apa yang dilakukan selama ini yang kalau sudah itu ada komoditasnya tentunya sebenarnya mohon maaf Pak Ketua, ini juga termasuk advokasi publik kita Pak, bahwa Pimpinan-pimpinan Daerah kadang-kadang itu mohon maaf belum terinfo dengan baik komoditas apa saja yang bisa diekspor dari daerahnya. Jadi kami bantu itu, ada Bimtek kita lakukan di karantina untuk calon-calon eksportir atau petani-petani milenial untuk eksportir-eksportir kedepan. Jadi itu sebagian kami lakukan tugas itu, karena kita di seluruh UPT tangan itu barangkali bisa membantu Pak, yang selama ini kita lakukan di lapangan.

Mungkin itu yang bisa kami jelaskan dari Badan Karantina.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Saya tanya kalau di Tanjung Priuk itu ada peralatan saja Karantina yang punya.

KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D.):

Kalau peralatan mohon maaf Pak Ketua, memang itulah kami ya masih sangat terbatas, laboratorium paling yang ada, peralatan laboratorium. Kalau di luar extray mohon maaf Pak Ketua, memang Bapak dan Ibu semua para Anggota, extray kita saja itu hanya satu Pak, di Badan Karantina Pertanian. Kami ingin memang itu mudah-mudahan kedepan bisa Bapak Sekjen, itu dibantu dan sampai seperti itu Bapak Ketua atau Bapak dan Ibu semua, saat ini dan tahun ini kita punya staf dari Karantina yang sekolah mengambil S2 dan S3 ada 30 orang, 22 orang di antaranya S2 dan 8 S3. Kami sudah punya surat pernyataan antara saya dengan mereka, untuk nanti melakukan penelitian terkait bio sensor Pak Ketua. Maksudnya ini adalah untuk bagaimana ini mendeteksi hama penyakit ataupun hama penyakir hewan karantina ataupun UPTK kami menyebutkan apa saja terserah yang penting target daripada seluruh komoditas mau dia pembawa kita. Jadi sampai seperti itu kami lakukan Pak, di Badan Karantina Pertanian, karena memang peralatan kita belum ada Pak Ketua. Mohon ya mungkin itulah kondisi kita di Karantina Pak.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, seharusnya kenapa tidak peralatan dulu dilengkapi. Sekarang orang jangan S3, sekolah sampai S7 kalau peralatannya tidak ada tidak mungkin bisa, itu saja kita harus jujur.

Saya tanya lagi, berapa banyak tenaga honorer di Barantan. Masih banyak sekali ribuan, coba Bapak Sekjen jadi perhatian ini, ada yang 10 tahun, ada 13 tahun, ya honorer saja kerjanya. Bagaimana mereka mau meningkatkan, manusia tidak akan meningkat kalau tidak dihargai hasil jerih payah kerjanya. Mau sekolah sampai S7 peralatannya tidak ada bos. Pelabuhan Bakauheni lihat, maka saya bilang teman-teman Karantina ini lebih hebat dari dukun, dari paranormal lebih hebat. Ssst lewat "wah di bus itu adad aging celeng atau daging babi hutan", bisa mencium karena ilmu paranormalnya jago banget, jadi tidak perlu pakai peralatan. Yang dipikirkan itu bukan pendidikannya dulu Pak, peralatannya disiapkan sambil yang mengelolanya juga disiapkan. Sekarang sudah disiapkan ada S2, S3 alatnya tidak ada ya sama juga bohong.

Yang saya prihatin coba lihat di Bandara Soekarno Hatta, apa banyak yang ditangkap? Tidak ada, paling yang ditangkap sedikit, lolos. Karena apa? mohon maaf, bisa ngelompok cuma dibelakang Bea Cukai. *Insyah Allah* kalau

ketahuan kalau tidak ketahuan ya lolos. Kenapa tidak siapkan dulu perangkatnya yang penting. Dari jaman Ibu Banon pun saya sudah ngomong siapkan perangkatnya dulu sambil menyiapkan sumber daya manusianya. Itu tolong Bapak Sekjen diingatkan itu termasuk tenaga honorer yang sudah sekian puluh tahun itu, kasihan. Jangan penyuluh-penyuluh tapi yang honorer di karantina dan lain-lain tidak diperhatikan, harus berimbang juga itu.

Selanjutnya siapa lagi?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Baik, yang terakhir saya minta Bapak Inspektur Jenderal untuk menyampaikan.

INSPEKTUR JENDERAL (JUSTAN RIDUAN SIAHAAN, AK., M.Acc., CA., QIA):

Mohon ijin Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Lanjut saja ke program tahun 2020, Itjen memang menjadi kita fungsikan sebagai mitra andalan.

KETUA RAPAT:

Bapak Irjen tolong saya mau tahu selama 2019 ada temuan apa, supaya teman-teman tahu. Jadi kalau nanti Bapak tidak menyajikan saya yang kasih tahu ke Bapak nanti.

INSPEKTUR JENDERAL (JUSTAN RIDUAN SIAHAAN, AK., M.Acc., CA., QIA):

Baik Bapak Ketua, yang pasti kita menemukan benih, ada masalah benih jagung, bawang putih. Memang kami tidak buat disini Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya minta penjelasan dulu 2019. Jadi fungsi pengawasan itu paling penting bukan fungsi anggaran kalau saya, fungsi pengawasan. Seberapa banyak temuannya, tadi mengatakan benih jagung, benih bawang putih. Jadi kalau bukan data nanti saya kasih data Bapak. Tolong dijelaskan dulu secara singkat walaupun tayangannya.

Jadi Bapak Sekjen, nanti pada waktu mau Rapat Kerja yang saya minta adalah 2019 apa yang terjadi. Kemudian tahun 2020 ini anggarannya. Jadi kalau seperti kemarin yang saya katakan kalau ini gagal ngapain dilanjutkan. Nah, tugas Bapak Irjen mencari kenapa bisa salah ini, apakah sengaja atau memang disengaja. Tolong dijelaskan dulu yang 2019 apa saja temuannya.

INSPEKTUR JENDERAL (JUSTAN RIDUAN SIAHAAN, AK., M.Acc., CA., QIA):

Secara tertulis tidak ada di sini Pak Ketua, nanti kami akan jelaskan. Kami kasih tertulis nanti, kami tidak siap untuk sekarang.

KETUA RAPAT:

Termasuk capaiannya juga tidak ada 2019?

INSPEKTUR JENDERAL (JUSTAN RIDUAN SIAHAAN, AK., M.Acc., CA., QIA):

Ada Pak, cuma bukan dalam bentuk temuan. Kalau gitu balik ke semula, kami membuat target temuan kami itu *out put* kami itu adalah rekomendasi Pak Ketua. Jadi perbaikan-perbaikan akuntabilitas, misalnya di pengawasan hortikultura itu ada targetnya itu 349 rekomendasi dan kita mencapai 368. Ada di sini hal serupa terjadi di Sekjen, Ditjen Hortikultura, dan PPSDMP. Kita targetkan 144 dan kita dapat 147.

Untuk pengawasan SPP kami juga membagi fungsi kami selain kami melakukan pengawasan, kita juga membangun sistem pengendalian intern di unit teknis termasuk di Setjen, Kepala dan Badan. Nah, kita menargetkan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internnya 144 dan tercapai 193. Kami juga melakukan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas masing-masing eselon I, rekomendasinya pun kita....

KETUA RAPAT:

Pak Irjen, gini singkatnya pertanyaan saya saja ya, di 2019 berapa eselon I ditemukan terjadi tanda kutib kesalahan atau penyimpangan atau ketidak beresan administrasi. Coba ada berapa eselon I.

INSPEKTUR JENDERAL (JUSTAN RIDUAN SIAHAAN, AK., M.Acc., CA., QIA):

Kalau melihat data ini semua eselon I ada.

KETUA RAPAT:

Semua eselon I teman-teman Anggota ada masalah. Maka saya tanyakan tadi ini kekurangannya, kelemahannya, ini anggaran 2020, ini untuk perbaikan. Kalau saya sebagai Pimpinan lebih baik saya lakukan fungsi pengawasan, karena apa? Karena kalau pengawasan ada temuan inikan bisa diperbaiki. Betul kan?

INSPEKTUR JENDERAL (JUSTAN RIDUAN SIAHAAN, AK., M.Acc., CA., QIA):

Iya betul.

KETUA RAPAT:

Tugas anda itukan?

INSPEKTUR JENDERAL (JUSTAN RIDUAN SIAHAAN, AK., M.Acc., CA., QIA):

Betul.

KETUA RAPAT:

Mesti jujur dong, tadi anda sangat jujur sekali mengatakan hampir semua eselon I ada temuan, ya betul. Kalau anda bilang tidak tadi nanti datanya saya kasih.

INSPEKTUR JENDERAL (JUSTAN RIDUAN SIAHAAN, AK., M.Acc., CA., QIA):

Dan mereka sudah banyak tindaklanjuti juga Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas kejujurannya.

Lanjutkan.

INSPEKTUR JENDERAL (JUSTAN RIDUAN SIAHAAN, AK., M.Acc., CA., QIA):

Baik, jadi ini saya lanjut saja, ada semuanya Pak Ketua. Nah, untuk tahun 2020 misi kami hampir sama ini bagaimanapun kita ingin menjadi andalan kawan-kawan dari eselon I untuk menjaga akuntabilitasnya.

Jadi misi itu menjalankan bahwa semua program ini dilandasi oleh media akuntabilitas yang baik, sehingga siapa pun yang akan datang memeriksa, menanya, termasuk mendukung BPK, kawan-kawan siap menjawabnya. Untuk mendapatkan atau mencapai misi ini memang kami membangun sistem pengendalian intern ini kami meningkatkan kapabilitas pengawasan intern.

Di tahun 2019 untuk peningkatan kapabilitas pengawasan intern, kami mencoba menggunakan anggaran yang sedikit itu dengan membangun kami menyebutnya *go wash*. Jadi langkah-langkah pengawasan kita elektronika di tahun 2020 ini kita tingkatkan dengan karena sudah ditambah anggaran Bapak Ketua, menambah note book sekitar 65 dan membangun sistem pengawasan *secra* elektronik 3 aplikasi. Itu kira-kira.

Lanjut, itu arah kita memang fungsi kita, fungsi assurance memastikan program itu berjalan sesuai dengan tujuan, dengan *output* dan *outcome*-nya dan tentu kalau ada perbaikan kita minta mereka perbaiki sebelum BPK

datang memeriksanya. Kami masih berterima kasih kawan-kawan di unit teknis mengiyakan, menindaklanjuti banyak rekomendasi kami sehingga BPK memberikan opini WTP 3 tahun berturut-turut. Kami berterima kasih kepada mereka dan juga dukungan dari Bapak-bapak yang terhormat, Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Lanjut, nah ini tadi yang kami bagaimana pun kami harus membangun kapasitas kawan-kawan di Itjen untuk membangun, untuk bisa mencapai misi kedua maksud saya. Kedua level ini kita harapkan bisa memastikan bahwa program yang telah disetujui oleh Komisi IV DPR RI bisa dijamin akuntabilitasnya. Memang banyak kelemahan-kelemahan dan kelemahan itu sekali lagi ditindaklanjuti oleh kawan-kawan dari unit teknis.

Lanjut, ini hal serupa ini Bapak Ketua. Ini assurance kita memang lakukan dengan fungsi audit, fungsi evaluasi, review dan pemantauan dan lain-lainnya. Sedangkan fungsi consulting itu tadi kita lakukan dengan mengembangkan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern ibarat kami mendelegasikan fungsi pengawasan ke unit teknis karena tenaga kami yang hanya 150 orang auditor itu memang tidak cukup sehingga bagaimana pun SPP ini menjadi alat bagi kami untuk memampukan fungsi pengawasan Itjen.

Lanjut, tahun 2020 anggaran kami memang dinaikkan. Terima kasih Komisi IV DPR RI dan anggaran ini kami alokasikan terutama untuk pengadaan note book, printer, scanner dan pengembangan aplikasinya. Memang kalau kita laksanakan secara penuh masih tidak terlalu pas karena penggunaan atau metode pencatatan yang dilakukan oleh unit-unit teknis baru tahun ini dikembangkan menjadi metode digital, sehingga kalau itu digital auditnya pun digital. Dan sekali lagi Bapak Ketua dan Bapak, Ibu Anggota yang terhormat. Kami menyesuaikan diri selalu dengan kalau di sini nanti ada perubahan kami sesuaikan lagi program dan kegiatan kami untuk melakukan pengawasan itu.

Kami memang anggaran paling kecil sehingga kadang-kadang kalau realisasi anggaran kami paling rendah diketawain juga Pak Ketua. Paling tinggi maksud saya, hari ini realisasi anggaran kita tetap paling tinggi 8,22 tetap diketawain karena anggarannya cuma 105.

Saya kira itu dari kami Bapak Ketua, mohon arahan untuk tugas kami di pengawasan Itjen Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi Bapak Momon saya minta untuk Inspektorat yang akan datang minimal ditambah 50% anggarannya. Bagaimana mengawasi uang 22 triliun lebih yang mengawasi cuma ongkosnya 105 miliar. Ya, wajar kalau di daerah-daerah ada DAK, ada lain-lain temuan tidak pernah ada itu. Karena mungkin 2 sudah habis ongkosnya. Tolong bantu anggaran Inspektorat Jenderal agar bekerjanya lebih efektif. Di KPP juga sama, di Kehutanan juga sama, seolah-olah di buat Inspektorat jangan banyak tahu dengan ongkosnya kecil.

Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 257 Peraturan Tata Tertib DPR RI bahwa setiap Anggota diberi waktu untuk bicara 3 menit dan apabila belum cukup setelah selesai semua boleh mengajukan pertanyaan pendalaman. Kalau ada yang mau 2 jam ya silakan saya kasih waktunya 2 jam. Tapi kalau yang 3 menit sesuai Tata Tertib kita sepekat ini Tata Tertib bukan Ketua Komisi IV DPR RI yang buat.

Yang pertama....

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Ketua, interupsi sebentar Ketua.

Tadi Bapak Ketua sudah singgung soal Tata Tertib. Saya kira Tata Tertib itu harus disepakati, kalau tidak disepakati waktu yang kita gunakan saya kira tidak cukup. Untuk itu, sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ketua, dalam kegiatan-kegiatan penyampaian materi dari Dinas terkait saya harapkan agar diselesaikan dulu.

KETUA RAPAT:

Dari Dirjen Pak, bukan Dinas Pak.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Ya Dirjen, *sorry* ini karena 10 tahun dan kita orang baru. Karena orang baru kayaknya ada yang aneh karena saya terus terang juga saya ini dari awal juga. Untuk itu, saya mau ingatkan juga karena sudah pada Tata Tertib, kalau ada kegiatan-kegiatan terkait dengan penyampaian kita semua dengar dulu. Kadangkala Pimpinan menggunakan hak juga sebagai Anggota, dan lewat juga dari 3 menit. Untuk itu, kita sepakati bahwa sesuai dengan Tata Tertib Pimpinan juga harus memiliki waktu yang sudah ada pada Tata Tertib dan aturan ada pada Tata Tertib.

Saya kira itu saja, selanjutnya seperti apa nanti kalau dapat saya usulkan Pak Ketua, agar kita ada pertemuan internal.

KETUA RAPAT:

Saya rasa tidak perlu lagi Pak, Tata Tertibnya sudah jelas. Jadi kalau Bapak nanti minta saya bertanya, saya pindah kesana, saya pindah sekarang.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Bukan itu Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Enggak, supaya ini jelas. Dari kemarin Bapak mengatakan mengenai Tata Tertib begini. Kalau saya disini sendirian saat ini, saya mengajukan pertanyaan, saya pindah kesana.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Ketua, saya bukan soal itu, Ketua jangan emosi.

KETUA RAPAT:

Saya tidak emosi, ini yang saya tanyakan tadi adalah pendalaman.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Ini hak kita semua Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya tahu haknya sama.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Saya selesai dulu Ketua, Ketua harus berikan hak untuk saya juga.

KETUA RAPAT:

Sama.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Jadi kalau begini kan tidak bagus, seorang Pimpinan harus menerima.

KETUA RAPAT:

Saya paham Pak, saya bukan tidak paham. Jadi kalau saya disini sekarang ini saya sendiri ini, saya mau bertanya saya harus pindah.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Bukan soal itunya Ketua, kadangkala ada juga kan ada 4 Pimpinan.

F-NASDEM (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Interupsi Ketua.

Boleh Ketua?

KETUA RAPAT:

Ya, boleh dong masa tidak boleh.

F-NASDEM (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Ya, iijinkan dulu dong Ketua.

KETUA RAPAT:

Ijin.

F-NASDEM (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Ketua, yang kami lihat dari persidangan tadi kelihatan sekali Ketua juga sudah banyak pertanyaan-pertanyaan di tengah-tengah apa yang disampaikan oleh para Dirjen. Kalau aturan main kita ini memang kita tegakkan, Ketua adalah pengatur dari sidang ini sendiri. Sebagai catatan bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua tadi itu sudah banyak berapa pertanyaan-pertanyaan. Menurut kami apalagi juga beberapa hal-hal yang kemarin Bapak sampaikan, Bapak sampaikan lagi redanden Ketua.

Jadi saran saya supaya semakin berkualitas menurut saya diatur sebaik mungkin Ketua.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-NASDEM (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Cukup Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Yang pertama Mbak Riezky.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Selamat siang kepada Bapak Sekjen dan Bapak Dirjen.

Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, mungkin tepatnya pencerahan. Pertama, kepada Dirjen Tanaman Pangan tadi sasaran bantuan fokus saya mungkin Sumatera Selatan. Berhubung ada rekan saya jadi butuh *clear* Pak, Pak Fauzi Amro ini juga sama saya masalahnya. Sumatera Selatan ini ada alokasi 1000 hektar untuk padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya. Apabila dimungkinkan tanaman lainnya itu komponen bantuannya itu apa ya, karena kan terkadang kita mesti menyesuaikan juga dengan kondisi alam disitu. Jangan sampai nanti tidak berkesesuaian, saya mohon pencerahannya disitu.

Kemudian kepada Barantan, tadi sepintas saya mendengarkan penjelasan dari Bapak terkait ekspor dan impor. Apakah dalam kegiatan ekspor dan impor misalkan terkait produk pangan segar itu bisa dijadikan data acuan selain data produk atau stok nasional dalam pengambilan kebijakan yang cepat apabila terjadi gejolak harga. Kita kan sama-sama tahu terkadang kan fluktuatif terkait ini juga apakah ada efek dari masukan, saran dari Badan Karantina, karena kan saya butuh informasi ini juga. Kemudian apakah juga Karantina mencatat data ekspor dan impor sebagai salah satu *output* dari kinerja Karantina. Saya mohon penjelasannya Pak.

Kemudian catatan saya juga terhadap Dirjen Bun, saya sama Bapak Fauzi Amro ini tahu persis bahwa tanaman karet itu di petani itu 40% sudah tua dan rusak, mungkin lebih ya sekarang. Apabila kebun rakyat itu kurang lebih karet rakyat itu misalkan 3 juta dan apabila peremajaan 8 hektar targetnya berapa lama ya Pak, saya butuh tahu itu. Dan kemudian apa mungkin ada pola integrasi ternak atau kebun dan tanaman pangan dan palawija karena kan ada proses kayak sekarang karet harganya lagi tapi dikit. Dan menghasilkan dan membantu supaya pada saat lagi jatuh inikan naik turun karena hasil reses kemarin begitu mereka tahu harga karet begini semua pengen lari ke sawit, kita kan tidak bisa kayak begitu juga.

Kemudian saya minta penjelasannya, kemudian kepada Kepala Litbang. Tadi saya mendengar juga terkait perbanyak benih dan anggaran okelah tinggi. Tapi saya butuh job desk yang jelas Pak, maksud saya inikan anak baru di kompleks ini, maksudnya apakah Dirjen Litbang ini penelitian dan pengembangan logika saya itu melakukan bagaimana memunculkan bibit yang baik, bagus bahkan. Karena kalau perbanyak benih itu teknis ya menurut saya apakah itu lebih ke Dirjen Tanaman Pangan atau bagaimana. Tolong penjelasannya juga.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Bapak Suhardi Duka.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Serta para Dirjen dan Sekjen.

Saya pertama adalah kita ingin menyusun anggaran ini untuk kepentingan tentunya kepentingan petani, kepentingan masyarakat, dalam rangka upaya kita untuk melakukan kemandirian dan swasembada beberapa komoditas yang memungkinkan untuk kita hasilkan di Indonesia.

Menanggapi beberapa hal yang pertama Litbang 1,8 triliun. Saya kira namana Litbang adalah melakukan penelitian untuk menghasilkan inovasi, baik itu teknologi, bibit dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebaiknya diarahkan anggarannya untuk penelitian bukan kepada hal-hal yang lain. Dari komposisi anggaran untuk penelitian hanya 193 miliar. Desiminasi justru lebih banyak 539 miliar, ini tidak berimbang. Demikian juga pengadaan infrastruktur *war room* saya melihat mandi anggaran ini *war room*. Semua Sekjen, semua Dirjen, semua menganggarkan dan bahkan menjadi prioritas untuk *war room* ini, manfaatnya juga belum kita bisa menerima atau mendapatkan penjelasan yang lebih logis.

Yang kedua, untuk tanaman pangan. Saya apresiasi karena anggaran 86% diarahkan untuk bantuan Pemerintah kurang lebih 4,8 triliun. Saya sepakat bagaimana kita tidak impor beras, tadi sudah sepakat kita. saya ingin perlu mendorong untuk komoditas ekspor lainnya. Mungkin beras kita tidak bisa ekspor, tapi mungkin ada komoditas-komoditas yang lagi memungkinkan untuk kita bisa ekspor untuk bisa mengimbangi impor komoditas yang katakanlah bawang putih dan lain sebagainya. Seperti halnya porang, saya kira ini agar diperluas cakupannya sehingga porang ini tidak hanya berada di Jawa.

Saya ingin sampaikan kepada Dirjen Tanaman Pangan bahwa untuk Sulawesi Barat Dapil saya, ada beberapa komoditas disana yang menjadi andalannya padi itu Poliwali Mandar dan Kabupaten Mamuju. Luas arealnya untuk formal 18 ribu hektar lebih, Mamuju 16 ribu hektar lebih. Untuk jagung 2 kabupaten, Mamuju dan Mamaju Tengah.

Dirjen Perkebunan 1,5 triliun belanja bantuan 1,3 triliun, ini yang lebih saya apresiasi karena 91% belanjanya adalah untuk bantuan Pemerintah dalam rangka meningkatkan produktifitas dan perluasan tanaman perkebunan. Khusus untuk Kakao kemarin kita melakukan gerakan nasional, disebut dengan Gernas. Mungkin kita sepakat gagal ini program itu akibat karena kita menggunakan bibit terpusat yang belum dicoba dengan baik, yang belum dilakukan penelitian dengan baik, yaitu dengan somatif embrio atau SE. Ini tidak familiar dengan kondisi-kondisi lokal Indonesia, pada sentra-sentra Kakao pada khususnya

Oleh karena itu, saya lebih untuk membuat sentra-sentra pembibitan kakao di wilayah-wilayah yang memang sentra kakao, katakanlah Sulawesi Barat. Kakao di Sulbar ini ada beberapa kabupaten, Mamuju dan Poliwali Mandar. Untuk Kopi, Mamas ada Mamuju, Polman. Sedangkan untuk kelapa, Majene, Polman, Mamuju dan Pasang Kayu. Terima kasih Bapak Dirjen Perkebunan sudah banyak mengapresiasi untuk bantuan Pemerintah.

Khusus untuk Irlen, kecil anggarannya memang atau memang disengaja untuk diperkecil supaya tidak bisa memeriksa. Ini juga bisa terjadi seperti itu dibuat kecil supaya tidak bisa bergerak, tidak bisa memeriksa anggaran-anggaran yang lain. Begitulah kira-kira hanya memang kita aparat utamanya pejabat belum terlalu baik akhlaqnya, banyak yang pintar akan tetapi kurang yang baik, sehingga itu masih perlu diawasi dengan baik. Saya

juga support supaya anggaran di Irjen ini perlu ditingkatkan untuk lebih memperluas cakupan pengawasan. Apakah rekomendasi yang ditindaklanjuti itu yang Bapak tadi katakan sudah ditindaklanjuti semua, apakah ada yang terpaksa Bapak lanjutkan ke penegak hukum selama hasil pemeriksaan tahun kemarin. Itu pertanyaan saya Pak. Itu pertanyaan saya Pak.

Kesimpulan saya yang pertama, memindah anggaran dari porsi bantuan Pemerintah ke kegiatan lain saya kurang setuju. Termasuk Kostra Tani, war room saya minta untuk dipikirkan baik-baik. Demikian juga penggunaan istilah militer di era sipil saya pikir perlu kajian lebih mendalam jangan sampai istilah-istilah itu lebih menjauhkan petani karena petani ini biasa takut sama loreng. Jadi kalau istilah itu cari lebih familiar dengan petani supaya petaninya bisa kita ajak membangun, bekerja sama dalam rangka peningkatan produksi.

Saya kira itu sudah cukup 3 menit.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Suhardi Duka.

Selanjutnya Kanjeng silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Nanti kalau 3 menit tolong distop ya Pak.

KETUA RAPAT:

Nanti besok saya beliin timer Pak Kanjeng.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Pak Ketua, teman-teman, Bapak Dirjen khususnya Dirjen Perkebunan.

Pertama, anggaran Bapak untuk kegiatan tanaman perkebunan itu 700 miliar, tapi tembakau tidak ada. Sedangkan tembakau ini menghasilkan cukai tembakau di Indonesia 1 tahun 150 triliun. Ini tolong dan Pansus Tembakau menginginkan impor bahan baku tembakau hanya 10%, 9% dari dalam negeri. Jadi kalau Bapak tidak mengembangkan bagaimana nanti ini. Ini tolong ya Pak, jadi perhatian jangan kontradiksi, di Pansus kita bertahan mengembangkan tembakau dalam negeri, tapi Dirjen Bun kelupaan.

Yang kedua, soal kebakaran. Tahun ini nampaknya menurut penelitian perhitungan kebakaran itu akan besar, 70% itu diluar kawasan hutan artinya di tanaman masyarakat dan perkebunan. Saya belum tahu itu di Pak Sekjen,

itu eselonnya berapa, kalau di Kehutanan eselon II yang menangani. Jangan sampai terjadi Polisi, Tentara memadamkan kita malah yang punya tanggungjawab tidak ada. Ini tolong saya ingatkan agar eselonnya itu segera ditingkatkan yang dulu waktu pertama eselon IV sekarang III mudah-mudahan sudah II. Karena 70% itu kejadian kebakaran diluar kawasan hutan, ini hasil penelitian.

Yang ketiga, ini Litbang Pak. Saya kaget anggaran penelitian kok hanya 10% kok banyakan pengadaan-pengadaan yang tugasnya Dirjen. Jadi tolong ini jadi perhatian di Litbang. Dan Litbang ini saya tahu di Kementerian Pertanian ada Doktor kurang lebih 300 orang, kemanakan orang ini. Peneliti-peneliti hampir lebih dari 200, dan saya sarankan kepada Ketua judul penelitian kalau boleh dikirim kepada kita, hingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Judul-judul penelitian yang tahun ini apa saja, karena kemarin diprotes oleh Ibu Endang ini tidak hadir penelitian tidak dilanjutkan karena mungkin antara Dirjen dan Litbang itu tidak sejalan. Saya tahu di Kehutanan juga seperti itu, sepertinya Litbang itu penelitiannya itu proyek Pak, itu-itu saja yang diteliti karena proyek perorangan yang dilakukan. Ini mudah-mudahan di Litbang tidak seperti itu.

Selanjutnya KUR ini Pak Dirjen, yang luar biasa tolong hati-hati. Jaminannya KUR itu apa, saya pernah duduk disitu, Dirjen yang keenam masih jadi dipanggil oleh penegak hukum Pak. Bolak-balik itu dipanggil pertanggungjawaban seorang Dirjen adanya KUR, itu tahun 1995. Selesaiannya urusannya sampai tahun 2008 baru selesai. Jangan sampai Bapak nanti pensiun dipanggilin itu, kalau dipanggilin susah Pak. Jadi saya minta KUR ini betul-betul tadi disampaikan oleh Ketua, apa prosesnya, apa jaminannya. Jangan sampai Bapak menyalurkan KUR tapi uangnya tidak jelas.

Yang terakhir ini karantina ini, tolong karantina ini karena di Undang-Undang Karantina itu mau Menteri Pertanian dalam bentuk badan yang bersama antara Kehutana dan Kelautan. Jalan keluarnya itu ada kordinasi MoU antara 3 kementerian, karena Kementerian Kehutanan juga membuat surat ke Kementerian Pertanian tolong ini MoU segera dilakukan, sehingga penyelundupan pembawaan barang-barang terlarang itu bisa diatasi. Baru-baru ini kami dikira masih Dirjen dari Jerman menanyakan itu, ada barang kerang dan ada juga penyus masuk ke Jerman itu dipertanyakan kepada saya. Itu masuknya lewat Surabaya, ternyata di Surabaya keberangkatan itu waktu kita kunjungan kesana tidak ada pengawasan atau pemeriksaan keberangkatan, yang ada adalah kedatangan ini. Bapak Ketua, saya ingat waktu kita ke Surabaya, hanya kedatangan saja jadi keberangkatan sekarang itu kosong. Jadi tolong mungkin di Surabaya dibentuk lagi untuk keberangkatan karena semua barang-barang yang ke Cina juga Garu ini ditanya kepada saya kok mudah sekali garu berkoper-koper masuk ke Cina tanpa bayar cukai. Ini tolong Bapak Karantina.

Saya kira itu Bapak Ketua.

Terima kasih.

Dan mohon ijin Bapak Ketua, kami dari Gerindra jam 13.00 WIB ada rapat, nanti kalau sudah selesai akan kembali kesini.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Kanjeng.

Apa yang dikatakan oleh Bapak Darori tadi benar, teman-teman Anggota yang baru perlu diketahui. 2019 ada pengadaan ayam bekerja di Litbang, ada juga pengadaan ayam bekerja di Peternakan. Dananya kurang lebih hampir 800 miliar, hasilnya tidak ada. Maka kenapa tadi setiap ada ini para Dirjen ngomong saya potong karena mumpung ini masih hangat langsung saya sampaikan. Peralatannya juga tidak ada, di Litbang masih ada tidak ayam bekerja? Tidak ada. Jadi peternakan ini ayam ada di Litbang dan ada di Peternakan.

Selanjutnya Bapak Slamet, silakan Bapak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, Bapak Ketua, Wakil Ketua, Beserta seluruh rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen dan seluruh staf dari Kementerian Pertanian yang saya hormati.

Jadi mohon maaf Pak, disini ada dua Slamet soalnya, sehingga harus ada indentitas yang jelas. Satu, Slamet Bebek, satu Slamet PKS. Becanda saja Pak.

Ada beberapa hal yang juga untuk ini Pak, konfirmasi sekaligus juga penguatan. Yang pertama, ada titipan dari untuk Bapak Dirjen Perkebunan di Dapil saya. Dulu ada dari PTPN VIII kalau tidak salah itu ada penyulingan Sereh itu sekarang pabriknya atau penyulingannya kan berhenti sehingga masyarakat disitu sebenarnya cukup bagus untuk meningkatkan taraf ekonomi dari masyarakat yang ada. Nah, ini apakah mungkin ini bentuknya waktu itu kemitraan, jadi serehnya ditanam oleh petani, kemudian diambil. Sekarang kekurangannya itu karena alat penyulingnya sudah tidak ada. Nah, mungkin apakah memungkinkan nanti untuk kemudian dipikirkan itu sebagai bentuk Pemerintah hadir, tinggal nanti kemudian masalah pengelolaannya yang mungkin itu. Itu masukan dari Dapil saya yang cukup potensi sebenarnya Pak. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, juga di Dirjen Perkebunan juga ini. Itu ada pengembangan kawasan vanili di Sukabumi, di Jawa Barat itu Sumedang dan Sukabumi. Mungkin saya nanti minta data di Sukabumi-nya apakah di Cidolok atau dimana, betul di Cidolok ya? karena memang dari sisi sejarah Sukabumi pernah mempunyai kualitas vanili yang luar biasa, hanya memang ada perilaku petani yang memang kurang amanah. Terus terang ini selalu saya

sampaikan begitu, jadi ketika kemudian dulu panen itu dicampurin pasir dan lain-lain sehingga mungkin saya ingin tahu proyek itu dimana dan nanti langkah-langkahnya apa. Itu saja Bapak Dirjen.

Yang kedua ini untuk Karantina Pak, saya juga ketika kemudian kunjungan mendapatkan temuan bahwa kedatangan ada, tapi keberangkatan tidak ada ini. Padahal kalau saya lihat mars-nya waktu itu ketika kita kunjungan di suguhi mars-nya Pak. Itukan mengamankan baik keberangkatan maupun kepergian, artinya menjaga penyakit masuk maupun keluar. Sehingga ini langkah-langkahnya kayak apa dari program-program ini tidak terlihat ada penguatan-penguatan untuk pembangunan paling tidak kerenlah. Itu kayak *booth*, semacam *booth* minta sumbangan itu yang saya lihat, baik di bandara mana saja. Sehingga tidak meyakinkan bahwa itu adalah sebuah kantor yang memang bisa menangkal penyakit.

Saya kaitkan juga pertanyaan berikutnya yang lagi ramai inikan ASF di Bali maupun ASF di Medan. Kira-kira ini perannya nanti bagaimana nanti dari Karantina. Dan apakah tidak mungkin kemudian karantina itu menjadi karantina terpadu. Satu atap sehingga ini yang mestinya di dalam program atau anggaran ini ada rencana-rencana untuk itu.

Juga ada masukan Pak, dari itu untuk penguatan pembangunan instalasi-instalasi di UPT-UPT yang memang cukup tinggi intensitas dan frekuensi atau resiko penyakitnya Pak, seperti Juanda, Tanjung Perak ini khususnya masukan dari Jawa Timur ini, dan juga Ketapang. Dan saya ingin melihat gambaran tergambar dari anggaran ini.

Itu saja Pimpinan, pendalaman dari saya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya yang di BKO mungkin sampai 5 tahun Bapak Fauzi Amro.

F-NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Kalau Bapak Sudin, kayaknya selamanya kita disini Pak, kalau Ketuanya ganti ikut ganti juga. Mudah-mudahan Bapak Sudin bertahan, bukan hanya di Banggar kemarin.

Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ketua, Bapak Dedi Wakil Ketua, Bapak Sekjen dan Bapak Dirjen.

Pertama, saya melihat struktur APBN khususnya Kementerian Pertanian inikan Cuma 21 triliun Pak. Yang paling banyak itu di tanaman

pangan, tadi ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kita inikan tidak hanya pagu anggaran kita di Kementerian Pertanian 21 triliun. Ada juga subsidi pupuk Pak, yang kurang lebih 26 triliun ditambah lagi DAK. Nah, saya melihat target-target dari Kementerian Pertanian ini dari jaman sebelum-sebelumnya itu goal point kita seperti apa. Apa kita ini hanya rutinitas saja Pak Sekjen, rutinitas setiap tahun anggaran kita ini kalau tidak salah mengalami penurunan terus. Bagaimana kita bisa swasembada padi, jagung dan kedelai.

Nah, saya minta kepada Bapak Dirjen khususnya tanaman pangan bisa membuat *road map* kira-kira target kapan kita bisa swasembada. Menko Perekonomian mengatakan seluruh pemberian alat pertanian, bibit dan segala macam itu sudah diberikan untuk mengarahkan kepada swasembada dan ini harus diterjemahkan oleh Sekjen kepada Bapak Dirjen kapan kita swasembada, bisa tidak kita swasembada. Nah, kalau tidak bisa kita cari opsi-opsi lain Pak.

Persoalan padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi, kayu, kita kan masih mengalami impor sekarang ini Pak. Okelah misalnya bawang putih tidak bisa kita produksi karena harus ditanam di sub tropis Pak, tapi kan padi, jagung, kacang tanah dan sebagainya itu sangat memungkinkan kita untuk melakukan swasembada. Nah, saya hanya ingatkan lagi Pak, hilir kita ini swasembada Pak, hulunya ini baru alat pertanian, bibit, pupuk. Sehingga target Pak Syahrul Yasin Limpo ini untuk swasembada itu bisa diterimakan oleh Bapak Dirjen khususnya tanaman pangan dan lain-lain.

Kalau misalnya Irjen cuma 100 miliar Pak Sudin, lebih baik Irjenya kita tutup saja Pak, tidak usah ada Irjen di pertanian ini. Tidak mungkin 21 triliun diawasi dengan 100 miliar. Nah, kenyataannya seperti itu Pak, artinya Bapak Sekjen tolong penggunaan teknologi apa yang disampaikan sistem pengawasan lewat IT tadi tolong dibantu Pak Irjen ini jangan sampai anggaran cuma 105 miliar mengaudit 21 triliun ditambah lagi subsidi pupuk dan DAK Fisik, seperti itu.

Nah, ini harapan saya dan target kedepan saya minta kepada Dirjen Tanaman Pangan khususnya untuk membuat *road map* kira-kira kapan kita bisa swasembada ini Pak, sehingga yang namanya impor ini Bapak Dedi kita alergi, impor-impor ini alergi padahal kita bisa memproduksi seperti itu. Nah, target-target seperti ini harus diturunkan lewat Sekjen sehingga khususnya perkebunan Pak, tadi memang perkebunan ini kenapa Jokowi kalah di Sumatera Selatan itu karena perkebunannya. Orang-orang perkebunan itu tidak mau Pak, milih Jokowi karena karet terus menerus turun Pak, sekarang sudah 4000 per kilo, harga beras 12.000 atau 10.000 per kilo.

Artinya apa? saya mengingatkan Pak, harus ada terobosan jangan sampai ini rutinitas. Dulu kita periode kemarin di Komisi IV DPR RI rutinitas, tidak ada perubahan, Kementerian Pertanian itu-itu saja. Orang di kampung Pak, malas bertani itu Pak, orang kenapa banyak ke Jakarta karena mau kerja di pabrik dan seterusnya. Tidak ada magnet milenial atau pemuda petani itu bulshit omong besar itu, tidak ada itu Pak, belum ada niat untuk

bertani itu. kita saja banyak merantau ke Jakarta untuk mendapatkan sesuatu, apalagi orang kampung. Di Kerawang berapa defisit jumlah sawahnya Pak, nah inikan harus dilihat Pak. Nah, saya mengingatkan kembali apa yang disampaikan Bapak Menteri, Bapak Dirjen bisa menterjemahkan dengan kawan-kawan Komisi IV DPR RI.

Mengingatkan terakhir Pak, persoalan Alsintan 55 Anggota DPR RI periode kemarin yang jadi lagi di Komisi IV DPR RI cuma 15 orang, artinya 40 orang bicara Alsintan. Alsintan tidak efektif Pak, pemberiannya harus lewat opsi yang lain Pak Sudin, lewat Upja saya sarankan.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Fauzi sudah 3 menit.

F-NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Dan terakhir ini Pak, mudah-mudahan Bapak Dirjen bisa menterjemahkan apa yang menjadi keinginan Bapak Menteri dan keinginan Ketua Komisi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Fauzi pencerahannya.

Teman-teman Anggota kenapa tadi setiap Dirjen ngomong saya potong, karena 105 itu sangat minim sekali, kan tidak layak. Nanti teman-teman silakan baca Tata Tertib Pasal 263, jadi dibaca ulang lagi.

Selanjutnya Bapak Azikin, silakan Bapak Azikin. Jangan lupa 3 menit.

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Pimpinan beserta Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Bapak Sekjen dan rombongan yang saya hormati.

Setelah mendengarkan dan membaca program-program yang akan dilaksanakan oleh Litbang tentu kita mengharapkan bahwa Litbang ini punya inovasi baru sama dengan apa yang terjadi di Thailand. Ada duren apa, ada jambu apa, tapi sampai saat ini kalau kita melihat belum ada terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh Litbang Pertanian. Mudah-mudahan di periode kita ini tahun kedua, tahun ketiga, sudah ada penemuan-penemuan yang bisa kita banggakan sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai potensi pertanian yang sangat luas. Masa kalah sama Thailand.

Yang kedua, Pak Sekjen, kalau saya tidak salah ada itu dia punya perbandingan antara jumlah anggaran dengan jumlah dana pengawasan. Kalau saya tidak salah nol koma sekian persen. Saya mantan Inspektur 5 tahun di Provinsi, saya hafal betul. Kalau dia punya anggaran sangat rendah, maka pemeriksa-pemeriksa provinsi dan kabupaten ini nanti difasilitasi oleh objek pemeriksaan, sehingga hasil pemeriksaannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu Bapak Sekjen, coba dicari dia punya aturan mudah-mudahan belum dicabut, nol koma sekian persen itu biaya pengawasan.

Yang ketiga, kami juga mengharapkan kepada Bapak Dirjen Tanaman Pangan bahwa di Sulaewesi Selatan itu Pak, ada beberapa potensi-potensi yang sangat besar. Katakanlah misalnya di Kepulauan Selayar itu penghasil kopra yang sangat besar. Di Kabupaten Bantaeng itu penghasil kopi bahkan ada kopi liberika di Bantaeng itu yang ditanam sejak tahun 1927 itu jadi pembatas kebun. Oleh sebab itu, saya minta liberika ini juga diberikan kepada kami di Kabupaten Bantaeng untuk kami kembangkan disana.

Yang keempat, terkait dengan padi. Berikanlah bibit padi masyarakat itu yang mempunyai nilai jual yang bagus. Katakanlah misalnya di Sulawesi Selatan yang paling bagus itu adalah Membramo. Dan yang terakhir, sekali lagi saya tekankan jangan lagi dibagikan masyarakat jagung merk Dragon itu sangat merugikan masyarakat.

Terima kasih Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dan sekaligus saya ijin Bapak Ketua, untuk rakat Fraksi.

KETUA RAPAT:

Iya, terima kasih Bapak Azikin.

Selanjutnya Bapak Made Urip.

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Bapak Sekjen dan seluruh Eselon I yang hadir.

Om swasti astu.

Pertama, saya ingin sampaikan kepada Dirjen Tanaman Pangan. Pak Dirjen Tanaman Pangan inikan Dirjen Hortikultura dulu, jadi ini salah satu Dirjen yang mudah diakses. Jadi beliau cukup rajin turun ke bawah dan data-data yang diberikan cukup komplit juga kalau disampaikan, programnya juga

cukup menarik sekali ini. Ini Dirjen yang muda dan cukup lincah ini, kita memberikan apresiasi ini.

Nah, kalau program-program yang telah kita bisa akses di Ditjen Tanaman Pangan ini misalnya seperti RMU (Rice Milling Unit) dan kemudian juga ada UPGB yang intergrated itu cukup sangat diperlukan oleh petani, kelompok-kelompok tani kalau di Bali itu Subak-subak. Maka itu program ini perlu dilanjutkan kembali Pak Dirjen, jadi ini cukup menarik sekali. Karena ini adalah penanganan tentang pasca panen ini.

Memang Dirjen Tanaman Pangan inikan anggarannya menurun sekarang ini. Jadi hampir 150 miliar itu untuk diperuntukan lain, ini sangat kita sayangkan sekali. Karena lapangan garapan dari tanaman pangan inikan cukup luas menyangkut beberapa komoditas. Jadi produk-produk yang berkaitan dengan tanaman pangan. Dan cuma saya ingin juga menyampaikan kepada Bapak Dirjen Tanaman Pangan, terutama yang berkaitan dengan masalah diversifikasi ini. Jadi keanekaragaman pangan ini.

Jadi kita ingin mendorong Bapak Dirjen Tanaman Pangan untuk tidak terpaku kepada salah satu produk misalnya beras saja. Jadi itu harus disesuaikan dengan kondisi di daerahnya. Misalnya kalau NTT ya jagung misalnya, kebiasaan disana. Kalau di Papua sagu misalnya barangkali ini perlu digarap kembali persoalan tentang diversifikasi pangan ini, sehingga ketersediaan pangan di dalam negeri itu bisa kita penuhi dari produk-produk kita di dalam negeri. Jadi tidak tergantung kepada pangan impor.

Nah, saya juga ingin mendapatkan keterangan informasi dari Bapak tentang rekrutmen terhadap petani milenial ini, jadi pemuda milenial ini. Barangkali bagaimana merekrut ini anak-anak muda ini. Kemudian mensupport, supaya anak-anak muda ini bisa, supaya dalam proses regenerasi petani ini bisa berjalan dengan baik. Kalau lihat dilapangan sekarang inikan petani kita hampir umurnya itu rata-rata di atas 60 tahun ini. Jadi butuh regenerasi. Tadi disampaikan oleh Bung Fauzi, itu bohong itu katanya. Nah, ini coba dilapangan, ini program yang cukup bagus sebetulnya. Jadi Bapak Menteri mungkin sama-sama kan, kenapa tidak didukung. Itu yang pertama terhadap Bapak Dirjen Tanaman Pangan.

Yang kedua, ini Dirjen Perkebunan. Dirjen Perkebunan ini juga cukup bagus ini, cukup memahamsi persoalan tentang perkebunan dibandingkan dengan kondisi yang lalu, lebih-lebih objektif melihat persoalan tentang perkebunan dilapangan. Apa kebutuhan-kebutuhan para petani, salah satu misalnya bibit tadi itu. Jadi kalau dulu kan hampir semua dari Jember, sampai di tempat dikirim sudah stress bibitnya Pak. Maka itu, terhadap kawasan-kawasan itu didekatkan bibit ini, cukup bagus dan menarik ini.

Saya ingin menyampaikan produk kakao ini, petani kakao ini perlu disupport oleh Bapak Dirjen Perkebunan ini dengan baik, terutama penanganan pasca panen. Saya harap misalnya di daerah saya di Jembrana itu hampir sebagian besar kawasan itu adalah kakao. Nah, persoalannya yang dihadapi adalah penanganan pasca panen terutama produk-produknya

itu supaya bisa diolah, mungkin mesin diperlukan barangkali Bapak Dirjen bisa membantu itu. Terus vanili juga Pak, sekarang sedang tren vanili ini Pak, ini perlu digarap dengan baik. Jadi terobosan-terobosan Bapak Dirjen Perkebunan ini cukup bagus sekali.

Nah, yang ketiga Litbang. Jadi Litbang ini kadang-kadang sulit....

KETUA RAPAT:

Pak Made Urip ini yang terakhir ya, karena sudah 3 menit.

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

Litbang ini sulit berkembang ini, saya berharap BPTP di daerah itu betul-betul inovatif Pak. Nampaknya sekarang ini agak mandek ini, misalnya berkembangnya antrax misalnya terutama di daerah Gunung Kidul kemudian juga ASF pada Babi misalnya, suara Litbang itu kemana tidak pernah. Mestinya diakan harus melakukan antisipasi terhadap penyakit, melakukan penelitian misalnya. Apalagi ini cuacanya sangat buruk, misalnya itu akan berpengaruh terhadap perkembangan sapi, babi, misalnya. Jadi Litbang saya harap bisa mengantisipasi persoalan-persoalan yang terkait dengan itu.

Selanjutnya karantina, karantina kerjanya louncing-louncing terus ini, louncing ekspor. Saya pernah ikuti louncing di Bali, itu ekspor Manggis mengundang gubernur lagi, hadir. Sekarang penyakit korona, virus korona di Cina. Jadi mandek sekarang tidak bisa ekspor, dan juga kita tidak bisa mendatangkan juga produk-produk lain. Nah, bagaimana ini Pak, antisipasi terhadap persoalan-persoalan yang semacam ini. Jangan hanya ini kerjanya ceremonial saja tetapi tidak ada kelanjutannya.

Yang terakhir Bapak Irjen, barangkali walaupun anggarannya cukup kecil. Saya berharap Irjen ini betul-betul efektif melakukan pengawasan dilapangan, jangan hanya bermain kemudian melakukan pengawasan di provinsi saja. Lihat kalau misalnya UPO ada salah satu UPO terjadi ada kasus misalnya perlu dilihat dilapangan ini. Demikian juga bantuan-bantuan lain dari APBN dari Kementerian Pertanian ini. Terutama dilapangan Pak, banyak sekali itu kelompok tani yang fiktif. Jadi kalau ada bantuan baru dia buat kelompok tani. Ini perlu diteliti dilapangan Pak.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Made Urip.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Ijin Ketua, 3,5 menit.

KETUA RAPAT:

Kenapa?

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Ijin.

KETUA RAPAT:

Mau ijin pulang?

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Bukan, ini kita break dulu Ketua. Ini sudah jam 13.00 WIB, kalau Ketua terima saran saya kira saran Anggota ini bijak Ketua. Sudah jam 13.00 WIB apa salahnya kita *break* dulu, yang Islam ada Sholat, kayak Bapak Daniel juga mungkin ada kegiatan. Ini sekedar saran Ketua.

KETUA RAPAT:

Ijin, boleh tidak dua lagi supaya pas jam 13,00 WIB. Sekarang Mbah Mutarom setelah itu Pak Mindo. Selesai itu kita *break* Ishoma dan nanti ijin yang melanjutkan memimpin rapat Bapak Daniel dan Bapak Dedi karena saya harus berangkat.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Om swasti Astu.*

Yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua,
Yang saya hormati Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang saya hormati Bapak Sekjen, Bapak Dirjen dan Bapak, Ibu semuanya.

Langsung saja, yang terkait kepada Bapak Dirjen Litbang. Seperti yang lain saya berharap bagaimana kerja Litbang ini dimaksimalkan karena beliau anggarannya juga lumayan besar. Bagaimana ada inovasi-inovasi yang bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Karena sementara ini mohon maaf karena saya orang Jawa, yang jelek-jelek itu mesti bahasanya Jawa. Wedus kacang cilik itu yo Jowo, kemudian jambu yang tidak anu ya Jowo, yang besar-besar Jambu Bangkok dan lain sebagainya. *Monggo* ini terobosan apa yang akan dilakukan oleh Litbang.

Kemudian saat ini yang lagi tren adalah porang, porang ini bagaimana bisa dicarikan nilai tambahnya. Kalau saat inikan ekspor dengan mentah Pak, hasil cobor dikeringkan, jual, kemudian ekspor. Kalau ini nanti sudah se-

Indonesia itu ramai-ramai panen porang tentu akan berlaku hukum ekonomi. Padahal saat ini khususnya di Madiun Porang ini merupakan andalan. Panen Porang itu masyarakat truknya baru dan lain sebagainya, kan simple sekali. Jadi ditanam dibawah tegakan, ada sisa yang tertinggal gitu saja sudah bisa hidup. Memang tidak bisa langsung konsumsi Pak, kalau orang Jawa seperti gadung harus direkayasa sedemikian rupa agar bisa dikonsumsi. Ini yang kaitannya dengan Litbang.

Kemudian terkait dengan kembali seperti yang lain, Inspektur ini memang kalau anggaran seperti itu ya berat. Karena saat ini kita ini karena sisi pengawasan intern lemah ujung-ujungnya kita berhadapan dengan aparat yang lain. Mohon maaf seperti Jawa Timur ini ya dari 38 ini ada 12 yang mondok. Ini disisi lain Kepala Wilayahnya sukseslah, tapi karena pengawasan internnya sangat lemah maka pembinaannya menjadi kurang akhirnya banyak yang bermasalah.

Mungkin ini Bapak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Untuk selanjutnya Bapak Mindo tadi Bapak Charles katanya ada di panggil Pimpinan Fraksi, setelah Bapak Mindo, Bapak Charles kita *break* ya.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Baik, Bapak Ketua.

Tadikan menyayangkan terlalu kecil Irjen. Kalau saya lihat memang Irjen ini belum bekerja, mungkin tidak perlu dana juga. Harusnya memang kerja Irjen itu kalau menurut analisa Parito terhadap yang mempengaruhi dana-dana besar, itu yang pertama diperiksa. Itu hukum Parito, ap aitu? Cetak sawah, bagaimana ceritanya cetak sawah itu, apa hasilnya cetak sawah itu. Karena itu Pak Ketua, saya ingin pada rapat yang datang ada daftar cetak sawahnya dimana, berapa luas, jadi rinci, desa apa, kecamatan mata, tahun berapa, berapa anggarannya, dan sudah menghasilkan apa. Jadi kesitu yang utamanya, kerjanya Inspektorat Jenderal itu, bukan hal kecil-kecil, SPJ-SPJ, bukan itu. Tapi kepada penempatan anggaran-anggaran yang besar itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, buat Dirjen Perkebunan. Vanili memang bagus, sekarang lagi bagus harganya sampai 4 juta-5 juta tetapi pertanyaannya, kita yang mau kita utamakan adalah menggenjot pendapatan ekspor supaya kita hebat atau peningkatan pendapatan rakyat lebih merata. Kalau kita kearah sana, maka dalam program Bapak ini dievaluasi dan ditambahkan kembali anggaran

untuk kelapa dalam. Melambai-lambai nyiur di pantai itu dinyanyikan, garis pantai Indonesia nomor 2 setelah Canada. Sepanjang garis pantai itu bisa kelapa, bahwa harga kopra harganya sekarang sering rendah itu karena kita masih gagal bagaimana membuat industry hilirisasinya. Jadi bukan produknya, kegagalan kita masih dihilirnya. Mari kita kerjakan yang seperti itu.

Kepada Litbang, dengan anggaran yang ada, coba paradigmanya dirubah dari yang lalu-lalu. Jadi kalau kita ke Kantor Litbang itu 5 kali senggolan kita ketemu doktor. 5 kali senggolan jalan ini dokter satu kita senggol. Apa yang sudah dihasilkan untuk Republik, jangan-jangan hanya menambah KUM saja, untuk menaikkan gradenya.

Saya titik satu saja yang sangat berguna buat Indonesia, kita berlomba Pak Litbang mulai start dari sekarang kita riset Klorela dan Spirulina. Itu bisa untuk pangan, bisa untuk pakan. Bayangkan kita mengimpor untuk pakan, protein hewani itu sampai 50 triliun per tahun dari MBM, padahal klorela itu bisa di air tawar di air asin sekaligus dia menawarkan air asin jadi air tawar. Dari study yang ada proteinnya lebih dari 50% berat kering. Bisa juga jadi biomas tergantung itu.

Saya minta secara khusus berkumpullah Doktor-Doktor itu untuk memikirkan itu jangan nanti menjadi kalah dengan politisi. Saya sungguh untuk katakan ini, saya nantang resmi disini ini, untuk klorela. Karena itu menyelesaikan masalah protein kita. Kalau nanti Bapak tetap bekerja, ayam bekerja, pembagian ayam itu saya yakini akan mengurangi stunting. Bill Gate mengatakan mengurangi kemiskinan bagikan ayam, tetapi sempurna itunya, pengawalannya. Kalau kita bagikan ayam semakin banyak ini makin banyak impor fish kita. Jadi melihatnya jangan sepotong-sepotong, satu kesatuan.

Pak Karantina, ini kita start dari sekarang ini Menteri baru juga yang lain-lain tadi itu. Jangan lagi karena dulu sudah cetak sawah dikontrakkan kepada siapa, terus sekarang harus diikuti kita evaluasi dulu. Dulu waktu Bapak Menteri yang dulu paling sering kalau karantina itu memang ekspor itu. Boleh karantina itu bikin acara ekspor tapi sertakan Dirjen teknisnya yang mendorong mereka memproduksi sehingga mengekspor, sehingga Tupoksi dan kerja sama antar bidang itu lebih jelas.

Saya kira sementara begitu Bapak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Yang terakhir Bapak Charles, silakan ini dibawa Bapak fauzi untuk mem-*back up* supaya Bapak Fauzi jangan nakal.

F-NASDEM (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Sudin dan Bapak Daniel yang kami hormati,
Bapak Sekjen dan jajarannya.

Yang pertama, untuk Dirjen Perkebunan tadi kebetulan Dapil saya itu adalah Dapil Jember, Lumajang dan wilayah Karesidenan Besuki itu merupakan daerah tembakau Pak, penghasil terbesar. Saya tadi dengar memang lihat dari paparan Bapak tidak ada sama sekali dana untuk tembakau. Ekspor terakhir kita menurut BPS itu baik tahun 2017, 2018 dan 2019 saya belum dapat itu angkanya antara 120 ribu ton per tahun, di mana hampir 40 ribu ton itu kita ambil dari Cina Pak.

Menurut saya ini momentum yang penting yang harus diambil oleh Bapak, dengan kondisi global hari ini dimana virus korona Cina belum diketahui kapan akan segera pulih karena kalimatnya will, kalimatnya akan dan akan inik kita belum tahu sampai kapan. Jadi saya berharap Bapak Pimpinan dan Bapak Sekjen dan kawan-kawan tolong soal tembakau ini karena yang disebut dengan Karesidenan Besuki itu tanahnya ada Pak, petaninya ada, pengusahanya ada dan lain-lainnya pun ada, budaya untuk menanam itu sudah ada sejak jaman penjajahan dulu sampai sekarang. Jadi saya berharap mungkin masih bisa dilihat karena ini merupakan satu pengawal yang penting untuk petani Indonesia yang tadi disampaikan oleh Bapak Darori, menurut saya ini perlu dipikirkan. Mudah-mudahan di tahun 2020 ini menjadi anggaran yang penting juga di masukkan.

Yang kedua, saya ingin menyampaikan Pak Sekjen dan Bapak-bapak sekalian. Hari ini tadi disampaikan oleh rekan dibelakang saya soal krisis regenerasi petani Pak. Petani dengan usia di bawah 25 tahun tinggal 183 ribu Pak, dan rata-rata umurnya sudah di atas 45 tahun dengan jumlah hampir yang di atas 65 tahun saja ada 3.000.200 lebih Pak. Jadi saya memberikan apresiasi sekaligus tekanan agar program yang dilakukan oleh Bapak Menteri dan jajaran terkait dengan Kostra Tani dan Petani Milenial ini harus menjawab ini semua Pak.

Saya berharap kalau memang ada anak muda yang punya basic sebagai anak pertanian. Karena saya sebagai lama di media itu saya tahu persis Pak, teman-teman saya di IPB, teman-teman saya dimana-mana itu larinya ke bank dan segala macam Pak. Nah, saya berharap petani milenial dan Kostra Tani ini, ini merupakan satu terobosan yang harus dilakukan oleh Bapak Menteri dan jajaran dikawal oleh Pimpinan Komisi IV DPR RI dan kami di Komisi IV DPR RI agar ini menjadi sebuah program yang benar-benar menyentuh orang-orang tani Pak. Sekali lagi saya melihat angka-angka ini kalau mau disebut Indonesia nanti negara petani dan berharap orang di atas 60 tahun saya pikir ini masa lalu jadinya Pak. Jadi saya berharap sekali lagi petani milenial dan Kostra Tani ini merupakan program yang memang bisa dijalankan secara baik dan benar.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi Bapak Dirjen Perkebunan apa yang disampaikan Bapak Charles ini sungguh menarik perihal tembakau. Termasuk juga mungkin bukan wilayah beliau saja, termasuk di NTB kalau tidak salah itu ada.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Berhubung Bapak Ichsan sudah datang. Kita skor Ishoma dan kembali lagi keruangan ini pukul 14.00 WIB.

(RAPAT DISKORS PUKUL 13.00 WIB)

KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H.):

(SKORS DICABUT PUKUL 14.30 WIB)

Nah, ini sekarang senyum tidak ada ketegangan disini. Tepuk tangan semuanya biar santai. Ngurus pertanian itu ngurus alam kebahagiaan, dan pekerjaan yang paling berbahagia adalah pekerjaan yang berhubungan dengan petani, karena petani itu rata-rata jujur dan selalu mensyukuri apa yang diterima. Coba Ibu kirim traktor kepada petani yang asli ya, pasti itu pulangnya dikirimi Babakak, terus makan nasi, panen nanti dikirim lagi singkong. Pokoknya petani itu bahagia, lebih jujur dibandingkan dengan politisi.

Dan selanjutnya kita teruskan ini kuis tanya dan jawab, sekarang Bapak Hamid Noor Yasin. Oh, kalau Ibu sudah terdengar suaranya ini cermin keberhasilan Kementerian Pertanian ini. Yang berikutnya setiap orang itu memerlukan pemimpin yang hebat, pemimpin yang hebat itu kaya dengan gagasan. Kemudian selalu memberikan solusi dalam setiap kesulitan. Dan orang yang seperti itu dalam filsafat Jawa disebutnya Bambang. Ada tidak Bambang Purwanto, itu Jawa loh walaupun saya yakin Kalimantan ini.

Silakan Mas.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Karena pakai pantun jadi hampir tidak konsen saya.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota dan dari Kementerian yang saya hormati pula.

Saya tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan ini bahwa Indonesia ini negara agraris. Lahan subur, pabrik pupuk punya, alat-alat pertanian juga punya, petaninya juga punya, tetapi tidak bisa swasembada. Lantas apa manfaat dari Litbang ini, ini perlu dijelaskan sehingga kita punya *road map* yang jelas untuk menuju swasembada pangan. Apalagi dengan kasus virus korona yang tentunya tidak bisa lagi menerima impor dari Cina, ini tentunya menjadi semangat teman-teman Kementerian untuk berupaya kedepan itu harus bisa swasembada. Tentu ini harus diikuti dengan *road map* yang jelas.

Kemudian tadi sudah banyak ditanyakan oleh teman-teman, jadi saya tidak perlu mengulang. Perlu kami sampaikan hasil dari Kunspek kemarin terutama untuk karantina. Ini adalah pintu gerbang untuk menangkal penyakit yang datang dari luar. Oleh karena itu, kalau saya di anggaran tadi tentunya perlu ditambah agar bisa membeli peralatan yang lebih canggih sehingga dapat menangkal penyebaran penyakit ke dalam negeri.

Kemudian selanjutnya Alsintan, ini agak ribet ini. Saya kira ini semua teman-teman dari Anggota persyaratannya agak ribet karena harus memiliki legalitas dari notaris tetapi minimal 2 tahun keatas. Yang jadi pertanyaan teman-teman petani yang baru membentuk, artinya tidak dapat kesempatan. Saya kira ini perlu penyederhanaan regulasi dari kementerian. Karena di dinas juga takut karena itu diatur dari Kementerian. Oleh karena itu, kami mohon untuk dipermudah jangan sampai nanti aspirasi dari Anggota ini dilepas tetapi ekornya dipegang, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan secara optimal sesuai dengan kondisi petani yang ada di Dapil masing-masing.

Kemudian kembali lagi ini terkait dengan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Tempo hari kami pertanyakan apa peran Pemerintah yang akan dilakukan agar mereka tidak membakar lagi. Tetapi saya pulang ke Dapil kemarin sudah ada peralatan yang ditempatkan di Dinas, seperti ekskavator. Jadi petani harus meminjam alat ke Dinas. Ini tentu perlu alat angkut longbab. Ini biayanya juga tidak sedikit, kemudian solar ditanggung sendiri, operator ditanggung sendiri. Yang jadi pertanyaan petani-petani pedalaman tidak akan mungkin mampu melaksanakan itu karena tidak memiliki uang yang cukup banyak. Untuk itu, tentunya harus diberikan kesempatan dan harus ada regulasi yang dapat membantu petani-petani tradisional di Kalimantan Tengah. Karena kalau tidak mereka tetap akan membakar. Karena persoalannya mereka ketika melakukan selamatan ritual adat itu harus menggunakan ketan dan beras dari hasil panen didesanya masing-masing dan itu sudah tidak bisa dirubah, tidak bisa dihindari.

Oleh karena itu, kami mohon kepedulian dari Kementerian Pertanian, tempo hari sudah kami minta juga ke KLHK supaya melepas kawasan yang ada di desa-desa pedalaman karena mereka sudah tinggal beberapa puluh tahun disana bahkan ratusan tahun tetapi desanya masih masuk kawasan hutan. Kalau itu sudah dilepas kami minta dari Kementerian juga langsung memprogramkan pembangunan di kawasan tertinggal.

Saya kira itu Pimpinan yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari Kementan. Kemudian pertanyaan saya pertama tadi supaya dijelaskan kenapa tidak bisa swasemda dan apa penyebabnya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mas Bambang.

Barangkali sederhana kita memperbandingkan alokasi dana penelitian dan pengembangan itu sangat penting selama itu memiliki produktifitas. Paling kita hanya membandingkan kenapa sih kalau swasta bikin perbenihan kok gede, kok bisa ekspor, kok produknya terus dipakai oleh kepentingan masyarakat dan setiap tahun dan masyarakat rela beli. Kenapa Litbang yang kita miliki yang tiap tahun kita berikan dana kok tidak bisa menyaingi swasta. Minimal beda tipis lah, inikan bedanya sudah tebal banget, jauh. Kita ingin Litbang-Litbang yang kita miliki itu bisa minimal 90-100 beda 10% dengan Litbang yang menghasilkan produk-produk unggulan di bidang pertanian yang dimiliki oleh swasta.

Nah, untuk itu diperlukan cara kerja yang menyerahkan diri secara total. Menyerahkan diri adalah menyerahkan diri secara total pada nilai-nilai pekerjaan yang kita tekuni sehingga memiliki daya guna dan berhasil guna. Dan orang yang selalu menyerahkan diri itu disebutnya seorang muslim yang kafah. Dan selanjutnya Bapak Muslim yang akan menyampaikan itu. Tidak ada, haduh ini sudah dikasih sastra tidak ada lagi.

Nah, pokoknya pertanian mah menurut saya mungkin nantilah 3 bulan kedepan rapatnya akan selalu bagus hasilnya. Bapak Bagus ada tidak?

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Terima kasih Ketua.

Yang saya hormati Bapak Sekjen bersama seluruh Dirjen Kementan.

Saya pada intinya mengapresiasi kinerja dan kerja keras Bapak Dirjen untuk membangun pertanian ini. Yang sudah tentunya pekerjaan kita tidak mudah banyak tantangan yang kita hadapi, namun dengan sikap keseriusan saya yakin kita bisa lalui dengan baik.

Yang pertama, kepada Bapak Dirjen Tanaman Pangan, jadi saya mengapresiasi banyak hal yang sudah dilakukan. Cuma saya menanyakan ada berita di Medsos saja ini, untuk mempertegas saja terkait dengan persediaan jagung kita. Sebenarnya bagaimana persediaan jagung kita dari bulan Januari sampai dengan Maret ini. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah tadi sudah saya sempat di luar bertanya terkait dengan KUR sudah jelas tadi. Yang selanjutnya kepada Dirjen Perkebunan, yaitu menyikapi CPO. Jadi saya terinspirasi begini Pak, kenapa VOC jadi 350 tahun kita dijajah itu berarti Indonesia ada keistimewaan. Nah, untuk dapat CPO. Nah, sekarang contoh di Bali Pak, di Bali saya memperhatikan sekali itu pohon-pohon kelapa kita itu kelapanya di jual Madura, keluar Bali. Padahal kebutuhan CPO kita di Bali sangat tinggi, sekarang sudah dipakai sepah dan sebagainya. Jadi ini sekarang bagaimana bentuk kita untuk menangani di hilirnya. Apalagi kalau kita bicara ekspor, jadi ekspor kita sebenarnya India sangat tinggi permintaannya, khususnya termasuk kelapa sawit, nah inikan tinggi sekali Pak.

Nah, sekarang dengan adanya kasus korona dan sebagainya inikan sejauhmana dampaknya kepada kita, jadi pasti turun. Nah, sekarang yang terpenting dalam penekanan saya yang pertama adalah bagaimana kita menyambut di hilirnya terkait dengan perkebunan kelapa kita harus ada itu mesin pengolahan CPO-nya dan sebagainya. Itu sekarang di Bali sudah ada, home industry Pak, banyak. Cuma kita tidak bisa nutup mata dia kesulitan untuk menjualnya, nah ini yang perlu.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Pak, ini yang dimaksud VCO atau CPO?

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

CPO Pak, bukan VOC Pak.

Terus yang terkait dengan Balitbang, ini kelemahan kita kan di data ini Pak, semua hal kelemahan kita di data. Jadi bisa tidak kita sekarang kita mulai dari tingkat tataran desa Pak. Kita minta sekarang kepala desa kita berapa luas arealnya, berapa sawahnya, berapa pedagangnya, berapa kebutuhannya. Kalau ini tidak ada kita tidak akan bisa mencapai swasembada pangan Pak. Saya minta dari Balitbang kita mulai dari desa, dan sekarang dengan desa kita bentuk zonasi pertanian Pak. Zonasi pertaniannya, saya yakin Bapak sudah berbuat jauh untuk itu, saya yakin. Cuma kenyataan dilapangan ini belum kita polakan dengan baik, kalau ini terpolakan dengan baik maka kita tahu "oh desa ini kita bisa berikan penghargaan, kamu sudah swasembada pangan, beras kami sudah tercapai, jagung kamu sudah tercapai dan sebagainya". Nah, kalau sudah ada ini baru kita gampang mengevaluasi, itu yang pertama.

Yang kedua, saya sudah mendengar hubungan dan kerja sama dengan Kementerian dan universitas-universitas yang ada. Nah, ini kita tingkatkan Pak, kita tingkatkan. Dan kemarin saya berterima kasih kepada Bapak Dirjen Tanaman Pangan sudah mengutus wakilnya untuk menghadiri Denplot kami di Bali. Dan mari kita Pak, jadi kita rubah pola saya minta juga Bapak perintahkan *stake holder* Bapak untuk mengawal Denplot kami yang kita lakukan itu adalah untuk Bapak semua. Saya buat sistem baru dengan sistem satu kluster satu hektar Pak. Disini silakan Bapak mengevaluasi kira-

kira bentuknya apa, varietasnya apa. Nah, pupuk sudah kami adakan secara mandiri Pak, kita gratiskan bahkan saya memberikan kontrak kepada petani bilamana hasilnya turun dari sebelumnya maka kami memberikan ganti rugi Pak, secara mandiri. Kami bersama sentral organisasi karyawan swadiri membangun kerja sama ini. Ini adalah real, kami hanya ingin tahu Pak, potensi pertanian dan tanah kita seperti apa sih. BPTP kami sudah ajak, sudah itu alumni ITB sudah ikut, mahasiswa sudah ikut. Nah, sekarang Bapak ada di dalamnya mari kita melihat secara dekat, secara fakta bagaimana quantity dan quality dari produk pertanian yang kita hasilkan. Nah, itu yang kami mohonkan kepada Bapak barangkali bisa nanti *next*-nya kalau anggaran memadai setiap luasan 300 hektar kita dampingi dengan satu lab mini Pak. Nah, sehingga bisa kita mengevaluasi lebih dekat.

Terus pertanyaan saya yang selanjutnya, kira-kira apa bentuk antisipasi Bapak menyikapi semakin banyaknya lahan pertanian kita yang kritis air Pak. Ini mungkin bisa melahirkan bibit-bibit padi yang dilahan tadah hujan, seperti contohnya pada padi gagah. Nah, terus ada teknologi yang bisa kita ambil mungkin mengolah air laut kita jadikan sebagai air tawar. Sehingga menjadi satu cadangan air yang pastinya nanti tidak kelabakan kita, dari sekarang kita antisipasi hal itu.

Dan menyikapi semua itu tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Sekjen menurut saya menyikapi pertanian ini semestinya ada SK 4 Menteri, PUPR, sudah itu Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Jadi sehingga yang pertama adalah menyikapi irigasi bagaimana serapan air kita di pinggiran hutan. Yang kedua, adanya aturan yang jelas terhadap pengembangan yang terjadi di areal ladang atau pertanian kita. inikan irigasi kita hancur disitu Pak, kalau ini tidak terjadi kasihan Bapak Menteri, Bapak Sekjen, Bapak-bapak sekalian sudah menggebu-gebu akhirnya tersangkut lagi urusan irigasi. Irigasi sekunder dan primernya, mentoknya disitu. Nah, jadi terkadang irigasi buangan kita. Nah, ini harapan saya kalau ada SK 4 menteri ini jadi ada kesepahaman bagaimana menindaklanjuti saya yakin Pak, akan mempermudah kinerja Bapak dalam meningkatkan dan mengembangkan pertanian ini. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan.

Dan yang terakhir kepada karantina, dan kepada semuanya. Mari dengan kasus babi yang ada di Bali bagaimana sikap kita. Ini jangan sampai nanti jadi bias, Medsos kemarin saya sudah sempat panggil-panggil teman-teman biar jangan mencuat. Ini bahaya nanti jadi kasus Korona takut semua nanti. Bagaimana sikap kita menyikapi hal itu, perlu juga penanganan yang lebih cepat.

Dan pada kesempatan ini juga saya sampaikan dengan kasus Korona yang menimpa negara Cina, berdampak kepada ekspor kita Pak. Ekspor manggis sehingga kita tidak bisa ekspor tahun ini. Nah, menyikapi hal itu kami bersama taruna tani Bapak menyiasati pada hari Minggu tanggal 16 kami mengadakan Bazar. Jadi eksportir Bapak kita suruh bawa buah Manggisnya, buah Durennya saya mengundang teman-teman pengusaha kita todong. Dan pada kesempatan ini juga saya mengundang Bapak Sekretaris Jenderal, dan para Dirjen semuanya dan mohon disampaikan undangan kami kepada

Bapak Menteri barangkali bisa datang ke Bali mari kita berikan semangat kepada pengusaha kita, lesu dia ekspor namun barangnya tersalurkan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Pimpinan, barangkali ada hal yang tidak berkenan dan salah mohon kiranya dimaafkan.

Sekian, terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Santi-santi om.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Bagus sekarang sudah jadi Muhammadiyah.

Baik, pertanian itu harus mendapat kecukupan air, kesuburan tanah, kemudian juga angin yang harus terstandarisasi dengan baik. Dan yang keempat adalah pencahayaan yang sempurna. Cahayanya bila perlu ada dalam dua sudut cahaya sehingga menghasilkan hasil pertanian yang optimal. Dan urusan cahaya itu ada di Ibu Nur'aeni, cahaya dua mata itu.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Bisa saja Pimpinan kita ini, emang agar tidak tegang-tegang Pak Dedi harusnya tiap hari.

KETUA RAPAT:

Kalau Ibu senangnya yang tegang-tegang.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Kalau saya tegangnya nanti malam saja Pak.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.*

Pimpinan yang saya hormati serta Anggota,
Bapak Sekjen, para Dirjen dan yang lain Bapak Inspektur juga hadir.

Saya tidak panjang lebar sepertinya, mungkin hanya ingin menyampaikan dan mengingatkan juga khusus kaitan aspirasi untuk Banten. Agar para Dirjen ini bisa juga mendorong serta mengutamakan juga karena Banten kan dekat dengan Ibu Kota Negara yang memang juga lahan pertanian juga masih cukup banyak. Akan tetapi kalau dilihat anggaran yang saya baca masih minim untuk dialokasikan di wilayah Banten. Baik, Dirjen Pangan maupun Ketahanan Pangan serta yang lainnya.

Dilihat kayak dukungan terhadap program ini di Banten kan masih rendah sekali, padahal disana potensinya cukup besar. Bahkan Banten ini

saat ini menduduki ranking pertama pengangguran yang tertinggi seluruh Indonesia. Jadi tertinggi ini disumbang dari sektor pertanian, mungkin sektor pertanian ini sepertinya belum bisa bergerak secara optimal, untuk itu butuh dukungan dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pertanian agar pengalokasian anggaran juga difokuskan di Provinsi Banten.

Persoalan yang lain saya kira dalam hal pertanian kita tahu bahwa tidak hanya di Banten mungkin. Sektor pertanian ini kita inikan rata-rata tadah hujan, terus juga masih kita ini musimnya itu ada dua musim. Nah, tentu ini juga harus benar-benar dilakukan kajian oleh Badan Litbang persoalan-persoalan tersebut dan mungkin alternative yang lain agar petani kita juga tidak nganggur dan tetap produktif dan mendapatkan nilai tentunya dari sisi tambahan. Nah, ini diperlukan mungkin inovasi-inovasi yang segar dan canggih agar tidak ada istilah petani kita itu berhenti dan tidak menghasilkan apa-apa, ini perlu pemikiran.

Saya juga ingin tahu juga ini ya, karena persoalan yang terjadi di perkebunan rakyat. Di masyarakat kita ini masih mengeluh persoalan seperti kualitas bibit yang masih rendah. Terus juga kondisi tanaman yang tua dan rusak, pupuk tanaman yang belum standart, pemeliharaan pengelolaann kebun yang belum intensif, dan sumber daya manusia serta kelembagaan petani masih lemah. Nah, strategi apa sih yang dilakukan oleh Dirjen Pangan atau Perkebunan untuk bisa menjawab terhadap persoalan yang ada.

Nah, untuk Dirjen Perkebunan Pangan khususnya. Ini kaitan KUR di Banten juga sepertinya belum berjalan. Apakah memang ini masih belum bisa dilakukan dan walaupun belum kapan kira-kira tenggat waktu yang disalurkan nanti oleh Kementerian Pertanian. Di samping itu kaitan dengan bibit padi, ini juga masih menjadi kendala bahwa petani kita sudah benar-benar melakukan upaya dari pembibitan akan tetapi ini masih kalah untuk distribusi bibit padi, ini rata-rata pembelian ini lewat e-catalog. Dan itu juga dijadikan persaingan yang tidak sehat, kenapa tidak setiap wilayah itu memiliki ataupun yang mereka lakukan, petani di daerah tersebut yang mereka lakukan untuk melakukan pembibitan itu bisa dimanfaatkan untuk petani daerah itu sendiri. Jadi jangan sampai petani sudah susah-susah melakukan pembibitan padi, akan tetapi masuk itu dari bibit padi yang dilakukan oleh e-catalog dengan persaingan yang tidak sehat. Ini juga mohon untuk bisa dievaluasi oleh Kementerian.

Untuk Irjen, saya berharap bahwa program yang sudah ada ini, ini harus benar-benar didampingi oleh Irjen agar kesalahan-kesalahan yang lalu ini tidak terulang kembali, seperti contoh persoalan pertanian ini masih saja kaitannya dengan masalah data dan program yang masih tumpang tindih dan tidak sinkron tentu ini juga harus menjadi evaluasi secara cermat oleh Irjen jangan sampai hal-hal yang kemarin itu terulang kembali.

Dan kami minta juga bahwa potensi-potensi besar per wilayah ini juga bisa disinkronkan pula melalui Litbang. Saya lihat disini bahwa tiap-tiap wilayah itu punya keunggulan dan jenis-jenis tanaman yang disampaikan apakah itu juga sudah sesuai dengan kajian Litbang sehingga muncul jenis-

jenis tanaman atau buah a, b, c, d. Intinya saya pribadi memberikan apresiasi atas komitmennya untuk melakukan swasembada pangan tinggal bagaimana niatan dan komitmennya ini dilakukan jangan hanya seperti mimpi di siang bolong. Semangatnya itu saja ya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ibu ini kok namanya penuh dua cahaya yang membawa kebahagiaan tetapi sangat memelas gitu loh menceritakan tentang kesedihan, pengangguran, kemiskinan, luar biasa. Insya allah mulai bulan depan seluruh gajinya akan diserahkan bagi kepentingan orang-orang nganggur.

Dan ada satu hal dalam dunia pertanian itu tidak bisa mengandalkan proyek tetapi harus hati. Karena hubungannya dengan sesuatu yang hidup, daun itu sensitive, pohon itu sensitive, bung aitu sensitive, buah itu sensitive, romantic kalau dikasih musik bisa berkembang dengan baik, kalau teriak-teriak, marah-marah terus disitu tidak akan tumbuh. Nah, saya yakin Ibu nanti malam sudan tegang, marah, teriak, tidak tumbuh lagi itu.

Untuk itu, diperlukan hati, jadi hatinya harus menyatu kalau kata orang Sunda Tsa, karena orang Jawa itu bisa kalimatnya Tso, jadi hatinya satu oleh Bapak Sutrisno, Su satu hati itu.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Sekjen, para Dirjen, para Kepala Badan dan jajaran.

Saya langsung kepada Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen Perkebunan. Saya coba lihat bukunya ini ada programnya, ini *ending*-nya, *outcome*-nya untuk....

KETUA RAPAT:

Mic-nya didekatkan Pak, kecil suaranya.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Jadi target ekspor 3 kali lipat. Sudah barang tentu sebagai wakil rakyat sangat mendukung karena manakala Dirjen Tanaman Pangan bisa ekspor hasil produksinya, artinya apa? ketahanan pangan negeri ini akan kuat. Kalau perkebunan akan ekspor berarti kita terjadi apa namanya pedagang yng

defisit ini bisa seimbang bahkan devisa kita juga bisa meningkat, ekonomi akan tumbuh. Tapi begitu saya coba lihat di anggarannya tanaman pangan 5,6 triliun dan 2,7 triliun pengadaan bibit. Kemudian Dirjen Perkebunan 1,5 triliun dan 776 atau 50% lebih juga untuk bibit.

Sedangkan bibit inikan tidak langsung menghasilkan, fakta dilapangan untuk Dirjen Tanaman Pangan bibit ada masalah bagaimana produktifitas bisa ditingkatkan. Rakyat ini sudah enggan menggunakan bibit Pemerintah. Persoalan apa? karena hasil produksi rakyat itu langsung dijadikan bibit, sehingga pada saat disemai hanya sebagian yang bisa ditanam. Di sisi lain bantuan bibit dari Bapak Dirjen itu tidak tepat sasaran, tidak dipakai, baik itu bibit padi maupun bibit jagung ini Bapak Inspektur Jenderal boleh dicatat ini. Kemarin sudah saya sampaikan rekamannya sama Bapak Ketua itu. Jadi bibit ini muter, karena tidak dipakai diambil lagi oleh oknum disebarakan lagi di kecamatan lain. Jadi yang harusnya 10 ton hanya 5 ton mungkin dibelinya. Artinya apa? bagaimana mungkin produktifitas bisa ditingkatkan. Saran saya tertibkan itu.

Kemudian Dirjen Perkebunan, pada umumnya tanaman perkebunan inikan berjangka panjang. Mana mungkin sekarang menyebarkan bibit besok akhir tahun bisa ekspor 3 kali lipat. Apalagi jenis tanaman itu sekarang ada masalah semuanya, bermasalah, fluktuatif harganya. Baru bangkit ini sawit baru bangkit sedikit, beberapa hari yang silam petani karet datang kesini, minta agar Pemerintah mengambil kebijakan untuk menyelamatkan harga karet. Kira-kira yang mana itu nanti yang akan mendorong ekspor itu.

Jadi saya sangat setuju dengan Bapak Fauzi, jadi sepertinya program ini rutinitas. Yang kemarin bibit, bibit juga peningkatan produksi produktifitas juga peremajaan bibit. Mestinya ada tanaman yang memang bisa didorong untuk bisa ekspor tahun ini, itu yang didorong dalam program kita. Waktunya sangat singkat, jadi singkat-singkat saja Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Kalau buat Bapak sampai jam 5 bertanya boleh Pak.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Baguslah kalau gitu.

Jadi yang diperlukan oleh masyarakat terutama pertanian dan perkebunan ini, itu bukan rakyat yang menghasilkan ekspor itu, pada umumnya pengusaha. Saya sangat setuju dengan Bapak Mindo itu. bagaimana kita meratakan mungkin yang akan mendorong nanti peningkatan pendapatan rakyat adalah tanaman porang. Karena porang ini tidak dikonsumsi, semuanya adalah pada umumnya produk ekspor. Oleh karena itu, usul saya termasuk juga Bapak Suhardi Duka agar diperluas ini pengembangan tanaman porang ini, apalagi juga harganya juga menjamin. Menurut Mbah kita ini petani porang di Madiun mobil truknya baru-baru. di Majalengka pun sedang dikembangkan.

Kemudian di Litbang, tugas Komisi IV DPR RI pastikan bagaimana meningkatkan produksi, bagaimana meningkatkan produktifitas. Salah satu variable yang akan mengungkit produksi dan produktifitas adalah bibit. Kaitan dengan tadi, rakyat sudah mulai menolak bibit Pemerintah. Kemudian sementara bibit unggulan yang dihasilkan oleh Litbang tidak kunjung tiba sampai kepada masyarakat. Saya jadi Bupati 10 tahun tidak pernah mendengar itu Pak, mana bibit unggulannya.

Oleh karena itu, pertanyaan saya bagaimana menyembuhkan ini, memperbaiki sikap rakyat yang sudah enggan menggunakan bibit itu. Di sisi lain bibit yang dihasilkan sendiri pun juga bisa tidak menghasilkan produksi, sehingga bibit yang dihasilkan oleh Litbang itu bisa sampai kepada rakyat. Persoalannya di rakyat ini RMB Pak, jadi tidak gampang, tidak gampang menawarkan rakyat menerima bibit-bibit baru, produk-produk baru karena RMB Pak, RMB (Rakyat Minta Bukti).

Oleh karena itu, sebelum diturunkan kepada rakyat di Demplotkan dulu Pak, dicoba dulu, BPP-BPP di kecamatan itu punya lahan itu, akan lebih baik menganggarkan kesana agar bibit-bibit baru itu diuji coba dulu. Setelah diuji coba hadirkan rakyatnya, baik bibitnya maupun teknologinya sehingga rakyat itu sudah pasti ada perubahan penggunaan bibit hasilnya pun juga akan lebih bagus.

Kemudian Presiden mendorong rakyatnya untuk mengembangkan inovasi, kreatifitas, entah apa yang disebutnya anak muda komunitasnya, apa disebutnya milenial. Di Majalengka ini komunitas anak muda itu menghasilkan bibit, bibit IF8 yang menjadi masalah di Banda Aceh. Jadi pemakainya malah diproses oleh penegak hukum. Jadi bibitnya IF8 itu adalah Indonesian Farmer, jadi petani Indonesia. Saya titip dapat pesanan dari mereka ini Pak, "tolong kami jangan jadikan lawan" katanya, "tolong kami difasilitasi hasil kami tolong diuji manakala baik tolong diberikan legalitas", karena sekarang mereka sedang lagi menguji coba lagi pakai IF16. Ini sangat luar biasa ini, kalau memang ingin berhasil tadi karena program milenial ya mereka-mereka yang seperti inilah yang sesungguhnya perlu difasilitasi.

Kemudian pertanyaan berikutnya, ini membantu Bapak Dirjen Perkebunan. Dari sekian banyak bibit yang akan dikembangkan kira-kira menurut Bapak, menurut hasil penelitian Bapak yang mana komunitas yang mana yang cepat mendukung ekspor ini. Jadi yang terjadi sekarang inikan hanya mengganti, menambah luas area, meremajakan, kira-kira mana yang pasarnya bagus, yang produksinya bagus. Saya kira ini perlu bantuan daripada Litbang ini.

Kemudian yang berikutnya, lahan pertanian sawah khususnya dari tahun ke tahun pasti berkurang. Tidak ada jalan lain untuk mempertahankan, meningkatkan produk dan produktifitas harus terus digali adanya varietas-varietas baru. Ini tentunya ada di Litbang, karena tanpa itu yang bisa mengurangi waktu tentunya mempersingkat panen tidak akan mungkin produksi kita bisa dipertahankan.

Yang terakhir Pak, mungkin saya akan sering berhubungan dengan Litbang karena saya pakai pola RMB (Rakyat Minta Bukti). Jadi segala sesuatu yang akan saya tawarkan kepada rakyat akan saya praktekan, hasilnya akan saya tawarkan kepada rakyat.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Semestinya kita ini memuji dari seluruh hasil pertanian ini, memuji cahaya, hamiduryasin, tapi Bapak Hamidnya tidak ada ya. Nah, tapi petani juga boleh dong kalau beli mutiara kalau hasilnya sudah banyak. Kan boleh petani kalau hasilnya sudah banyak, istrinya kaya beli mutiara. Silakan Ibu Luluk Hamidah, mutiara terindah.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Kenalkan nama Luluk itu mutiara artinya Ibu.

Terima kasih Pimpinan.

Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.

Bapak Sekjen dan semuanya timnya yang luar biasa.

Sabar ya Pak, tapi kalau Bapak Sekjen senyum saya lebih bahagia lagi.

KETUA RAPAT:

Ibu, Ibu kenapa itu kok Bahagia banget kenapa?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Karena saya yang tertekan kalau Bapak Sekjennya tidak tersenyum.

KETUA RAPAT:

Ibu, kenapa kelihatan bahagia banget sekarang, ada masalah apa Ibu?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Tidak ada masalah Pak, ada peristiwa apa itu yang benar.

Saya mungkin tidak tertuju kepada satu-satu kepada siapa, tetapi mungkin agak sedikit global. Antara lain yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan soal komoditas kita dari buah-buahan mungkin. Sebagai salah

satu negara tropical bahkan terbesar di dunia dengan kekuatan yang luar biasa kita ini dua terbesar setelah Brazil. Itu artinya Indonesia memang sebenarnya bisa menjadi *champion* di dunia yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan akan buah-buahan yang segar, yang enak, yang lezat, yang eksotis dan itu memang adanya di Indonesia.

Tapi memang sering sekali kemudian kita pikir kenapa sih di kita ini justru tidak sehebat Cina barangkali yang memiliki kemampuan untuk bis atau mengeksport buah-buahan sementara dari sisi ketersediaan apalagi dengan variasi yang berbeda itu justru kita punya. Nah, satu hal yang jadi pikiran saya juga bahwa sejak awal kita menyadari bahwa kita sebagai negeri tropis itu artinya panas matahari itu ada sepanjang tahun. bahwa kemampun buah kita untuk bisa disimpan yang tanpa adanya rekayasa itu pasti memang juga tidak bisa lama. Apakah ada sekarang ini satu upaya yang sangat serius untuk mengatasi persoalan ini, misalnya buah-buahan lokal kita dianggap tidak bisa bertahan lama. Kalau misalnya kita pasar-pasar yang berjajar itu buah-buahan itu pasti yang dipilih pembeli konsumen itu buah yang bagus, tapi ternyata buah yang bagus ini memang mau tidak mau itu impor. Sementara yang kemudian salak saja kemudian juga sudah mulai membusuk. Berapa hari kalau saya dikirim salak itu nyampe di kantor 2-3 hari itu sudah mulai lembeknya. Kemudian yang rambutan juga demikian, padahal itu semua buah yang saya suka.

Nah, kalau kondisinya seperti itu bagaimana kemudian kita bisa ekspor buah-buahan yang semacam ini. Nah, oleh karena itu yang namanya pengelolaan pasca panen menurut saya juga menjadi salah satu isu yang sangat penting untuk bisa didorong oleh Kementan. Seperti yang pernah saya sampaikan saya ketemu dengan beberapa petani, bukan mereka memang tidak ingin untuk bisa bergerak maju dari sekedar mereka tanam buah dan menjual buahnya begitu saja, tetapi mereka memang tidak tahu *what to do and how*.

Dan yang berikutnya adalah apakah fasilitasi itu memang bisa diberikan kepada mereka untuk bisa meningkatkan dari yang hulu dan hilirnya dan akhirnya kesejahteraannya bisa didapatkan. Bukan hanya sekedar buah sebenarnya, termasuk juga tanaman-tanaman yang lain bahkan termasuk bawang juga kayak begitu untuk bisa mengurangi bukan bawang putih, misalnya bawang merah. Saya bilang bawang merah bukan hanya bisa diolah menjadi bawang goreng dan lain-lain tetapi mungkin turunannya itu bisa kita temuin, misalnya bisa dijual, diekspor, dibentuk kalengan dan lain-lain, misalnya sambel bawang. Sambel bawang masih ada campurannya, misalnya sambel bawang plus teri, sambel bawang plus ikan dan lain-lain atau sambel bawang plus buah-buahan tertentu yang rasanya asem manis yang itu juga hanya ada di Indonesia. Saya kira peran pengembangan Litbang menjadi tumpuan kita kedepan.

Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, terutama Bapak Sekjen dan Bapak Dirjen. Terkait dengan regenerasi petani kita, petani milenial, saya mendengar misalnya di bulan apa itu akan ada kemah atau festival petani milenial. Ini sebenarnya petani yang baru dijadikan karena kita mau akan ada

perhelatan besar itu ataukah memang mereka itu sudah jadi petani milenial dan mereka juga aktif sebagai petani milenial. Itu seperti apa sih kegiatan mereka ataukah sebenarnya ini pinjaman saja dari pramuka atau dari sekolah terus kemudian kita kasih label itu dan seterusnya. Tetapi intinya sebenarnya kita sangat mendukung karena memang sangat penting bagaimana 10-15 tahun lagi kita tidak akan krisis petani. Saya setiap kali ketemu petani ya memang usianya sudah sepuh-sepuh, sudah senior, sementara yang muda itu tidak ada, karena memang lagi-lagi dianggap bahwa image dunia pertanian itu hanyalah diisi oleh orang tua, belepotan dengan lumpur, kemudian sengsara tidak bisa bikin kaya dan seterusnya. Padahal dunia pertanian itu bisa sangat luas sekali.

Nah, apakah cukup ini sosialisasi yang dilakukan bahwa pertanian itu bisa saja tentang manajemen pertanian, bisa pengolahan pertanian, bisa juga perdagangan sector pertanian dan seterusnya yang itu mungkin diminati oleh orang-orang muda. Itu pertanyaan saya tetapi juga sekaligus harapan itu, itu kode juga sih Bapak.

Nah, yang berikutnya terkait dengan infrastruktur ya. Kemarin mohon maaf karena tidak bisa melanjutkan ikut Rapat Dengar Pendapat, tetapi mungkin saya bisa titipkan disini meskipun Bapak Dirjennya juga tidak ada. Tetapi menyambung dari pertanyaan yang sudah-sudah bahwa dulu mungkin kita sangat bangga sekali bahwa apa saja ditanam juga bisa hidup, konon katanya air itu melimpah tapi kita coba tanya kepada petani kenapa kemudian hari ini semua petani merasakan bahwa problem utama mereka adalah air. *What's wrong* dengan itu semuanya, apakah memang system pengelolaan air kita tidak bagus ataukah irigasi kita memang sudah lama tidak dibangun. Di Sragen itu ada tani yang bilang bahwa 56 tahun terakhir tidak pernah ada pembangunan irigasi lagi. Bayangkan 56 tahun, berarti mulai sejak Soeharto sampai sekarang itu disana tidak ada pembangunan irigasi yang dilakukan di beberapa titik tertentu padahal mereka ini menjadi kekuatan lumbung padi nasional yang disumbang dari Jawa Tengah.

Nah, Bapak Sekjen dan juga Bapak Dirjen apakah ini juga akan menjadi prioritas kita untuk menggalakkan kembali. Saya setuju kalau ada ide tadi itu SKT berapa menteri itu, karena memang ketika ada pengajuan misalnya kayak sumur dalam tiba-tiba dibidang itu bukan ranah kita, itu harus ke PUPR. Sementara kita juga tidak berhubungan dengan PUPR, sehingga mau tidak mau akan kucing-kucingan, ya sudahlah kamu bikin sumur akan tetapi nanti geruknya yang dalam karena kalau sudah judulnya sumur harus dalam dia harus ijinnya ke tempat-tempat yang memang tidak tersentuh oleh petani.

Saya kira itu yang paling penting yang terakhir sekali, mungkin saya tidak jemu untuk mengingatkan bahwa baru saja kita menyepakati Indonesia-Australia comprehensive economic partnership agreement. Ini satu hal yang sangat serius karena apa? Karena hampir bisa dikatakan ini bukan hanya *apple to apple* atau salak to salah, karena memang sangat berbedanya jarak antara apa yang bisa dijual yang diekspor oleh Australia ke Indonesia dan apa yang kemudian bisa diekspor dari Indonesia ke Australia. Nah, ketika

kesempatan bea masuk itu 100% ke Australia apakah Kementerian Pertanian dalam hal ini sudah menyiapkan strategi apakah kemudian ini adalah menjadi momentum gitu untuk kita bisa memasukkan seluruh produk pertanian yang kita bisa punya meskipun juga kita hampir sadar Australia ini ternyata lebih unggul soal pertanian dengan kita. Karena kalau tidak begitu kan, tidak tahu lagi apa yang kemudian nilai kompetitif yang bisa kita jual kesana karena memang value-nya itu sangat berbeda.

Sekali lagi Bapak Dirjen, dan semuanya saya kira kita menunggu betul ini gebrakan yang bukan hanya slogan agar kita memang sangat bangga dengan pertanian kita.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Pencerahan yang sangat luar biasa, barangkali yang harus menjadi bahan pemikiran kita adalah membuat program terintegrasi dengan berbasis wilayah ini yang focus. Kalau misalnya kelompok bisnis Indomie karena memang pabriknya ada di tempat saya, itukan sudah punya mitra kerja itu bawang dari sini digorengnya disini petaninya, diangkutnya disini. Kemudian kayak kacang Suuk kalau orang Sunda bilang, makanya Sukro itu Suuk dijero kalau kata orang Sunda. Nah, itu juga harus mulai dibuat di wilayah mana itu *mapping*-nya. Jagung diwilayah mana sehingga dan bentuk program dari Pemerintah ke bawah hari inikan terlalu banyak juga tidak focus, tidak difokuskan kepada produk di wilayah tersebut sehingga integrasi ini harus dilakukan.

Barusan saya diskusi ada gagasan bagus juga disampaikan oleh lembaga konsumen, misalnya begini ketika mie instan laku dalam setiap hari itukan tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan petani karena impor gandum. Nah, mereka menyarankan bagaimana kalau misalnya Kementerian Pertanian itu kerja sama dengan Pemerintah Australia, kemudian sewa tanah disitu nanam gandum yang khusus gandumnya untuk kita untuk kepentingan Indonesia. Begitu juga bawang putih, kalau bawang putih tidak cukup produksinya negara di India kita tanah di India untuk ditanamin kalau memang tanah di dalam negeri tidak mencukupi. Kalau bisa seperti Bapak senior saya Bapak Sianipar tadi menyampaikan bisa disini saja.

Dan untuk melakukan itu kita dalam setiap hari perlu menyampaikan pujian yang tinggi, kebahagiaan yang tinggi, kesejahteraan tinggi dalam setiap waktu, dan ketinggian, kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, itu ada di Bapak Salim Fakhry.

Silakan Pak.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih.

Atas ijin Ketua, Bapak Ketua, karena tunggal yang memimpin karena mungkin Pimpinan lain ada kegiatan masing-masing.

Bapak Sekjen, Bapak Dirjen, rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI.

Sebenarnya Bapak Ketua sudah 3 hari Rapat Dengar Pendapat ini Pak Ketua, Pak Ketua mungkin hari ini berkesempatan. Kami inipun sudah pusing ini Pak Ketua, apalagi melihat Bapak Sekjen. Cuma hari ini Bapak Sekjen agak senyum-senyum Pak Ketua. Kalau Pak Sudin tadi kalau memimpin kadang-kadang strum naik Pak Ketua, sesuai menurut arus.

Saya begini saja Pak Sekjen, semua sudah apa ini kalau masalah anggaran tadi Bapak Irjen memang sedikit anggaran. Cuma ada masukan dari Bapak Mindo yang besar-besar itupun digarap Bapak Irjen, cetak sawah kita sepakat mungkin nanti atas melalui Pimpinan di kesimpulan nanti kita masukkan cetak-cetak sawah itu untuk rapat sekali lagi untuk dibawa data-datanya Bapak Ketua.

Selanjutnya khusus Dirjen Perkebunan Pak, maksud kami Pak, saya ini selalu berulang-ulang Pak, ujungnya yang 55 orang mitra Bapak ini kan ingin berperan, ingin membantu Bapak di Kementerian Pertanian. Contoh Pak, umpamanya Kopi Arabika yang di Aceh kan ada, bukan saya yang tentukan sudah Bapak alokasikan di Aceh Tengah Benar Meriah Gayo Luwes. Bapak lihat Pak, saya dari Aceh Dapil I daerah saya Gayo Luwes, yang Aceh Tengah dan Bener Meriah adalah wilayah Pak Khalid dan Bapak Muslim. Yang kita maksud Pak, kami semua bermaksud Pak, supaya kedepannya Bapak libatkan saya Pak, khusus Gayo Luwes. Bukan saya yang menentukan Bapak Sekjen mesti Gayo Luwes tidak, mungkin secara teknis Dirjen pun yang tahu dengan ketinggian begini yang cocok kopi, yang begini ini. Jadinya kalau sumber dana APBN ini Pak, kami ini numpang Pak. Kami numpang nama, numpang ngetop membantu Bapak. Yang selama ini tidak begitu Pak, Bapak masuk ke Gayo Luwes saya tidak tahu. Bantuan ini, ini bantuan dari Bapak Salim Fakhry ini, kan enak Pak. Kalau Bapak ikut Dirjen pun rapat satu hari, dua hari yang lalu mungkin Bapak Puyeng macam Bapak Sekjen.

Bapak Sekjen hari ini mungkin karena Bapak Dedi ini, Bapak Dedi ini Ketua saya ini Pak, dengan sejuk cara memimpin. Hari ini senyum Bapak Sekjen, karena tidak banyak tadi sudah dikode Bapak Sekjen jangan kencang-kencang kali bilangnyanya. Kalau kita ini Pak, saya pribadi kalau sudah jelas antara kita sama kita tidak ada kencang-kencang Pak. Tidak ada kita minta apa sama Bapak, tidak. Ini Pak, masalah coklat di Aceh Tenggara, Aceh Tenggara itu kampung kelahiran saya langsung Pak. Disitulah saya mendulang suara Pak, dengan pemilih 100 hari saya dapat suara 43 ribu Pak. Masa masuk coklat, kakao disana saya tidak tahu.

Di sini Pak, maksudnya kedepan bukan untuk saya saja Pak, untuk semua Anggota. Apa yang dibilag Bapak Dedi tadi, beliau di Purwakarta ya lain lah Pak, Anggota sama Pimpinan beda Pak, duduknya beda. Disini Pak, kalau daftar ini tidak masalah, kami rela ini Bapak Ketua. Kalau Pimpinan, namanya Pimpinan Cuma model sekarang ini Bapak Daniel beda Pimpinannya, harus rata sama Bapak. Cuma inipun Bapak Sekjen, mohon maaf ini namanya adil tidak berkeadilan. Adil semua dapat, berkeadilannya tidak ada sebab Pimpinan harus diatas. Kami setuju semua Pak, Cuma jangan Pimpinan 7 Anggota tidak ada, itu bahaya.

Masalah Litbang Pak, contoh tugas kita Pak ya, mungkin saya kurang paham Pak. Saya ambil ke Daerah Pemilihan saya Pak, Pak Dirjen TP tahu itu Pak, penghasil jagung daerah saya Pak, seluruh Aceh daerah saya. Sumatera Utara itu yang ada Tanah Karo itu kalah Pak, Cuma karena kurang promosi di sana bibitnya yang cocok pioneer 32 Pak. Ada bantuan selalu Bisi, saya kira ini Litbang Pak, Litbang kan sudah tahu di ketinggian berapa, kelembaban berapa, apa yang cocok. Ini nampaknya tidak begini Pak Ketua, kalau saya kontraktornya yang Bisi ya Bisi tidak peduli dengan keadaan di daerah. Coba ini kedepannya Pak, bolak balik saya cerita Bapak Irjen tadi Pak, tidak ada satu pun kit Rapat Dengar Pendapat Pak Ketua, yang mau kita tambahkan anggaran hanya Bapak Irjen Bapak Daniel. Entah doa apa yang dibuat Bapak Irjen habis setelah Sholat Istiqorah tadi malam ini. Semua mengajukan Bapak Irjen ini tambah.

Yang lain-lain Pak, itu di Aceh Tenggara Bapak Dirjen Perkebunan kakaonya sekarang penghasil kakao selain Pidi di Aceh Tenggara, Cuma sekarang sudah mati Pak. Ini penyakit apa Pak, kalau pun ada bantuan-bantuan bukan kami yang menentukan Pak Sekjen, Bapak-bapaklah yang menentukannya. Kemarin pun itu kita bahas Pak, jangan dari Bapak masuk ke daerah kami apa salahnya tanya kami Pak. Ini yang perlu Pak, beda dengan Bapak Dedi ini Pak, Bapak Dedi ini mungkin sekian kabupaten cuman, kalau saya 15 kabupaten Pak. Tidak mungkin semua kabupaten kita penuh Pak, Cuma ada skala prioritas Bapak Ketua. Masa suara kita 27 kita kasih traktor roda 4 kesana 3 biji itu sudah salah itu.

Kalau Bapak tidak kordinasikan dengan kami, memang ada bantuan aceh sekian, ini sekian, ini enak kalau tidak ada Bapak Sudin bisa tambah 3 menit Pak, kalau ada Pak Sudin harus tertib. Inilah enaknya Bapak Dedi sama Bapak Daniel. Cuma inipun jangan dilaporkan sama Bapak Sudin, nanti kena saya.

Jadinya kedepan itu Pak, masalah Litbang tadi bagaimana Pak. Apa yang cocok, macam di Aceh Tenggara itu Pak, Gayo Luwes Sriwangi luar biasa Pak, cuma tidak ada lagi masuk. Apa salahnya dikasih Pak, saya kira kalau Bapak Dirjen TP ini Pak Dedi, Pak Daniel saya tidak berani terlampau kencang-kencang sama Bapak Sekjen sebab banyak bantunya. Kita bocor-bocoran saja disini Pak, inikan Bapak Jamil ini senyum-senyum saja Pak, belum ada apapun. Cuma tidak apa-apa, Cuma Bapak Jamil ini kami sama-sama beliau ini orang Batak, bini saya orang Batak, saya juga harus jaga Bapak Jamil Pak.

Demikian saja Bapak Ketua.

Terima kasih.

Mohon maaf Pak, kalau disini tidak Bapak Sudin memang enak ini Pak, santai kita ini Pak. Disini kalau Bapak Sudin, kadang-kadang pusing kepala saya Pak.

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini sahabat saya orang Aceh yang sudah bergaya Jawa ini.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Ada beberapa pemikiran yang kemarin saya lontarkan hari ini saya lontarkan kembali sebagai bahan catatan. Problem bantuan Pemerintah itu kenapa sih tidak pernah kemudian menyentuh produktifitas. Itu karena pendekatan pemberiannya sangat structural itu menjadi problem. Saya berikan contoh misalnya peternakan. Kalau kita keliling kemana-mana orang beternak itu banyak, sapinya kecil-kecil, kurus-kurus. Nah, sebenarnya kan kita tinggal turun kesitu, ditanya, dituker sapinya. Jadi peternakan jatuh ke peternak.

Nah, misalnya di traktor kalau traktor itu pasti jatuhnya ke ketua kelompok, dipegang sama dia, turunnya susah. Saya memberikan saran, kalau ingin kita produktifitas pertanian meningkat dan bantuan Pemerintah terasa traktor itu pasti ada operatornya, operator itu kuli, sopir itu. Nah, kalau bantuan itu dikasih sama operator, operatornya tetap jalan, nyewa masyarakat nanti diskonnya turun, kalau 1 hektar 200 ribu turun 150 ribu itu terasa bantuannya dan pasti dipelihara karena itu kehidupan dia. Tetapi pasti ada problem si operatornya tidak bisa dapat bantuan, karena bukan ketua kelompok.

Kita bikin SK saja bahwa bantuan diturunkan pada operator, pada sopir angkot kalau Bahasa angkotnya itu untuk dikelola oleh dia, itu ekonominya akan meningkat, melayani dan masyarakat akan merasakan langsung dan akan didukung oleh lingkungannya. Kan masyarakat itu yang penting biaya sewa menurun, itu saja. Ini gagasan dibikin SK oleh Dinas Pertaniannya, ini oleh Kepala Desanya misalnya. Ini kalau ini dilakukan ini daya dukung merubah buruh menjadi tuan ini berhasil.

Seperti nanti perahu saya kemarin ngomong sama KKP, bantuan ke pengrajin itu selalu dikasih yang punya pabrik pindang bukan ke buruh. Nah, kita rubah buruhnya yang dikasih karena buruh sudah punya teknologi pengelolaan, punya pengetahuan. Ini yang harus kita rubah jadi budak, jadi tuan. Tetapi budak yang mengabdikan pada Allah itulah yang menjadi tujuan

hidup kita dan itu Rosulullah SAW itu punya Bapak yang mengabdikan kepada Allah namanya Abdullah.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASTIKAL M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen dan beserta jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya kira karena sudah mulai mendekati kesimpulan-kesimpulan, saya mau komentar sedikit tentang Maluku saja. Tadi bicara soal peternakan, di Maluku ada sekitar 100 sekian ribu ekor dan produksi daging sekitar 2000 ton lebih. Kita masih ada defisit kurang lebih sekitar 4000 ton itu kurang lebih sekitar 16 ribu ekor. Jadi bagaimana caranya itu agar 16 ribu ekor ini, jadi ini bukan bantuan langsung dari Kementerian. Tapi bagaimana caranya dari 100 sekian ribu ekor itu bisa ada penambahan sekitar 16 ribu ekor. Pikiran saya bahwa sebenarnya sapi-sapi yang ada disana itu harus diinventarisir mendapatkan kandang yang baik dan mendapatkan pakan yang baik.

Dan yang kedua, itu harus dicegah jangan sampai ada penjualan sapi betina keluar, kalau kita mau mempertahankan produksi sapi di setiap daerah, saya kira ini cukup sangat penting. Kalau kita bicara lebih luas susah, jadi lebih kita ke masing-masing daerah. Jadi saya usul kalau di Maluku ya silakan saja bantuan tapi lebih difokuskan untuk kandang dan pakan. Karena sapi ini bukan milik petani kecil tapi juga milik pengusaha, kalau milik pengusaha silakan saja, tapi milik petani kecil saya kira ini harus menjadi perhatian.

Lalu yang kedua soal sawah, soal padi. Di Maluku itu tidak kalah, kurang lebih ada sekitar 23 ribu hektar dan setiap tahun itu kalau tidak salah tahun 2019 kita 79 ton. Sedangkan diprediksi untuk 2020 itu sekitar 94 ribu ton. Konsumsi di Maluku itu kurang lebih ada 190 sampai 200 ribu ton, sehingga kekurangan kurang lebih sekitar 100 ribu ton. Bagaimana caranya dari Kementerian itu agar peningkatan. Salah satu peningkatan itu adalah infrastruktur, tadi ada yang disampaikan bahwa ada sawah primer, sekunder dan tersier. Kalau memang untuk primer memang dulu pernah ada janji Bapak Menteri yang dulu untuk memberikan satu irigasi di Maluku Tengah. Terlepas dari itu banyak juga yang pencetakan sawah baru yang sudah berapa tahun yang lalu. Sejak saya dulu pada saat jadi Bupati tetapi saya tidak ngerti itu kira-kira sampai dimana, tapi menurut saya di sana irigasi yang masih belum artinya belum bisa memenuhi itu kegiatan-kegiatan perairan sawah. Usulan saya mudah-mudahan saluran tersier disana artinya diperbaiki. Saya juga data belum jelas, mudah-mudahan nanti dari petugas yang ada disana penyuluh atau dinas mungkin akan memberikan data.

Yang kedua, ini soal benih. Kalau tidak salah bukan bidang saya, tapi dulu istilahnya itu F1. Kalau kita selalu F1 itu makasihnya juga pasti cukup banyak. Jadi untuk peningkatan di samping peralatan, pupuk dan saya kira ini

benih. Jadi mungkin benih juga bisa diperbaiki, di sana Cuma 5-6 ton kalau benih yang bagus kita bisa dapat 8 ton itu berarti kita sudah mulai menambahkan pendapatan petani yang ada disana.

Lalu yang tadi disampaikan soal peralatan, saya sepakat itu. Karena biasa kalau turun ke kelompok tani, dan biasanya kelompok tani itu yang bosnya. Petani adalah masyarakat kecil, coba dicari solusinya seperti apa supaya bisa mengena. Tapi yang penting sekali bersyukur bahwa sudah ada perhatian Pemerintah, namun masih jauh karena kami anggap bahwa memang keuangan negara itu bisa untuk membelanjakan semuanya.

Lalu yang ketiga, ini soal stunting. Stunting ini bukan hal yang baru, tapi saya kira di Indonesia mungkin makanan pokok itu bukan nasi, bukan beras, ubi, ketela, semuanya Maluku itu adalah sagu. Disini ada ubi jalar, di sana ada jagung, saya pernah sampaikan bahwa kenapa kita tidak meningkatkan kearifan lokal. Kearifan lokal artinya begini, saya pernah sampaikan bahwa kenapa tidak ada satu aturan yang dapat menjadi aturan bahwa hari Jumat, Sabtu atau hari apa saja diwajibkan itu makan konsumsi yang sifatnya kearifan lokal tergantung dari daerah. Saya pernah usulkan tapi rupanya belum ada yang pikirannya belum ada kesana. Tapi nyatanya di dalam anggaran ini ada ubi jalar dan ada yang lain-lain, saya kira ini bisa. Kemarin itu ada kekurangan gizi ya. Setelah saya pelajari sebenarnya dulu tidak pernah ada kekurangan gizi karena ada kearifan lokalnya, ada ubi, ada jagung, ada lain-lain. Tapi setelah dibiasakan makan nasi, pada saat tidak punya uang maka terjadilah gizi buruk. Nah, ini mungkin pertama bagaimana cara kita harus lindungi masyarakat. Kita bicara soal ekspor, bicara soal impor, tapi dasarnya itu ada pada desa atau ada pada hilir.

Lalu mungkin yang terakhir, untuk Bapak Dirjen, Bapak Sekjen dan jajarannya. Saya kira jelas dan saya juga pernah katakan bahwa Eropa jajah Indonesia itu karena rempah-rempah. Dan rempah-rempah itu ada dimana? Ada di Maluku. Tadi disampaikan oleh Pimpinan juga bahwa kita punya wilayah pesisir yang cukup luas, kelapa itu ditanam dimana saja, itu pasti tumbuh. Juga cengkeh, saya sudah mulai cengkeh di Maluku juga sudah berkurang, saya kira untuk bibit cengkeh, pala, mungkin kelapa saya minta juga untuk ditingkatkan. Karena yang ada di Jawa, Sumatera dan lain-lain itu tidak ada di Maluku. Tapi yang ada di Maluku pasti ada di Jawa, sehingga kita juga bukan soal itu, kita minta untuk kalau bisa ada ya minimal ada perhatian-perhatian untuk kepentingan-kepentingan Maluku.

Pimpinan, terima kasih Pimpinan, hari ini sejuik ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bukan sejuik lagi ini, adem, bahagia, ini rapat ya begini pada senang Kementerian rapat di sini.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sedikit Ketua, apa masih bisa Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sedikit saja, ini untuk kepentingan bersama.

KETUA RAPAT:

Kalau buat Bapak Salim Fakhry apa yang tidak saya berikan.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Baik, Ketua ijin.

KETUA RAPAT:

Cuma satu saja, jangan minta jabatan di Purwakarta.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Saya inipun Bapak Daniel barusan di WA Bapak Sudin. Mungkin WA tadi tidak aktif, langsung ke saya ataupun saya memang lagi dipercaya sama Bapak Sudin.

Jadinya begini Pak, khusus Bapak Sekjen, Bapak Dirjen, ini kita kan sayub-sayub semuanya ini Pak, sudah tenang semua. Dirjen PSP tidak disini Pakm, melalui Bapak Sekjen ini pesanan Bapak Ketua tadi Pak. Pak Dorori tanya tadi apa pesan Ketua, saya tidak kasih WA ini Pak. Kalau saya tidak salah ini Pak, ini data dukungan dari Dapil, apakah salah ketik atau salah apa Pak. Yang ketiknya ini ada benarnya ini Pak, sudah mantap usulan orang tua kita Bapak Mindo kemarin. Ini Bapak Sudin lagi, ini masalah di kolom berapa, traktor roda 4 kemarin 10 ini sudah jadi 6 Pak, apa salah ketik Pak? Dirubah atau bagaimana Pak? Kemarin 10 kan Pak, 10 ini kok jadi 6. Maksudnya supaya *clear*, sekedar mengingatkan Bapak Sekjen Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Bapak Sekjen sudah bilang ke saya, karena rapatnya adem jadi 16 Pak.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Lebih baik Pak, termasuk ini yang roda 2 Pak, setelah dikali-kalikan Pak Darori rupanya ahli kali-kali Mantan Dirjen. Ini kok 35 kalau dihitung-

hitung 62, kalau memang fifty-fifty Pak, Cuma mungkin saya salah Pak, ini sekedar masukan.

KETUA RAPAT:

Oh itu, sudah ngomong Bapak Sekjen kepada saya itu 85 itu. Itu salah Pak, bulletin.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Memang Bapak Ketua, bijaksana ini Pak, luar biasa.

Rekan-rekan kita tepuk tangan dulu sama Bapak Ketua.

Terima kasih.

Ini saja saran Pak, coba dikoreksi lagi Bapak Sekjen, supaya ketika Rapat Kerja nanti tekan menekan Pak, saya ini hanya menyampaikan Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, cukup?

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Cukup Pak Ketua, itu saja.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak Daniel silakan.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Sebelum Pimpinan di depan, saya setengah menit sebelum Pimpinan.

Saya hanya mau menambahkan tadi Bapak Abdullah itu, kalau tidak salah saya waktu itu kunjungan kerja 2007 ke Maluku. Itu mereka laporkan Raskin itu untuk 2 kabupaten waktu itu mereka tidak terima beras, mereka minta umbi-umbian waktu itu. Jadi saya mau menguatkan saja, jadi dalam penetapan bantuan-bantuan tadi itu diperhatikan di daerah timur sana lebih banyak kearah situ ya, ke Papua, ke Maluku. Itu pernah terjadi seperti itu, mereka menolak beras, dua kabupaten dan menerima ubi jalar waktu itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak Daniel memberikan pendalaman.

Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Terima kasih.

Pak, saya Cuma ingin mengingatkan ya, karena banyak masukan saat ini stok gula itu mulai kritis. Jangan sampai nanti kita sudah direpotkan oleh bawang putih saat ini. Terus bawang putih belum selesai, harga gula juga melonjak tinggi. Jadi mohon diperhatikan itu menjadi bahan masukan yang harus diamilantisipasi oleh Pemerintah.

Terakhir ini hanya usul saja sih, mungkin kalau teman-teman setuju yang ini biar Pemerintah memberikan jawaban tertulis, biar kita tidak terlalu sampai malam. Tetapi dengan catatan apa yang disampaikan oleh Bapak Salim, bukan hanya direspon diwujudkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Jadi eselon I dengan honor yang memadai, jadi Anggota DPR RI dengan honor memadai, pulang jam 24.00 WIB pagi-pagi sudah berangkat lagi, terus hidup nikmatnya kapan. Iyakan, tegang-tegangan, ujung-ujungnya itu-itu juga. Betul kan, sekarang gini saja deh, tidak usah rapat terlalu sampai malam kita santai pulang ke rumah, istri senyum terus makan tidur enak, besok berangkat lagi. Wah pokoknya hidup ini bahagia deh, di jawab ini, dijawab langsung sama tertulis juga hasilnya itu-itu juga. Kan yang penting tadikan roda 4 jadi 16, roda 4 tadinya 6 jadi 16 iya kan, terus itu yang tadi 35 salah tulis jadi 85, sudah tidak dijawab juga tidak apa-apa.

Setuju tidak?

(RAPAT: SETUJU)

Bijaksana saja Pak, hidup ini ngapain sih kita ribut-ribut ngeributin yang tidak jelas. Sudah nantinya dijawab tertulis saja, setuju tidak? Setuju. Pulang malam ngapain, pulang jam 10. Eh, saya kalau punya bini pulang 1 terus ganti saya. Tiap malam punya bini DPR RI pulang jam 1 terus mending yang umur 23.

Bapak Sekjen, disepakati ya jawab tertulis. Bapak setuju tidak? Bapak jawab lisan sampai jam 24 WIB, emang saya tidak berani.

.....:

Mesin tanam padinya belum Ketua, mesin tanam padinya disini 3.

KETUA RAPAT:

Pokoknya begini, Bapak pilih rapat sampai Subuh, pilih tutasin sekarang.

Terima kasih.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Ijin Bapak Ketua, saya kira Bapak Ketua, Bapak Sekjen itu bijaksana Pak. Kalau sudah Sekjen dan Dirjen ini sepakat saya kira Bapak Menteri pun orang Aceh bilang “hana masalah Pak”. Ini kesempatan Pak, Pak Sudin belum masuk lagi nunggu diruangan, nanti takut kita sambung lagi Pak.

KETUA RAPAT:

Gak ada, Pak Sudin lagi ke Semarang sudah naik pesawat. Takut juga sama Sudin.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Baik.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Saran dan masukan sangat baik dan untuk yang terakhir dari sahabat dan senior saya Bapak Salim Fakhry. Saya akan sampaikan ke Dirjen PSP nanti dicek lagi, *insya Allah* akan saya laporkan kepada Pimpinan. Barangkali demikian.

KETUA RAPAT:

Baik, Ibu usul lagi. Ibu tidak menghargai saya harus pulang.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Di jalan yang benar dan untuk tujuan yang benar. Tapi jelas kan Pak, sudah jelas kok.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, mau interupsi apa, jangan melamun saja. Tadi ngelamun saja, urusan jabatan Allah yang mengatur, ngapain sih.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ini antara gula dan racun ini.

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Bapak Sekjen dan juga beserta Dirjen-dirjen yang paling saya banggakan dan saya cintai dan saya sayangi.

Pak Sekjen, ini sudah hari yang ketiga kita bertemu dan *insya Allah* juga hasil rapat dari 3 hari ini memberikan manfaat yang besar bagi kita seluruh di khususnya Dapil-dapil yang ada di Komisi IV DPR RI dan terutama adalah seluruh rakyat Indonesia, *insya Allah*.

Saya tadi menangkap dari Pimpinan saya bahwa bawang putih sudah selesai, gula juga sudah mulai berkurang dipasar. Ini bukan hal main juga Pak, tentunya ini juga harus menjadi atensi. Seperti rapat yang terdahulu bulan Oktober tahun lalu. Saya ingin bagaimana Kementerian Pertanian ini punya atensi dan program khusus bagi setiap-setiap provinsi ataupun juga kabupaten kota yang mempunyai keunggulan pertanian. Kenapa memang harus begitu? Karena kadang kita mau memaksakan kehendak juga mau tanam padi di daerah saya juga susah gitu, tidak bisa. Ya di Karawang misalkan seperti itu, di Sragen atau yang tidak ada air dan sebagainya. Jadi kami itu Pak, mohon maaf kami di daerah timur tidak makan beras juga tidak mati.

KETUA RAPAT:

Kita di barat juga tidak makan beras, makan nasi.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Nasi, maksudnya nasi, *sorry*. Tapi kita punya sagu, sagu juga bisa menjadi produk andalan untuk kita ekspor juga gitu loh di Korea, di Jepang, di Brunei misalkan seperti itu. Belilah produk-produk andalan itu, di Brunei juga seperti itu.

Jadi ini Pak, Bapak mau kasih bibit padi ke saya juga, saya mau turun kesana jagung pun sama Pak, tidak akan juga berhasil seperti itu. Terus kami juga tadi seperti kata Bapak Abdullah, kita punya cengkeh, kita punya pala, kita juga punya penghasil coklat juga. Tapi Pak, selama ini hasil cengkeh juga kita jual ke Surabaya. Kenapa kita tidak bisa diberikan bantuan dari Kementerian untuk industri kelapa, industri pala, industri cengkeh. Iya tahu Pak, maksudnya inikan untuk memperhatikan inikan bisa lintas kementerian juga. Untuk memperhatikan petani yang ada di provinsi-provinsi kita masing-masing seperti itu.

Bapak mau kasih saya banyak-banyak benih yang ada disana saja sudah tidak mampu Pak, seperti itu misalkan. Pala yang sudah hasilnya seperti itu padahal sejarahnya republik ini dijajah juga karena itu. VOC datang, datangnya bukan di Jawa ini, datang langsung kesana. Carilah itu di Pulau Banda sana, pala, rempah, rempah inikan hasil bumi kita yang harus kita kelola dan harus kita pertahankan dan juga menjadi andalan dari Republik Indonesia. Jangan kayak sekarang, kayak di Brunei saja sudah produk andalannya sagu, pangan nasionalnya sagu. Padahal kita sagu disana Pak,

saya juga ini pemakan kalau sagu dimasak itu namanya Papeda, namanya Papeda semua sama tapi di Sulawesi Tenggara beda namanya, di Sulawesi Selatan beda juga namanya.

Jadi tolonglah ada atensi yang lebih besar lagi untuk keunggulan-keunggulan produk atau pangan yang ada di Provinsi masing-masing misalkan seperti itu Pak. Pangan lokal yang bisa di-*publish* dan bisa dikelola dengan baik dan bisa diekspor *Alhamdulillah*, misalkan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan saya dari kemarin kan sebenarnya ini tapi karena Ketua saya sudah begitu Kang Dedi inikan Ketua saya, jadi kalau dia sudah begini-begini saya pusing juga gitu. Jadi apa yang disampaikan, Kang Dedi tolonglah segera di *insya allah* apalagi Pimpinan kita berdua.

Itu saja tidak banyak-banyak.

KETUA RAPAT:

Cukup, terima kasih.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih kita doakan terpilih lagi jadi Ketua DPD.

Terima kasih, aamiin.

Kan jawabannya tertulis, kita kesimpulan.

Silakan layar monitornya dibuka.

Bapak mau bertanya tidak?

F-PDIP (RIEZY APRILIA, S.H., M.H.):

Saya mau interupsi dong.

Pertama, mumpung ingat tadi menguatkan apa yang disampaikan Gus Adi tadi bahwa ini juga buat teman-teman yang kemarin ke Jogja terkait antrax. Memang penting banget gitu, hari ini Pak Badan Karantina memang juga tolong atensinya kehadiran negara sangat diperlukan juga hari ini untuk terkait itu.

Terus kedua, kalau saya pribadi percayalah bahwa kami disini ini hanya juga perpanjangan untuk namanya kami wakil rakyat demi kebaikan masyarakat semualah. Jadi saya yakin kedepannya kita bisa bermitra lebih baik lagi pada hari ini. Saya kan dari kemarin inginnya senyumlah Bapak-

bapak jangan tegang, Bapak tegang ya kita sih perempuan senang-senang saja tapi kan bagaimana. Maksudnya tadi barusan Ibu Nur bilang....

KETUA RAPAT:

Ibu masih menemukan yang tegang kalau dirumah? *Alhamdulillah.*

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Masalahnya tadi Ibu Nur kram otak katanya. Jadi harapannya kita semua bisa bermitra dengan baik demi masyarakat Indonesia kedepan supaya juga apapun program percayalah kami juga kepengen membantu masyarakat bukan buat diri kami sendiri.

Itu dari saya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, sekedar untuk bahan kordinasi dengan Kemenpan dan Kemendagri. Problem kordinasi pusat, daerah itu diantaranya di kelembagaan. Misalnya di daerah pertanian tanaman pangan, peternakan gabung lagi sama perikanan. Sehingga kalau turun dana DAK untuk peternakan tidak bisa, karena kelembagaan disisinya pertanian. Segera menurut saya saran untuk segera kordinasi agar sudah dibuat apa biar cepat kelembagaannya disempurnakan harus sama, karena nanti jadi problem dalam distribusi bantuan itu. Ini mengingatkan ya, kita ini ingin punya program yang melaksanakan daerah tetapi kelembagaanya tidak sinkron. Ini harus menjadi focus kita.

Selanjutnya kita mengarah kepada, sudah siap belum? Disempurnakan sambil jalan, bacakan satu-satu. Ini kesimpulannya nanti kita sempurnakan bersama.

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar seluruh komoditas pertanian yang diimpor wajib mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

Setuju tidak ini?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak Sekjen setuju ya? Sudah barusan.

Ya, Bapak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Mohon ijin, kadang-kadang kita berbicara komoditas pertanian juga termasuk didalamnya produk turunannya. Apa perlu komoditas pertanian dan produk turunannya. Baik, cukup ini.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Saya kira mungkin bagus juga itu, supaya tidak hanya produk primernya ya dan turunannya boleh ditambahkan.

KETUA RAPAT:

Boleh dimasukkan saja, produk pertanian dan turunannya. Berarti sampai anak cucu itu. Oke, ditambah lagi “produk pertanian dan turunannya”.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengutamakan peningkatan produksi komoditas pertanian untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui pengembangan benih yang memiliki produktifitas yang tinggi guna mengurangi ketergantungan negara pada komoditas pertanian kebutuhan impor.

Setuju tidak?

Bahkan Kementan ini namanya harus diubah ke depan, Kementerian Produksi Pertanian, iya agar berproduksi.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Itukan bukan hanya dengan pengembangan benih, nah itu berarti masih koma, “pengembangan benih....” terus kemudian pemenuhan sarana, prasarana yang memadai.

KETUA RAPAT:

Pengembangan benih dan pemenuhan sarana produksi yang memadai.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Iya.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Yang “melalui pengembangan benih yang memiliki produktifitas tinggi dan sarana dan prasarana lainnya”. Cukup, guna sudah tidak usah kan.

KEPALA BADAN LITBAG PERTANIAN (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M.Si.):

Boleh ijin Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Boleh, lanjut.

KEPALA BADAN LITBAG PERTANIAN (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M.Si.):

Ijin Bapak Sekjen dan Bapak Ketua.

Kalau bisa ditambahkan terkait dengan hilirisasi Pak Ketua, karena yang produksi kita sudah sering meningkatkan tetapi hilirisasi pasca panennya yang jarang kita sentuh.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.M.):

Jadi ditambahnya dimana ini? “serta, sarana prasana lainnya, serta hilirisasi”. Sudah cukup ya? “hilirisasi hasil pertanian”. Untuk mengurangnya masih perlu? Oke.

Nah, ini yang memiliki produktifitas tinggi, kaya “yang” dikurangi terlalu banyak kata “yang” juga kurang baik ya Pak Pimpinan. Terlalu banyak “yang” juga.

KETUA RAPAT:

Bahasanya disederhanakan, “yang” jangan terlalu banyak karena memang ada yang jarang dipanggil “yang”.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Ketergantungan negaranya tidak usahlah, “untuk mengurangi ketergantungan pada...” negaranya buang, “...impor komoditas pertanian”. Oke, baik.

KETUA RAPAT:

Oke, sepakat?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah segera menyerahkan data Kredit Usaha Rakyat, baik jumlah alokasi penerima KUR, maupun lokasi penerima KUR paling lambat 2 hari setelah Rapat Dengar Pendapat ini.

Setuju tidak 2 hari?

Bapak ada datanya 2 hari tinggal diprint.

(RAPAT: SETUJU)

Hari Senin itu pura-puranya, nanti diterimanya hari Selasa.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian menggunakan dana Badan Pengelola....

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, jadi ini karena ini adalah hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat ini adalah hasil kesimpulan dokumen negara. Kalau memang paling lambat, point 3 Ketua, paling lambat 2 hari mungkin masa kerja atau mungkin 3 hari atau 4 hari.

KETUA RAPAT:

2 hari kerja.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Iya masa kerja.

KETUA RAPAT:

2 hari masa kerja, sudah ya. Jadi besok hari Senin ya.

Oke, jangan tegang-tegang, karena ada yang dirumahnya tidak punya tegang.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit atau BPDPKS dalam meningkatkan produksi melalui kegiatan peremajaan sawit rakyat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan realokasi anggaran komoditas kepala sawit kepada pengembangan komoditas perkebunan lainnya.

Setuju?

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Sebentar Ketua, itu kita lihat dulu waktu diambil uang itu, itu tujuannya untuk apa, kan begitu. Tidak bisa forum kita ini menyimpang dari apa rencananya waktu penarikan itu. Jadi kalau kita minta ada khusus pengembangan komoditas lainnya bisa kita tetapkan tanpa harus mengaitkan dengan dana PKS ini. Itu menurut saya.

KETUA RAPAT:

Oke, silakan dijelaskan.

DIRJEN PERKEBUNAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Ijin Pimpinan dan Anggota.

Jadi sesungguhnya di dalam peraturan perundangan melalui Permentan sudah di-*state* ada 5 macam. Salah satunya adalah peremajaan, jadi tidak diminta pun harus karena sudah ada aturannya. Dan kemudian selain itu ada bio diesel, ada *capacity building*, ada riset, ada promosi Pak. Jadi ada 5 macam ini yang dibiayai oleh....

KETUA RAPAT:

Yang tadi jadi bahan kita inikan paling banyak terserap oleh bio diesel. Nah, bio diesel inikan diselenggarakan oleh mbah-mbah yang besar ya. Para petaninya itukan kecil banget dapatnya. Tinggal pertanyaannya adalah boleh tidak realokasikanya itu tidak hanya untuk komoditas sawit, komoditas yang lainnya. Itu saja pertanyaannya, kopi bisa tidak.

DIRJEN PERKEBUNAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Kalau secar prinsip tidak akan bisa, karena memang pungutannya dari sawit. Nanti itu ada rencana sendiri Bapak Pimpinan dan Anggota kami sampaikan rencana tapi belum dieksekusi. Itu selain daripada kelapa sawit yang sudah kita rencanakan adalah kopi, kakao, skemanya sama dengan PPDP.

KETUA RAPAT:

Kalimat ini boleh tidak?

DIRJEN PERKEBUNAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Kenapa?

KETUA RAPAT:

Kalimat ini boleh menurut Bapak?

DIRJEN PERKEBUNAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Kalimat ini menurut saya tekanannya justru memperbesar, karena porsinya peremajaan itu lebih kecil dibandingkan bio diesel. Itu yang kami tekankan Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau begitu penekanannya dirubah. Jadi begini, selama ini penyerapan iurannya, pembiayaannya itukan untuk bio diesel ya kan, paling besar kan. Dan kemudian penyerapannya juga paling cepat, paling mudah. Tapi yang menikmati itu adalah kelompok besar lagi.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Ya, sesuai Undang-Undang Perkebunan sebenarnya prioritasnya itu ada di kebun rakyat bukan di bio diesel. Tolong dicermati ini dari Kementerian, kalau tidak ini bisa melanggar Undang-Undang.

Terima kasih.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Lewat Ketua, saya mau menanyakan dana pungut sawit ini memang mungkin dari awalnya pikirnya untuk peremajaan. Kemudian kalau diremajakan diproduksi banyak terus mau dikemanakan minyak sawit, kan begitu. Timbullah gagasan bagaimana dia mengganti bahan bakar yang adri *crude oil* dibutuhkan bio diesel. Menurut anggapan saya, uang yang ada itu dipakai sejauh mengembangkan, meneliti, merubah CPO menjadi bio diesel, bukan untuk memproduksi bio dieselnnya.

Anggaran untuk merubah itu untuk dibagian pengembangan penelitian pengembangan itu pasti besar. itu ratusan miliar dibutuhkan untuk membuat katalis merah putih itu, besar. Nah, memang wajar kalau uang pungutan itu dipakai kesitu, sehingga nanti sewaktu ini sudah bio dieselnnya jalan seluruh produksi CPO Indonesia, perusahaan maupun perkebunan raktat itu bisa *offshore* oleh Indonesia tanpa meletakkan harapannya keluar negeri. Saya kira dalam kaitan itu

Nah, tetapi yang ingin disampaikan teman-teman juga adalah kana da anggaran APBN untuk sawit diluar biaya pungutan biaya pungutan sawit itu. Yang diminta adalah sebahagian dari APBN untuk pemerajaan sawit diluar dari pungutan itu sumbernya diberikan untuk yang lain. Begitu toh.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Saya ingin memperjelas saja, ini rasanya sih memperjelas bahwa karena peremajaan sawit sudah diatasi oleh Badan, sehingga di dalam anggaran pertanian jangan terlalu banyak focus sawit untuk kmoditas lain. Tetapi pada saat yang sama kita meminta Kementerian Pertanian memastikan badan menjalankan salah satu fungsi utama berdirinya badan adalah untuk mensupport petani sawit. Karena seingat saya tujuan dari badan itu ada 7 itu fungsinya, semua tidak jalan ketujuh-tujungnya apalagi dalam penguatan petani sawit, hampir seluruh anggaran itu adalah untuk mensubsidi bio diesel yang kasnya itu masuk kepada 5 perusahaan besar.

Jadi intinya seperti ini, agar pertama badan menjalankan fungsi lainnya khususnya untuk penguatan petani sawit. Sehingga anggaran di badan bisa lebih banyak untuk petani sawit. Karena untuk petani sawit sudah diatasi oleh badan sehingga anggaran diperkebunan di Departemen Pertanian jangan ke sawit lagi tetapi untuk mensupport perkebunan yang lain.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih.

Masih terkait dengan poin 4, ini usulan ya. Kalau misalnya BPDPKS dalam meningkatkan produksi melalui kegiatan peremajaan sawit dan turunannya. Waktu itu kita pernah Rapat Dengar Pendapat, ada satu persoalan yang sangat serius ternyata kita ini hanya punya kemampuan sedikit saja dari sawit itu yang dihasilkan, bio diesel iya salah satunya. Akan tetapi kemudian juga CPO paling banter itu. Padahal ternyata dari sawit itu bisa dihasilkan sekian banyak produk turunan itu. Nah, ini mestinya bisa kita dorong untuk kesitu, jadi bukan hanya peremajaannya saja tetapi peremajaan sawit rakyat dan produk turunannya.

KETUA RAPAT:

Itu saja?

Baik, terima kasih.

DIRJEN PERKEBUNAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, dikira Anggota.

DIRJEN PERKEBUNAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Terima kasih.

Kami laporkan sesungguhnya kita sudah tidak menganggarkan untuk sawit, memang sudah kita alokasikan, karena semua sudah di alokasi dari BPDPKS Pak. Saya setuju sekali tadi usulan Ibu Luluk itu.

KETUA RAPAT:

Tinggal redaksionalnya botulin saja deh. Nah, kemudian kalau yang untuk diserap oleh kelompok-kelompok sawit besar itu untuk bio diesel itu

apakah produktifitas dari hasil serapannya itu nampaknya tidak, sesuai tidak dengan nilai uang yang diserap dengan produksi yang sesuai dengan harapan tadi disampaikan Pak Mindo tadi.

DIRJEN PERKEBUNAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Dari perspektif bio diesel kami laporkan betul sekali, kita sebenarnya sudah pada posisi B30. Kalau hitung-hitungan ESDM, Kementerian ESDM kalau B30 di eksekusi itu sudah tidak mengimpor solar, itu sudah kami impor apalagi kalau kita tingkatkan. Ke depan karena kita produksinya luar biasa jumlahnya maka kedepan pun kita nanti akhirnya bisa menjadi industry bio diesel yang bisa kita ekspor. Itu yang akan menjadi ini, karena dalam negeri untuk industry konsumsi sangat mencukupi dari CPO kita. Produksi kita tahun 2018 sudah 46 dengan kernelnya, CPO-nya 40 itunya 6 juta to, kernelnya sehingga berlimpah Pak.

Saya setuju sekali tadi disinggung mengenai produk turunan itu, supaaay BPDP juga konsen terhadap produk-produk turunan yang luar biasa. Ada oil kimia, ada macam-macam Pak, pakan ternak dan seterusnya.

KETUA RAPAT:

Yang terpenting kan fokusnya adalah agar sawit rakyat ini mendapat perhatian yang besar sesuai dengan perintah Undang-Undang, intinya itu saja kan. Ya, sudah dimasukkan, kalimatnya ini setuju tidak?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

“Porsi yang lebih besar”, tidak usah.

Pak Ketua, mohon maaf sedikit lagi, karena saya pernah di SDM. Kenapa tidak ada komponen peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan petani. Jadi “serta produk turunannya, dan peningkatan kapasitas petani dan kelembagaannya”.

KETUA RAPAT:

Pak Momon itu memang sayang sama petani itu. Lembut, tenang, tidak pernah kelihatan marah kalau disini, tidak tahu kalau dikantornya.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan realokasi anggaran komunitas perkebunan yang berlebihan dan dinilai kurang berhasil komunitas lainnya yang potensial.

Ini yang realokasi yang mana?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Pimpinan, sebenarnya banyak masukan salah satunya seperti kakao yang dari 10 tahun sudah triliunan dan di satu lokasi di Sulawesi, sementara komunitas lainnya itu butuh. Jadi ini salah satunya.

Terima kasih.

Kurung misalnya tembakau biar tidak lupa saja.

KETUA RAPAT:

Ini disepakati tidak?

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Ketua, saya ingin lebih tegas. Saya sudah lihat tadi anggaran kakao itu, itu terlalu banyak sudah uang kita habis untuk kakao dan menurut saya gagal itu tidak sesuai dengan hasilnya. Sulawesi semua dulukan, kalau tidak teriak-teriak saya masih Pimpinan di situ untuk masuk keluar Sulawesi, Sulawesi *kabeh*. Jadi mohon itu dikurangi saja kakao pastikan kita kurangi, itu fungsi buget kita sebagai DPR RI bukan menghilangkan program bukan tugas kami, tapi tugas kami adalah fungsi buget, buget kurangi nanti silakan diusulkan ke yang mana.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, redaksionalnya?

Bapak saja yang buat redaksional, silakan.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Saya kira lebih tegas “Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan realokasi anggaran komoditas perkebunan kakao”. Langsung saja disebut, yang berlebihan hilang.

KETUA RAPAT:

“Kakao yang”.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

“.... yang dinilai kurang berhasil kepada komoditas lainnya yang potensial”.

KETUA RAPAT:

“Kepada komoditas lainnya yang potensial”.

Setuju?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Pengertian realokasi anggaran komoditas perkebunan nanti kesannya semuanya padahal ini sebagian. Jadi minta Kementerian Pertanian melakukan realokasi sebagian anggaran. Tadi yang tertangkap diskusi muncul tembakau misalnya.

KETUA RAPAT:

Ya boleh, realokasi anggaran yang dinilai tidak penting. Sudah cukup, oke teruskan setuju tidak ini?

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Saya kira tadi sudah betul, sebagian anggaran komoditas antara lain mengurangi anggaran perkebunan kakao.

KETUA RAPAT:

Sudah Pak, tidak usah dibahas.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Antara lain mengurangi anggaran perkebunan kakao, antara lain ya yang lainnya silakan mereka yang tahu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, setuju ini?

DIRJEN PERKEBUNAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Belum, ijin Pak, itu sebagian anggaran komoditas perkebunan antara lain kakao tadi.

KETUA RAPAT:

Komoditas perkebunan antara lain kakao.

DIRJEN PERKEBUNAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Itu perkebunannya dihapus saja, “mengurangi anggaran antara lain....”.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Yang dibuat itu perkebunannya “anggaran perkebunan”. Nah, ya oke. “Yang dinilai kurang berhasil” buang saja, kan sudah disebut komoditasnya kakao yang dikurangi.

KETUA RAPAT:

Sudah, setuju ini?

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian, baik pra panen maupun pasca panen menggunakan produksi yang berkualitas baik.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Sebentar, jadi inikan soal peralatan, uang ini uang rakyat, biarlah industriawan kita yang belajar memakai uang rakyat daripada industriawan luar negeri. Karena itu, dalam membeli peralatan itu ya memperhatikan dan mengutamakan produksi dalam negeri. Jadi jangan uang rakyat dipakai untuk percobaan-percoabaan di Tiongkok dan sebagainya.

KETUA RAPAT:

Ya, tambah kalimat saja “berkualitas baik dan diprioritaskan produksi dalam negeri”. Di belakang terakhir, “dengan mengutamakan produk industry dalam negeri”.

oke.

7. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian dalam mengembangkan komoditas pertanian yang berorientasi pasar, baik domestik maupun internasional dilakukan sesuai dengan potensi wilayah. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar melibatkan seluruh stake holder dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditas pertanian.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Badan Karantina Pertanian untuk meningkatkan kualitas kerja kinerja dengan mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk meningkatkan sarana dan prasarana karantina pertanian nasional.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak setuju?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Belum Pak, saya kira tadikan di karantina ada anggarannya untuk lebih banyak lagi ke daerah-daerah yang memerlukan Pak. Jadi dipertegaslah, tambahan.

KETUA RAPAT:

Bukan tidak setuju, tambahan.

Tambahan kalimatnya apa Pak?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Nomor 6, sebaiknya industrinya dibuang karena ada anak-anak SMK bisa bikin Tapi airnya tidak bisa masuk.

KETUA RAPAT:

Produksi dalam negeri saja, tidak apa-apa.

Jadi tambahan kalimatnya yang usul, itu yang usul tadi, lanjut, sudah.

8. Komisi IV DPR RI

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Sebentar, maksud kami tadi penambahan anggaran untuk membeli peralatan yang lebih canggih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, redaksional saja silakan.

Bapak Direktur Karantina, cukup?

Ya, nomor 8 yang sekarang karantina, Bapak setuju?

KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D.):

Ijin Pak, nomor 8 ini seperti kami jelaskan tadi bunyinya ini “Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian cq. Badan Karantina Pertanian untuk meningkatkan kualitas kinerja dengan mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pertanian nasional”.

Tadi kami sudah sebutkan Bapak Ketua, Bapak dan Ibu semua, kalau anggaran yang ada sekarang itu sebahagian besar adalah gaji pegawai. Kalau ini bunyinya ya tidak gajian Pak, kalau ini bunyinya. Maka saya pikir Bapak Bambang tadi bukan ini maksudnya. Mohon ijin Bapak Ketua, ada tambahan mungkin maksudnya tadi, apalagi disini mengalokasikan sebahagian besar anggarannya. Itu pegawai kita di karantina itu yang lebih dari mendekati 4000 orang itu ya, itu yang tidak kita setuju Bapak Ketua, belum itu Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, begini kita tengahi ya. Kita memahami bahwa barangkali sudut pandang kita terhadap besaran anggaran tidak memperhitungkan jumlah pegawai. Sehingga nanti diberikan penjelasan tertulis berapa jumlah pegawainya, honorarium dan segala macam dan belanja modalnya berapa yang sekarang. Nah, harapan yang kita masuk itu sebahagian besar anggaran itu anggaran di belanja modal tanpa mengurangi belanja pegawai. Jadi kita tidak mungkin harus mengurangi belanja pegawai Bapak, itu mah wajib. Nah, tetapi yang dimaksud adalah belanja modalnya itu diarahkan untuk pembelian peralatan. Contoh misalnya Bapak menyekolahkan ke luar negeri, pendidikan. Nah, lebih baik itu ditunda dulu beli alatnya dulu ditingkatkan, kalau sekolah jenjang yang seperti itu lebih banyak ke struktur kepangkatan dibanding pada produksi, ini yang saya pahami.

Terima kasih.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pimpinan, nomor 8 baris ketiga sebahainya kalimatnya, “sebahagian besar anggarannya diluar anggaran kepegawaian untuk”.

KETUA RAPAT:

Diluar anggaran kepegawaian, diluar belanja pegawai.

KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D.):

Ijin Bapak Ketua, boleh saya tambahkan lagi Pak. Pak ijin Pak, ini mengalokasikan sebahagian besar anggarannya itu belanja pegawai, terus operasional kita dilapangan. Operasional per karantina itu, itu sudah lebih dari 80%. Dan itu juga banyak menggunakan anggaran PNBPN, kalau PNBPN-nya tidak dapat itu tidak bisa operasional per karantina kita.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak, kita memahami bahwa yang dimaksud belanja barang yang berteknologi memadai ini tidak mengurangi biaya pegawai dan biaya operasional pegawai. Kan sudah jelas Pak, kalau disitu ada belanja pegawai berarti belanja operasional dan segala macam Bapak tidak berkurang.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Bapak Ketua, oleh karena itu bahasanya saja saya minta usul dirubah dengan mengalokasikan sebagian anggarannya, kata-kata “besarnya” dihilangkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sepakat, tidak ada masalah kalau itu.

Tidak mungkin ngambil belanja pegawai untuk belanja barang.

Silakan Pak.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Pimpinan, inikan anggaran yang sudah ada ini menurut Kepala Karantina ini kurang. Nah, kalau tidak kita tambah bagaimana mereka bisa belanja, ini jadi persoalan.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu, oke silakan Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Atau gini, “Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian cq. Badan Karantina Pertanian untuk meningkatkan kualitas kinerja dengan menambah alokasi anggaran untuk meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana”.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, bagaimana.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Tadikan Bapak Ketua sudah mengkritisi 1,8 untuk apa, jangan bicara menambah, bagaimana mengefisiensikan.

KETUA RAPAT:

Gini saja kalimatnya, "Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian cq. Badan Karantina untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan meningkatkan pengadaan". Itu, gito loh.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

.... Penjaga keluar dan masuk, artinya itu penting banget, ya memang mau tidak mau itu harus didukung. Pertama, soal kinerjanya kemudian profesionalitasnya tetapi juga sekaligus sarana dan prasarannya. Nah, baru kemudian memang perlu dukungan itu, tetapi memang secara spesifik kalau misalnya ini perlu ditambahkan anggarannya itu untuk itu. Kalau saya sih oke.

KETUA RAPAT:

Ya, nambahnya dari mana?

Nah, inikan gini loh, bahwa uangnya triliun tetapi ketika dibedah bahwa itu kebanyakan untuk kepentingan belanja pegawai. Sekarang saya tanya kepada Bapak, di luar belanja pegawai yang bisa dioptimalkan untuk belanja peralatan berapa?

KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D.):

Ijin Bapak Ketua, kami jelaskan lagi Pak, anggaran kita di Badan Karantina pertanian di tahun lalu itu 975, sekarang itu kita hanya 1,025 dengan penambahan tugas. Dan kami sudah juga membeli beberapa peralatan laboratorium yang ada sekarang, kami punya daftarnya Pak. Dan itu dirasakan saya sudah sampaikan tadi Bapak Ketua, Bapak dan Ibu semua, itu yang di bandara itu x-tray kita satupun tidak ada kecuali Soekarno Hatta, yang lainnya tidak punya. Di ensinarator misalnya kita 8P tugasnya satu pemusnahan itu pembakaran semua, kita mohon maaf masih pakai yang lain Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi kesimpulannya dengan alokasi yang dimiliki sekarang tidak dimungkinkan untuk melakukan belanja barang.

KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D.):

Dari yang sudah ada, karena kita kan sudah ada alokasikan juga ini sekarang yang ada.

KETUA RAPAT:

Yang dimungkinkan melakukan penambahan.

KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D.):

Itukan dari anggaran itu tidak bisa Pak, tidak akan dapat Pak. Kalau dari anggaran yang sudah ada ini, karena itu sudah kita alokasikan beberapa untuk peralatan laboratorium dan termasuk mendukung PLBN tadi Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi yang menjadi masalah begini Pak, gaya Bapak ini memang gaya cukup. Jadi gaya cukup jadi coba gayanya memelas sedikit gitu.

KEPALA BADAN KARANTINA (Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D.):

Makanya Pak, ijin Bapak Ketua, jadi tadi yang sekolah Pak Ketua, yang sekolah juga 30 orang karena lulus dari kita ada karantina, anggarannya dari SDM Pak, bukan anggaran di karantina Pak. Ya Pak, itu posisinya kita, jadi lulusnya dari kita anggarannya dari SDM. Nah, seperti itu kondisinya Pak.

KETUA RAPAT:

Tenang Pak, aman Pak.
Baik, bagaimana Bapak.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Pak Ketua, gampang solusinya. Minta RKA-nya kita akan bedah. Kalau memang tidak mau kita mita RKA-nya, bagikan RKA-nya kita akan lihat sebenarnya seperti apa, ada tidak kemungkinan pergeseran. Karena semuanya kan penting, alat kan juga penting masalahnya.

KETUA RAPAT:

Baik, gini dari sisi aspek regulasi bahwa tahun yang lalu dan tahun yang sekarang pergeserannya sedikit, penambahan alokasinya 30 miliar. Kemudian dengan tingkat pekerjaan yang lebih tinggi dibanding tahun kemarin. Nah, kalau beli peralatan kalau memang pakai logika anggaran yang tahun kemarin, jadi harus mana yang diefisienkan, kan gitu. Itukan lama ini, kita harus bedah anggaran *item per item*. Nah, sehingga apakah ini masih perlu dimasukkan atau tidak dulu. Kalimatnya apa? karena kalau ngambil dari dalam....

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Kalau pakai APBNP barangkali suatu saat ada....

KETUA RAPAT:

Ya, sudah dimasukkan saja kalimat perubahan anggaran. “Komisi IV DPR RI bla...bla...bla untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan meningkatkan pengadaan kualitas dan kinerja dengan menambah alokasi anggaran melalui anggaran perubahan”.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Pimpinan, kalau tidak salah anggaran perubahan itu sudah tidak ada sekarang ini.

KETUA RAPAT:

Ya inikan kalimat Pak, kalimatnya kalau anggaran perubahannya tidak ada ya tahun depan, kita fokus pada ini.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Cuma persoalannya inikan pintu gerbang sudah disepakati tadi. Banyak virus sekarang ini, kalau kita tidak punya penangkal menyesal kemudian kita. Disitu sebenarnya ada di Litbang itu cukup besar juga kok (rekaman terputus) Kemudian kita, disitu sebenarnya ada di Litbang itu cukup besar juga, hasilnya juga tidak ada. Jadi biar mereka yang mengolahnya. Saya kira itu Pimpinan, ini penting loh ini, ini musim virus kalau tidak kita antisipasi sejak awal kita disalahkan juga nanti. Karena yang bertanggungjawab di karantina ini adalah Komisi IV DPR RI.

KETUA RAPAT:

Bapak Sekjen itu yang ngatur urusan rumah tangga ini.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.M.):

Kalau demikian Pimpinan, bahasanya jangan pakai cq. Badan Karantina Pertanian. Jadi “komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran guna meningkatkan agunan, meningkatkan pengadaan....”, langsung saja “guna meningkatkan pengadaan sarana...”, buang saja semuanya sampai.

KETUA RAPAT:

Dengan Pak, bukan guna. “pengelolaan anggaran dengan meningkatkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana karantina”. Sudah itu Pak, urusan Bapak Pak, Bapak mau minjem dulu silakan yang penting ada.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

“Untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan...”, gunanya diganti, “... dengan meningkatkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana karantina pertanian melalui...”, anggaran perubahan buang. Nah, ini barangkali nanti dengan Pimpinan lagi.

KETUA RAPAT:

Terus ada yang ditinggalkan tadi bahkan kita sudah ekspose keluar, komitmen untuk tidak melakukan impor beras pada tahun ini belum masuk. Beras dan bahan pangan lainnya tadi.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pimpinan.

Setuju dengan usulan nomor 8 hanya catatan saya sangat setuju dengan Pak Sutrisno, bahwa RKA-nya diberikan kepada kita. Paling tidak kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementan dari Kementerian kita juga akan tahu RKA yang ada di karantina Pak. Karena tadi dari diskusi awal banyak hal yang disampaikan oleh Anggota bahwa ada semacam keluar dari Tupoksi atau bahkan penegasan kembali ke Tupoksi Utama dari Karantina. Sehingga dengan hal itu ya dalam rangka fungsi pengawasan saya pikir, saya setuju dengan usulan Bapak Sutrisno itu kesimpulan setuju, kemudian dilampirkan RKA untuk kemudian kita dalam.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itu hal nanti dilakukan rapat kembali membahas itu.

Baik, ya nanti di terakhir saja karena belum masuk, ditambah kesimpulan.

9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian cq. Inspektorat Jenderal untuk menyerahkan laporan kinerja pengawasan dan temuan yang diperoleh periode 2015-2019 paling lambat 3 hari kerja setelah Rapat Dengar Pendapat ini.

INSPEKTUR JENDERAL (JUSTAN RIDUAN SIAHAAN, AK., M.Acc., CA., QIA):

Ijin Bapak Pimpinan.

Kemungkinan besar kalau kita serahkan semua laporan kinerja dan kita ada keterbatasan kita. Tapi kalau ringkasannya kita akan kasih. Jadi temuannya saja tidak usah laporan kinerja pengawasan.

KETUA RAPAT:

Ya baik, temuannya saja.

9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian cq. Inspektorat Jenderal untuk menyampaikan temuan yang diperoleh periode 2015-2019 paling lambat 3 hari kerja setelah Rapat Dengar Pendapat ini.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Redaksional nanti diperbaiki.

10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data realisasi kegiatan cetak sawah secara rinci dan diserahkan sebelum Rapat Kerja berikutnya.

Setuju?

Sudah ada, hapus. Ganti dengan tidak melakukan impor itu.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Meminta Kementerian Pertanian, meminta Pemerintah barangkali ya kalau impor. Meminta ke Pemerintah, "Meminta Pemerintah...".

KETUA RAPAT:

Kementerian Pertanian, kan Kementerian Pertanian mewakili Pemerintah.

F-NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Ketua, ijin Ketua.

Persoalan impor ini tidak hanya terkait dengan Kementerian Pertanian. Memang acuan data Kementerian Pertanian sebagai kementerian teknis itu menjadi acuan untuk Ratas. Nah, sekarang niat kita untuk melarang impor beras khususnya itu kira-kira menurut Bapak Dirjen Tanaman Pangan dan kawan-kawan ini bisa tidak.

KETUA RAPAT:

Gini saja kalimatnya, “Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memenuhi produksi kebutuhan pangan rakyat dalam negeri dan tidak melakukan impor”. jadi memenuhi produksi dulu, baru selama produksinya tercapai ya tidak impor, kalau tidak tercapai ya bagaimana.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Jadi Bapak Ketua, jangan langsung tidak boleh impor, tetapi kinerja Kementerian Pertanian itu kita nilai nanti kalau ada impor, berarti kan dia tidak memenuhi. Tapi dalam kesimpulan ini jangan disebutkan tidak ada impor, tidak boleh juga.

KETUA RAPAT:

Gini saja, “... meminta Kementerian Pertanian untuk memenuhi produksi kebutuhan dalam negeri...”.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Barangkali bukan produksi ya, “memenuhi kebutuhan...”, produksi kan sudah diatas.

KETUA RAPAT:

Ya boleh, istilahnya apa?

Untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Iya.

KETUA RAPAT:

“... Kebutuhan pangan dalam negeri, dengan sedapat-dapatnya menghindari impor”. kalimatnya bahasa hukum, sedapat-dapatnya.

F-NASDEM (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Pimpinan, terlalu ini Pimpinan. Menurut saya “untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri”. Cukup itu Pak, menurut kami.

KETUA RAPAT:

Tidak, kan gini kita merespon sensitifitas publik. Kita inikan DPR RI, DPR RI itu bukan lembaga Pemerintah. Sensitifitas publik itu memiliki sensitifitas pada impor, karena impor ini tidak ada kaitannya dengan produksi dalam negeri. Lebih banyak pada kaitan kebutuhan orang per orang, yang

kita hindari ini adalah impor yang produksi dalam negerinya numpuk, impornya dilakukan terjadi pada beras, Bulog sekarang korbannya.

Baik, setuju tidak ini?

.....:

Usul Pak Pimpinan, pangannya diganti beras, eksplisit. Karena banyak sekali pangan itu nanti kedelai, gandum, apa.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan, sebelah kiri Pimpinan.

Justru itukan menggambarkan carut-marutnya tata niaga atau manajemen di dalam pangan kita. Saya justru kembali kepada esensi awal amanah dari Undang-Undang Pertanian bahwa Pemerintah diminta untuk membentuk badan pangan. Ini masalah ini muncul karena itu tidak segera direalisasikan oleh Pemerintah. Jadi justru kita ambil di pokoknya.

KETUA RAPAT:

Nanti tambah kesimpulan baru.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Itu saja Pimpinan, mengingatkan.

KETUA RAPAT:

Baik, jadi “untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri dan sedapat-dapatnya menghindari impor”.

Setuju? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bukan Pimpinan, maksud saya itukan masalah bagian kecil dari masalah besar yang belum terselesaikan.

KETUA RAPAT:

Kita dikasih ini saja Pak, kesimpulan tambahan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Oke.

KETUA RAPAT:

Tambah.

11. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk membentuk badan ketahanan pangan nasional.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Melaksanakan perintah Undang-Undang, bukan begitu.

.....:

Badan ketahanan pangan sudah ada Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya memang sudah, inikan pengen tambah lagi tidak apa-apa, saya juga tahu sudah ada.

Gini, impor-impor itu, itukan hari ini dilakukan tuh, ini impor, ini impor, semuanya tidak terukur, karena yang impor pengusaha. Nah, harapan kita ini dikendalikan oleh sebuah lembaga namanya Badan Ketahanan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional, istilahnya Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional itu di bawah Presiden, setingkat Menteri. Ya, sudah jadi Pemerintah diminta merealisasikan Badan Pangan Nasional yang kedudukannya setingkat Menteri.

Setuju tidak?

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya boleh.

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Agar tidak bertentangan dengan kamus besar Bahasa Indonesia, kiranya kata “sedapat-dapatnya digunakan” diganti dengan “guna menghindari impor”.

KETUA RAPAT:

“guna”, sudah bagus, setuju, Bapak 9 bahasa Indonesianya.

11. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk membentuk badan pangan nasional". Inikan?

.....:

Ijin Pak Pimpinan, tahun 2019 tidak ada impor, itu impor 2018 dan sebelumnya.

KETUA RAPAT:

Menjelang Pemilu.

.....:

Iya, berarti tidak ada impor.

KETUA RAPAT:

Bapak ini jujur banget sih, oke. Nomor 11 setuju?

Ini gini saja, seluruh redaksional nanti diperbaiki, yang penting secara substantive ini loh tujuannya. Setuju tidak? Nanti kita berdebat di kalimat sama koma ini.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Nomor 10 Pimpinan, itukan kalau disitu secara eksplisit disebut beras. Apakah keinginan kita beras dan bahan pangan lainnya. Kalau memang hanya beras itu *clear*, karena yang lain kan....

KETUA RAPAT:

Setuju, oke, kan kalimatnya menghindari, menghindari itu lagi Broery itu. Ya, sudah bahan pangan nasional.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pangan, pangan beras saja, kita tidak memprediksikan bagaimana yang lainnya. Kita utama beras saja sudah luar biasa.

KETUA RAPAT:

Katanya tadi umbi masih impor.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Sebentar Pak, kalau satu ketika perkiraan produksi cabe tidak tercapai, produksi bawang tercapai. Jangan Pak, cukup beras saja, bawang putih juga pangan loh Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Gini, inikan bukan kalimat guna tidak boleh impor, tapi menghindari impor. Semangatnya adalah bagaimana kita memperkuat kekuatan pangan nasional.

.....:

Setuju, kalau Bapak Daniel yang ngomong setuju saya Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju sudah, tidak ada dusta diantara kita.

(RAPAT: SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Terakhir ya, mumpung sebelum difinalisasi. Saya minta point nomor 9 bukan paling lambat 3 hari kerja setelah Rapat Dengar Pendapat ini. Soalnya kemungkinan Rapat Kerja dengan Menteri hari Senin, sehingga kalimatnya adalah paling lambat sebelum Rapat Kerja.

KETUA RAPAT:

Ya, redaksional nanti diperbaiki ya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, baik ini setuju seluruhnya?

Ya, baik.

INSPEKTUR JENDERAL (JUSTAN RIDUAN SIAHAAN, AK., M.Acc., CA., QIA):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Apa ini Bapak.

INSPEKTUR JENDERAL (JUSTAN RIDUAN SIAHAAN, AK., M.Acc., CA., QIA):

Ya, karena kita juga orang Melayu kebetulan hari Sabtu dan Minggu ini saya ada pesta dan saya mengundang Bapak dan Ibu.

KETUA RAPAT.

Dimana Bapak ada pestanya.

INSPEKTUR JENDERAL (JUSTAN RIDUAN SIAHAAN, AK., M.Acc., CA., QIA):

Mantu Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, mantu *alhamdulillah*.

INSPEKTUR JENDERAL (JUSTAN RIDUAN SIAHAAN, AK., M.Acc., CA., QIA):

Jadi mohonlah tadi.

KETUA RAPAT:

Sudahlah Pak, kita maklumi, sudah redaksionalnya kita perbaiki sesuai dengan jadwal pernikahan Bapak.

INSPEKTUR JENDERAL (JUSTAN RIDUAN SIAHAAN, AK., M.Acc., CA., QIA):

Bukan saya Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi hal-hal yang pribadi jangan dibawa ke ranah publik. Orang Melayu itu hajatnya 7 hari 7 malam, apalagi Bapak Eselon I, Kepala Desa saja bisa 7 hari 7 malam. Eselon I berarti satu bulan Pak. Tenang saja Pak, jangan terlalu cemas Pak.

Baik, ini semua disepakati kan? Kesimpulan sudah disepakati selanjutnya kita dengarkan kata akhir dari Bapak Sekjen.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ketua, ada dua hal yang mungkin lupa. Tadi anggaran dari Litbang itu hanya 10% untuk penelitian, dari 1 triliun hanya 100 miliar. Itu namanya Kepala Badan Litbang kok penelitiannya hanya 10% sisanya untuk yang lain tadi teman-teman sudah protes.

KETUA RAPAT:

Jadi bagaimana?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Maksud saya digeserlah, ditingkatkan untuk penelitiannya.

KETUA RAPAT:

Ya, sampaikan saja.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Satu, yang kedua ada masalah di Ditjen Perkebunan bahwa Dirjen melaporkan satu provinsi ada kebun rakyat yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Mohon Menteri Pertanian menyelesaikan, di Riau saja 1 juta, itu kalau tidak diselesaikan kasihan rakyatnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya juga kasihan Pak.

Sudah Pak, itu saja, pokoknya itu Direktorat Jenderal Penelitian Pengembangan jangan penelitiannya 100 miliar. Jadi Direktoratnya ganti nanti.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Boleh diijinkan untuk menjelaskan sebentar untuk Badan Litbang.

KETUA RAPAT:

Kalau Bapak saya iijinkan, jadi Rapat Kerja lagi ini. Nanti itu dijelasinnya di ruangan saja yang gitu-gitu, kan kita juga masih panjang emang mau dihabisin malam ini. Kitakan umurnya masih panjang.

Silakan Bapak memberikan kata akhir yang indah buat kami, sehingga kam Bahagia pulang ke rumah.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Baik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Alhamdulillah kalau Bapak dan Ibu, 3 hari saya merasa Rapat Dengar Pendapat ini 4 hari. Dan saya bersyukur di hari terakhir suasananya

membahagiakan, kalau saya lihat berkerutnya berkurang, senyumnya bertambah, memang itu yang saya rasakan.

KETUA RAPAT:

Jantungnya beda Pak, detak jantung yang sekarang beda Pak.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Jadi terima kasih.

Tapi terlepas dari itu semua, pertemuan 3 hari ditambah 1 hari dengan unsur Pimpinan. Saran, masukan, arahan dari Pimpinan dan Anggota, *insya allah* akan kami jadikan masukan dan kami upayakan dalam Rapat Kerja bahan sudah lebih sempurna dibandingkan sebelumnya. Kalau sempurna sekali mungkin agak sulit, tapi minimal sudah jauh lebih baik.

Sekali lagi terima kasih atas masukan, arahan dan lain-lainnya. Semoga jujur ini amal Bapak dan Ibu sekalian, dalam membantu memberikan arahan, bimbingan dalam program-program Kementerian Pertanian semoga semuanya di terima oleh Allah SWT, *amiin ya rabbal alamin*.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih semuanya.

Kita sudah menyelesaikan rapat ini dengan baik dan pulang dengan kebahagiaan yang pada akhirnya seluruh amal itu akan menjadi hamba allah atau Abdullah yang kemudian sampai pada pujian tertinggi Salim Fakhry.

Terima kasih.

Kita tutup acara ini dengan mengucapkan *alhamdulillahirabil'alamin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.40 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
196301221991031001